



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**PERJUANGAN KAUM BURUH TAMBANG BATUBARA  
OMBILIN SAWAH LUNTO:  
DARI *PERSATOEAN KAOEM BOEROEH TAMBANG (PKBT)*  
HINGGA  
*VEREENIGING BOEMIPOETRA STAATSSPOOR,  
TRAMWEGEN, OMBILINMIJNEN EN  
LANDSAUTOMOBIELDIENSTEN OP SUMATRA (VBSTOL)*  
1925-1934**

**SKRIPSI**

**SRI PUJANTI**

**0705040517**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERJUANGAN KAUM BURUH TAMBANG BATUBARA  
OMBILIN SAWAH LUNTO:  
DARI *PERSATOEAN KAOEM BOEROEH TAMBANG (PKBT)*  
HINGGA  
*VEREENIGING BOEMIPOETRA STAATSSPOOR,  
TRAMWEGEN, OMBILINMIJNEN EN  
LANDSAUTOMOBIELDIENSTEN OP SUMATRA (VBSTOL)*  
1925-1934**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**SRI PUJANTI**

**0705040517**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JANUARI 2010**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika kemudian hari ternyata saya melakukan kegiatan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 4 Januari 2010



Sri Pujianti

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Pujianti

NPM : 0705040517

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Sri Pujianti  
NPM : 0705040517  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul :

*Perjuangan Kaum Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto: Dari Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang (PKBT) Hingga Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilimmijnen en Landsautomobiieldiensten op Sumatra (VBSTOL) 1925-1934*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji : Abdurakhman, M.Hum  
Pembaca/Penguji : Dra. M.P.B. Mams  
Pembimbing : Iman Hilman, M. Hum, S S



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2010

oleh  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 19651023 199003 1 002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* merupakan kata terindah yang terhujam di kalbu dan terucap dilidah ketika semua sudah terlewati. Rasa syukur atas semua pemberian dan Karunia dari Allah SWT begitu terasa nikmat terutama pada masa-masa sulit untuk menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam tak luput pula untuk junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora pada jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Hilman, M.Hum., S.S, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan ilmu untuk mengarahkan saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dra.M.P.B. Manus, selaku dosen pembaca/penguji yang telah bersedia membaca, mengoreksi dan memberikan masukan terhadap skripsi saya sebelum dan saat sidang skripsi.
3. Mas Abdurakhman, M.Hum, selaku ketua/penguji sidang skripsi yang telah memberikan koreksi dan saran terhadap tulisan saya pada saat sidang skripsi.
4. Seluruh dosen Sejarah: Mba Erry, Mas Is, Mba Ii, Mas Bondan, Pak Harto, Mba Titi, Bu Din, Mba Ita, Mas Kas, Mas Didik, dan Mas Santo, yang telah berkenan membagi ilmunya selama kurang lebih empat setengah tahun saya menimba ilmu di Program Studi Ilmu Sejarah.
5. Yayasan Karya Salemba Empat, YAAB Orbit Pusat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang telah memberikan beasiswa selama saya menempuh studi di Universitas Indonesia.
6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan FISIP UI, Perpustakaan Umum Adinegoro Kota Sawah Lunto, Museum Gudang Ransoem Sawah Lunto dan Pusat Studi Humaniora UNAND Padang yang telah membantu saya dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta: Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan kepercayaan untuk memilih jalan ini dan senantiasa memberikan

- dukungan moril, materil serta doa yang tak henti-hentinya untukku, terutama *tahajjudnya*. Untuk kedua kakak dan kedua adikku tersayang: Uni Rama, Uda Rifki, Faisal dan Uul (*terimakasih untuk pengertian, perhatian, support, dan doanya selama ini, “semoga kerja keras kita bersama untuk membahagiakan kedua orang tua kita,segera terwujud!”*)
8. Pak Zaiyardam Zubir, Uda Yonik Saputra, Uni Mimit, Bang Abenk, Tante Net dan keluarga, Merry, Putri, Deddy, Tessy, dan Cho di Padang dan Sawah Lunto yang telah memberikan bantuan data dan tempat tinggal yang nyaman selama penelitianku di Padang dan Sawah Lunto.
  9. Sahabat seperjuanganku: Dita, Friska, Nia, Ressa yang selama ini selalu ada disisiku untuk memberikan semangat, doa, dan senyuman tulusnya (*ku bersyukur telah diberi kesempatan mengenal orang sebaik dan sehebat kalian, love u all...*)
  10. Untuk teman seperjuanganku: Devi, Ayu, Dinda, Lady, Ria, Susi, Azis, Adi, Ronal, Bima, Popon, Dwi, Hendaru, Insan dan seluruh angkatan 2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tak kenal lelah berjuang bersama, berdiskusi dan saling memberikan *support*. Senior sejarah angkatan 2002: Taufik, senior 2003: Sefri, Yanuar, dan Inana, dan senior 2004: Mulya.
  11. Keluarga Wisma Annisa: Kak Dina, Kak Mpie, Mba Is, Isye, Novi, Tiqoh, Hayu, Ugi, Esti dan Cici (*terima kasih atas rasa kekeluargaan, canda tawa, support dan curcol-curcolnya selama ini, “kalian adalah keluarga pertama dan kedua bagiku di rantau...”*) serta *larare*-ku: Nuha yang telah bekerja keras menerjemahkan arsip-arsip untuk referensi skripsiku
  12. Sahabat karibku: Ayie, Hensi, Hamdi, Haris, Suci, Delvia, Lian, Eka, Sarmin, Fauza dan Winda yang telah memberikan dukungan di masa-masa sulitku dalam menjalani skripsi (*meskipun kita berjauhan, jarang ketemu dan sibuk dengan dunia masing-masing, tetapi ketika sejenak ada kesempatan untuk chat, sms-an, telpon-telponan untuk saling berbagi adalah obat mujarab yang mampu membakar semangatku tuk selalu sabar dan ikhlas menjalani setiap helaan nafas perjuangan cita-citaku, love n miss u all...^\_^*)

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala ketulusan dan kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

**Depok, 4 Januari 2010**

**Penulis**

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Pujianti  
NPM : 0705040517  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERJUANGAN KAUM BURUH TAMBANG BATUBARA OMBILIN  
SAWAH LUNTO:  
DARI PERSATOEAN KAEM BOEROEH TAMBANG (PKBT) HINGGA  
VEREENIGING BOEMIPOETRA STAATSSPOOR, TRAMWEGEN,  
OMBILINMLINEN EN LANDSAUTOMOBIELDIENSTEN OP SUMATRA  
(VBSTOL) 1925-1934**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 4 Januari 2010

Yang menyatakan

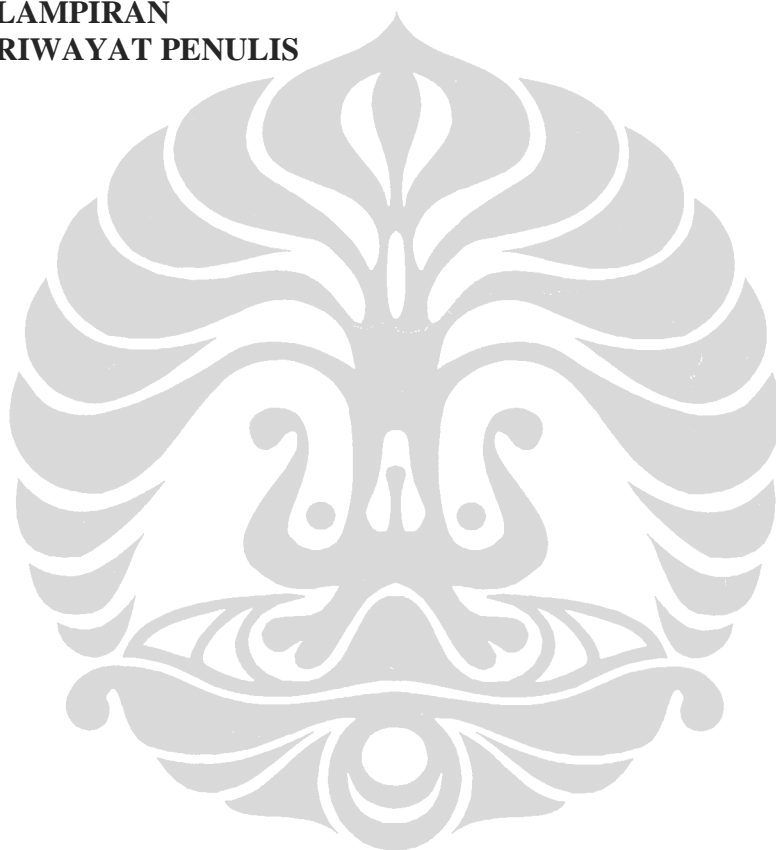


Sri Pujianti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>GLOSSARIUM.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sumber Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 SAWAH LUNTO TEMPO DOELOE .....</b>	<b>13</b>
2.1 Gambaran Umum Daerah Sawah Lunto .....	13
2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Sawah Lunto.....	13
2.1.2 Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Sawah Lunto .....	15
2.2 Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto .....	20
2.2.1 Penemuan "Emas Hitam" di Sawah Lunto .....	20
2.2.2 <i>De Ombilin Steenkolenmijnen</i> .....	23
a. Awal Beroperasinya Tambang .....	23
b. Proses Perekrutan Buruh Tambang.....	26
2.3 Kehidupan Buruh Tambang Batubara Ombilin .....	28
2.3.1 Klasifikasi Buruh dan Pembagian Kerja.....	28
2.3.2 Kesejahteraan Buruh.....	31
2.3.3 Keresahan-keresahan Awal di Tambang.....	34
<b>BAB 3 PERSATOEAN KAOEM BOEROEH TAMBANG (PKBT) SAWAH LUNTO (1925-1927).....</b>	<b>38</b>
3.1 Komunis dan Organisasi Buruh .....	38
3.2 Lahir dan Berkembangnya PKBT.....	43
3.2.1 Perjalanan PKBT .....	43
3.2.2 Media Propaganda PKBT .....	45
3.3 Pergerakan Kaum Buruh Tambang Batubara Ombilin .....	49
3.3.1 Dinamika Kehidupan Politik Kaum Buruh Tambang.....	49
3.3.2 Pecahnya Pemberontakan Silungkang 1926/1927 dan Reaksi Pemerintah Hindia Belanda.....	52

<b>BAB 4 VBSTOL (1929-1934)</b> .....	<b>57</b>
4.1 Dari Politik Perlawanan ke Politik Akomodasi hingga Depresi Ekonomi Hindia Belanda .....	57
4.2 Lahir dan Berkembangnya VBSTOL .....	61
4.2.1 Dari VB PSS ke VBSTOL (1922-1934) .....	61
4.2.2 <i>Pertimbangan</i> : Surat Kabar Orgaan VBSTOL .....	67
4.2.3 Perjuangan VBSTOL Melalui INS Kajoe Tanam dan INS ( <i>Onderbouw</i> ) Sawah Lunto (1926-1932) .....	69
4.3 Perjuangan Demi Perjuangan .....	77
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b> .....	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT PENULIS</b>	





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Willem Hendrik de Greve .....	88
Lampiran 2	Peta Penemuan Daerah Batubara di Sawah Lunto .....	89
Lampiran 3	Pemimpin Tambang Batubara Ombilin.....	90
Lampiran 4	Foto Sulaiman Labai .....	91
Lampiran 5	Daftar Korban Pemberontakan Silungkang 1926/1927.....	92
Lampiran 6	Contoh Laporan Keuangan V.B.S.T.O.L .....	94
Lampiran 7	Struktur dan Personal Pegawai Eropa .....	95
Lampiran 8	Perkembangan Jumlah Penduduk Pribumi.....	97
Lampiran 9	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Asing.....	98
Lampiran 10	Daftar Pelaku Pemberontakan Silungkang 1926/1927.....	99
Lampiran 11	Foto Kegiatan Buruh di Tambang Batubara Ombilin .....	102
Lampiran 12	Peta Hindia Belanda .....	107
Lampiran 13	Peta Sumatera .....	108
Lampiran 14	Peta Sawah Lunto .....	109
Lampiran 15	Peta Tata Kota Sawah Lunto .....	110
Lampiran 16	Peta Daerah Tambang Batubara Ombilin.....	111
Lampiran 17	Contoh Halaman Depan Surat Kabar <i>Soeara Tambang</i> .....	112
Lampiran 18	Contoh Halaman Depan Surat Kabar <i>Pertimbangan</i> .....	113
Lampiran 19	Foto Pelopor INS Kayu Tanam .....	114
Lampiran 20	Foto <i>Hoofdbestuur</i> V.B.S.T.O.L .....	115

## DAFTAR SINGKATAN

<i>A.D.E.K</i>	: <i>Algemeen Delisch Emigratie Kantoor</i>
<i>AM S</i>	: <i>Algemene Middelbare School</i>
<i>D.G.B</i>	: <i>Departement Gouvernements Bedrijven</i>
<i>B.O.W</i>	: <i>Bugerlijke en Openbare Werken</i>
<i>ELS</i>	: <i>Europeesche Lagere School</i>
<i>HBS</i>	: <i>Hogere Burger School</i>
<i>HIS</i>	: <i>Hollandse Inlansche School</i>
<i>IDC</i>	: <i>International Debating Club</i>
<i>INS</i>	: <i>Indonesische Nederlandsche School</i>
<i>I.S.D.V</i>	: <i>Indische Sociaale Democratische Vereeniging</i>
<i>K.N.A.G</i>	: <i>Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap</i>
<i>K.O.O</i>	: <i>Kamer van Opvoeding en Onderwijs</i>
<i>MULO</i>	: <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>
<i>P.I.D</i>	: <i>Politieke Inlichtingen Dienst</i>
<i>PKBT</i>	: <i>Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang</i>
<i>P.K.I</i>	: <i>Partai Komunis Indonesia</i>
<i>RHS</i>	: <i>Rechtskundige Hooge School</i>
<i>S.D.A.P</i>	: <i>Sociaale Democratische Arbeiders Partij</i>
<i>SI</i>	: <i>Sarekat Islam</i>
<i>SIPOM</i>	: <i>Societeit van het Inheemse Personeel van het Mijnwezen</i>
<i>SR</i>	: <i>Sarekat Rakyat</i>
<i>S.S.S</i>	: <i>Station Staatsspoor</i>
<i>VBPSS</i>	: <i>Vereeniging Boemi Poetera Staatsspoor</i>
<i>V.S.T.P</i>	: <i>Vereeniging van Spoor en Tramwegnpersoneel</i>

## **GLOSSARIUM**

### **Anak Jawi**

istilah setempat yang merujuk pada hubungan homoseksual selama periode kolonial.

### **Boemipoetera**

warga asli Hindia Belanda.

### **Buruh bebas**

buruh tambang batubara yang berasal dari penduduk sekitar areal pertambangan seperti penduduk Talawi, Padang Sibusuk, Muaro Kalaban, dan Padang Ganting. Sistem kontrak buruh bebas berdasarkan mingguan/bulanan.

### **Buruh kontrak**

buruh yang dikontrak selama dua atau tiga tahun, dalam realitasnya kontrak ini berjalan lebih lama lagi. Pada awal pembukaan tambang buruh tambang adalah orang Cina.

### **Buruh paksa**

buruh yang berasal dari orang hukuman dan dalam bekerja kakinya dirantai. Buruh yang diambil dari penjara-penjara di Padang, Jawa, Madura dan Makassar.

### **Darek**

wilayah pedalaman Minangkabau

### **Depresi Ekonomi**

krisis ekonomi yang berimbas pada rendahnya daya beli dan tingginya angka inflasi.

### ***Erfpacht***

hak guna tanah untuk pakai jangka panjang.

### **Ideologi**

konsep filosofis tentang kehidupan normatif yang didukung teori dan strategi gerakan untuk mewujudkannya.

### **Ilmu Kumunih**

ajaran yang menanamkan kebencian kepada pemerintah Belanda yang kafir.

### **Indo**

seseorang yang berasal dari perkawinan campuran antar dua bangsa.

### **Kapitalisme**

paham yang menganut kebebasan penguasaan hak pribadi dalam teori ekonomi. Paham ini mengutamakan pengajaran keuntungan (*profit*) dalam menempatkan pasar bebas sebagai mekanisme kontrol.

### **Komunisme**

paham yang menentang kepemilikan pribadi dan mencita-citakan penguasaan *asset* produksi secara bersama serta penghapusan kelas.

### **Kongsi Mati**

satu bentuk cabang usaha dari organisasi VBSTOL dalam member bantuan kesulitan keuangan anak, isteri, ibu dan bapa dari anggota VBSTOL.

### **Kongsi Tolong Menolong**

kegiatan sosial yang dilakukan organisasi VBSTOL dengan cara memberikan bantuan pertama kepada anggota VBSTOL yang meninggal dunia agar pemakamannya dapat terlaksana tanpa adanya kendala keuangan.

### **Lang**

lapisan-lapisan yang terdapat pada batubara, seperti lapisan A, B, dan C.

### **Leukeh**

mantan buruh yang ditugaskan untuk mencari buruh kontrak baru diberbagai tempat di pulau Jawa.

### **Luhak**

bagian dari geografis tradisional Minangkabau

### **Luhak nan tigo**

daerah inti Minangkabau yang terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto.

### **Modernisasi**

proses pembaruan tradisi, sikap, mental dan perilaku sosial yang mengedepankan rasionalitas dan profesionalisme.

### **Mandor**

pengawas buruh dalam bekerja.

### **Merantau**

tradisi untuk meninggalkan kampung halaman pergi ke tempat lain mencari nafkah dan pendidikan.

### **Nagari**

unit kesatuan wilayah sosial dan politik dalam masyarakat pedesaan Minangkabau.

### **Rantau Pedalaman**

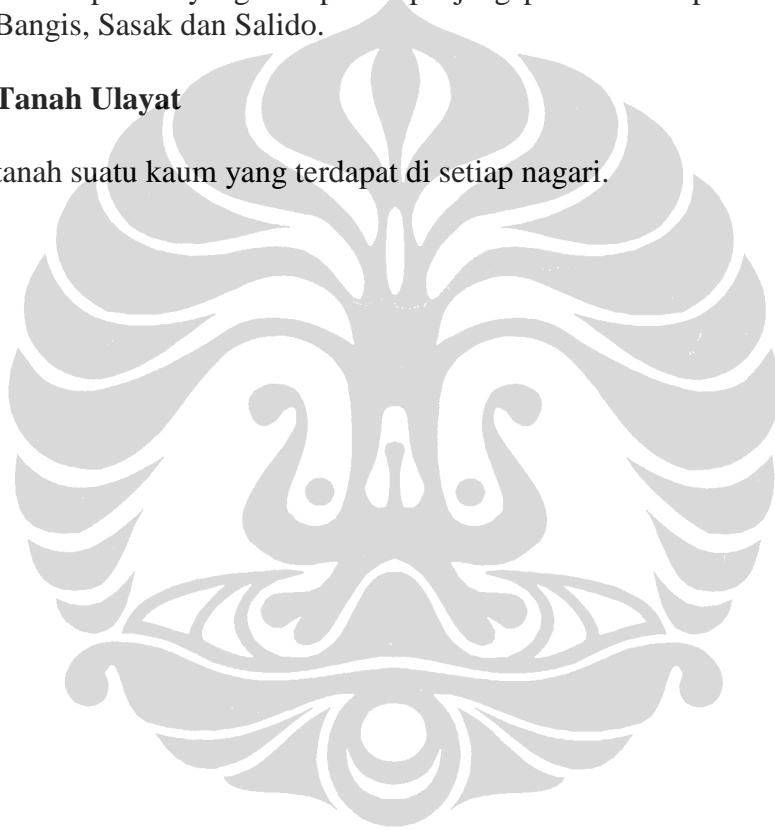
daerah yang meliputi bagian sebelah timur pulau Sumatera seperti Pasaman, dataran tinggi Agam, dan Lubuk Sikaping.

### **Rantau Pesisir**

daerah pesisir yang meliputi sepanjang pantai barat pulau Sumatera seperti Air Bangis, Sasak dan Salido.

### **Tanah Ulayat**

tanah suatu kaum yang terdapat di setiap nagari.



## ABSTRAK

Nama : Sri Pujianti  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Pembimbing : Iman Hilman, M. Hum, S.S.  
Judul :

Perjuangan Kaum Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto: Dari *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) Hingga *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinjnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* (VBSTOL) 1925-1934.

Skripsi ini membahas pertumbuhan dan peranan dua organisasi buruh yang berbeda konsep tetapi memiliki tujuan akhir yang sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh tambang batubara Ombilin Sawah Lunto agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 1920-an pergerakan serikat pekerja seperti PKBT berjalan secara radikal dan revolusioner dengan diwarnai oleh protes-protes terbuka dan terorganisir yang dilakukannya bersama buruh tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Aksi ini juga di dukung oleh partai politik yang bersifat kontra terhadap pemerintah kolonial Belanda. Setelah terjadinya pemberontakan Silungkang 1926/1927 kondisi ini berubah seiring dengan dikeluarkannya peraturan ketat oleh pemerintah. Pergerakan serikat pekerja pun ikut berubah dengan memilih jalan yang lebih lunak yakni kooperatif terhadap pemerintah kolonial. VBSTOL merupakan serikat pekerja yang memilih jalan tersebut. Organisasi buruh ini memilih jalan memperjuangkan nasib kaum buruh melalui dunia pendidikan dengan mendirikan sekolah INS (*Indonesisch Nederlandsche School*) di daerah Kayu Tanam dan Sawah Lunto.

Kata kunci: Buruh, organisasi buruh, perjuangan.

## ABSTRACT

Name : Sri Pujianti  
Major : History  
Supervisor : Iman Hilman, M.Hum, S.S  
Title :

The Struggle of Coal Mine Labors in Ombilin, Sawah Lunto: From the *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (The Mining Labour Unite) up to *The Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* (The Indigenous Organization The Railway, Street car, Ombilin mines and The Automobiles State Services in Sumatra) 1925-1934

The thesis discusses the development and role of two labor organizations, which basically had different concepts, but actually had the same goal, namely to improve the welfare of the coal mine labors in Ombilin, Sawah Lunto, so that these labors had a chance to get a better life. These study concluded that in the 1920s, the labor movement, such as PKBT had been radical, revolutioner and full of protests. This activities they did together with the labour of the Ombilin Sawah Lunto coalmines. This action was also supported by opposing labour political parties against the Dutch Colonial Government. This situation changed in the year 1926/1927 after the Silungkang uprising since the Colonial Government became more strict. The opposing organization then changed the activities from using force to a more indicate attitude, they were more cooperative to the Government. VBSTOL was the organization which chose the way. This labor organization preferred to improve the labors' fate through education by establishing INS schools in Kayu Tanam and Sawah Lunto.

Key Words: labor, labor organizations, struggle.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak tahun 1858 pemerintah kolonial Belanda meyakini akan adanya endapan batubara di daerah Ombilin dengan menugaskan seorang ahli tambang bernama Ir. C. De Groot untuk meneliti daerah-daerah yang mengandung batubara di Sumatera. Kemudian pada tahun 1867 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 26 Mei 1867 ditugaskan Ir. W. H. de Greve untuk menyelidiki lebih lanjut dan secara pasti ditemukannya lapisan batubara pada tahun 1868 di daerah Ulu Air, tepi sungai Ombilin Sawah Lunto.<sup>1</sup> Setelah ditemukannya sumber batubara di Ombilin, maka Pemerintah menginginkan agar usaha ini dikerjakan oleh pihak swasta. Pada tahun 1883 dan tahun 1886, Pemerintah mengadakan penawaran pada pihak swasta untuk menanamkan modalnya guna pengelolaan tambang batubara Ombilin, namun karena besarnya modal awal yang harus ditanamkan<sup>2</sup> dan belum pastinya keuntungan yang didapat oleh pihak swasta, membuat mereka mundur dan menyerahkan pengelolaan tambang sepenuhnya kepada Pemerintah.

Permasalahan dana dan transportasi membuat proses penambangan terlambat dikerjakan. Akhirnya pada tahun 1891,<sup>3</sup> Pemerintah menanamkan modalnya secara langsung pada tambang batubara Ombilin. Hal ini diiringi pula dengan ditetapkannya rancangan Undang-undang oleh Dewan Penasehat Negara pada tanggal 24 November 1891 untuk penambangan batubara Ombilin.<sup>4</sup> Barulah pada tanggal 4 Januari 1892 diterbitkan pada Lembaran Negara No. 2 yang isinya tentang kenaikan anggaran belanja Pemerintah Hindia Belanda untuk tahun 1892 dalam rangka eksploitasi Tambang Batubara Ombilin (TBO) oleh pemerintah

---

<sup>1</sup>Adeng Sunardi. *100 Tahun Tambang Batubara Ombilin 1891-1991*. (Sawahlunto: tanpa penerbit, 1991), hlm 3.

<sup>2</sup>Pada tahun 1883 pemerintah mengajukan syarat untuk pengelolaan tambang batubara agar berada di satu tangan, selengkapnya lihat Rusli Amran. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981), hlm 311

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 312.

<sup>4</sup>Pada tahun 1891 untuk memimpin perusahaan tambang Ombilin ditunjuk seorang ahli geologi Ir. W. Godefroy. Ia memimpin perusahaan selama 1 tahun, namun baru pada tahun 1892 di bawah pimpinan Ir. J.W. Ijzerman proyek penambangan batubara Ombilin mulai beroperasi, lihat Zaiyardam Zubir. *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai: Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin oleh Kolonial Belanda 1891-1927*. (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm 97-98.



Belanda.<sup>5</sup> Untuk meningkatkan peranan tambang batubara dalam membantu sumber pendapatan Pemerintah Hindia Belanda maka tanggal 3 Juli 1918 di keluarkan Surat Keputusan No. 64 dan diterbitkan pada Lembaran Negara No. 375, yang mengukuhkan bahwa usaha pertambangan menjadi perusahaan tambang batubara Ombilin (*De Ombilin Steenkolenmijnen*) dan pengelolaannya berada di bawah Departemen usaha-usaha Pemerintah.<sup>6</sup>

Untuk mengerjakan tambang batubara Ombilin dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Pada awal beroperasinya tambang tahun 1892, pemerintah Belanda mempekerjakan orang-orang hukuman yang di ambil dari beberapa penjara, seperti dari penjara di Surabaya, penjara Glodok, penjara Cipinang di Batavia, penjara di Bukittinggi dan Padang.<sup>7</sup> Karena jumlah mereka yang banyak dan tersebar diberbagai tempat, maka banyak dari mereka yang melarikan diri. Selain itu, akibat Perang Aceh tahun 1898, para pekerja paksa ini diperbantukan untuk perang dan dididik menjadi tentara. Akhirnya untuk menggantikan pekerja tersebut perusahaan mempekerjakan penduduk setempat menjadi buruh tambang,<sup>8</sup> tetapi usaha ini belum bisa mencukupi kebutuhan akan tenaga buruh, sehingga berbagai cara dikerahkan untuk merekrut tenaga buruh sebanyak-banyaknya.

Setelah tahun 1901 perusahaan mulai mendatangkan pekerja tambang yang di kontrak dari pulau Jawa melalui kantor pengerahan tenaga kerja di Semarang, *Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (ADEK).<sup>9</sup> Di samping itu Pemerintah Belanda sendiri juga mendatangkan buruh paksa dan buruh kontrak dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang etnis, seperti dari etnis Jawa,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 99.

<sup>6</sup> Adeng, *op. cit.*, hlm 5.

<sup>7</sup> Erwiza Erman, et al. *Orang Rantai: Dari Penjara ke Penjara*. (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm 22.

<sup>8</sup> Di dalam tambang Ombilin penduduk setempat hanya bekerja pada pekerjaan yang bersifat teknis seperti tukang kayu, dan pembantu montir. Mereka bekerja dalam jangka waktu yang pendek sekitar dua atau tiga minggu, sehingga mereka tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi dipertambangan.

<sup>9</sup> Pada tahun 1916 *Directeur van Justitie* mengusulkan agar perekrutan kuli kontrak Jawa dikoordinasi oleh satu organisasi perekrutan. Di akhir tahun 1916 terwujudlah sebuah organisasi perekrutan dengan nama *Algemeen Delisch Emigratie Kantoor* (ADEK). Fungsi ADEK adalah mengkoordinasi perekrutan kuli kontrak dari Jawa untuk organisasi perusahaan perkebunan tembakau, terutama bagi organisasi perkebunan karet, lihat Razif, *Tahap-tahap Perekrutan dan Penguasaan Kuli Kontrak di Perkebunan Karet di Sumatera Timur (1904-1920)*. (Depok: FIB UI, 1988), hlm 72-74.

Bugis, Madura, Minangkabau dan bahkan etnis Cina yang didatangkan dari Singapura dan Penang. Dari pengerahan tersebut terlihat beragamnya asal usul para pekerja di tambang batubara Ombilin, sehingga kehidupan dipertambangan menjadi semakin kompleks.

Keberagaman inilah yang seringkali memunculkan perbedaan-perbedaan dalam keseharian mereka berinteraksi di dalam tambang, sehingga perbedaan ini pulalah yang menjadi pemicu keresahan-keresahan dalam kehidupan dipertambangan pada masa-masa selanjutnya. Selain itu, masalah upah dan perlakuan para mandor yang tidak manusiawi pun sering menjadi pemicu pertikaian yang berakhir dengan kematian. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perusahaan pun mengelompokkan buruh berdasarkan pola perekrutannya, seperti buruh paksa dipekerjakan pada lobang bawah tanah, buruh kontrak dan buruh bebas mengerjakan pekerjaan teknis di lapangan. Akan tetapi hal ini tidak cukup membantu apalagi setelah masuknya unsur-unsur dari luar seperti pengaruh dari tawanan politik yang juga dipekerjakan dipertambangan. Perbedaan upah diantara masing-masing golongan buruh seringkali diperuncing oleh orang-orang tersebut sehingga buruh pun mulai melakukan perlawanan atau pun protes pada perusahaan untuk perbaikan nasibnya.

Untuk mengungkap keresahan yang terjadi di kalangan buruh yang berujung pada aksi protes, perlu dilihat dan dicermati lebih dalam akan keberadaan seorang atau sekelompok tokoh atau elite yang masuk dalam dunia pertambangan. Keberadaan elite ini dalam pertambangan berkemungkinan menjadi motor penggerak dan pemikir dari setiap gerakan yang direncanakan. Pada tahun 1925 hingga 1926 terjadi penurunan jumlah pekerja terutama buruh bebas di tambang batubara Ombilin.<sup>10</sup> Hal ini merupakan salah satu pengaruh yang disebabkan oleh kondisi politik yang berkembang di Hindia Belanda pada umumnya dan di Sawah Lunto khususnya. Masyarakat mulai menyadari akan beratnya bekerja sebagai buruh di pertambangan, dan mulai mendapat pengaruh dari partai politik yang menyorot kehidupan buruh.

Setelah masuknya organisasi buruh ke dalam tambang, barulah buruh memiliki wadah untuk memperjuangkan nasibnya dan mulai melakukan gerakan

---

<sup>10</sup> Zaiyardam, *op. cit.*, hlm 156.

terencana dan terorganisir untuk melakukan protes terhadap kebijakan perusahaan terhadap buruh, terutama buruh paksa. Propaganda untuk mendirikan organisasi di bawah naungan bendera komunis muncul sejak tahun 1923, tokoh-tokoh komunis<sup>11</sup> menjadikan buruh sebagai sasaran dan basis kekuatan organisasinya. Hal ini pulalah yang melahirkan sebuah organisasi buruh di tambang batubara Ombilin yang diberi nama *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) Sawah Lunto.<sup>12</sup>

Setelah berdirinya Sarekat Rakyat dan Partai Komunis maka orientasi politik ke arah pemogokan-pemogokan dan protes kepada Pemerintah kolonial makin berkembang. Koordinasi yang terjalin diilhami oleh prinsip perjuangan kelas oleh buruh dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pemimpin politik lokal. Dalam pembentukan PKBT beserta kegiatan politiknya yang cenderung radikal, peranan Sarekat Islam, Sarekat Rakjat, dan PKI tidak bisa dipandang sebelah mata. PKBT secara resmi diakui oleh Pemerintah pada tanggal 12 April 1925, dan pembentukannya ini diiringi oleh penerbitan dua surat kabar yakni *Soera Tambang* dan *Panas* di Sawah Lunto. Seorang mantan buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang Ombilin bernama Nawawi Arief diangkat menjadi pemimpin PKBT sekaligus pemimpin redaksi surat kabar *Soera Tambang* Sawah Lunto, sedangkan S.M. Salim, seorang mantan pemimpin komunis di Padang tahun 1925 diangkat menjadi pemimpin redaksi *Panas* Sawah Lunto. Kedua surat kabar ini dibiayai oleh iuran dari pedagang-pedagang kecil di daerah Sawahlunto dan desa lain seperti Silungkang, Kota Lawas, dan Padang Panjang. Pemimpin-pemimpin organisasi dan surat kabar ini menyebarkan pengaruhnya di tempat-tempat umum seperti pasar, mesjid, tangsi, dan di dalam tambang batubara Ombilin.

Dengan terbentuknya PKBT, muncul kekhawatiran dari pihak Belanda terutama ketika buruh pribumi mulai menggalang kekuatan untuk melakukan protes dengan cara mogok kerja, melawan mandor dan melakukan berbagai tindakan yang bersifat melawan pihak perusahaan. Adapun antisipasi yang

---

<sup>11</sup> Sulaiman Labai, Datuk Bagindo Ratu, Talaha Sutan Langit merupakan tokoh pergerakan komunis masa-masa awal di Sumatera Barat khususnya di daerah Sawah Lunto, lihat A. Muluk Nasution. *Pemberontakan Sarikat Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1981), hlm 47.

<sup>12</sup> Zaiyardam, *op. cit.*, hlm 215.

dilakukan pemerintah dengan memberlakukan aturan ketat terhadap setiap buruh yang keluar masuk pertambangan.<sup>13</sup> Namun tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut semakin meningkatkan semangat buruh untuk melakukan perlawanan hingga mencapai puncaknya pada malam pergantian tahun 1926/1927. Pemberontakan ini dimotori oleh beberapa organisasi besar seperti SI, SR dan PKI bersama buruh beserta masyarakat setempat untuk merebut kembali dominasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di daerah Sumatera Barat, khususnya di tambang batubara Ombilin. Akan tetapi, karena kurang matangnya persiapan untuk menggempur kekuatan pemerintah kolonial, akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas oleh tentara pemerintah kolonial Belanda.

Setelah pemberontakan Silungkang 1926/1927, politik buruh mulai mengalami pergeseran dari politik perlawanan ke politik akomodasi. Ditambah lagi dengan terjadinya depresi ekonomi dunia, kehidupan masyarakat pertambangan pun ikut berubah. Pemerintah kolonial pun kembali menjalankan politik represif mereka yang tidak memberikan ruang gerak bagi penduduk sipil. Perubahan demi perubahan mulai terjadi di dalam kehidupan sosial buruh dipertambangan, dan kehidupan masyarakat umum di sekitar tambang batubara Ombilin. Hal ini ditandai dengan terbentuknya berbagai asosiasi-asosiasi yang terdiri dari berbagai latar belakang kelompok masyarakat dan dengan tujuan yang beragam pula. Masyarakat sekitar mulai terbuka terhadap kehidupan buruh dipertambangan, buruh mulai bergerak keluar tambang dengan membentuk komunitas-komunitas baru di luar pertambangan dan berbaur dengan masyarakat sekitar, sehingga terbentuklah pola baru dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar tambang batu bara Ombilin.

Dalam kehidupan politik buruh yang berkembang setelah pemberontakan 1926/1927, perubahan terjadi di kalangan pribumi yang bekerja di tingkat lebih rendah di perusahaan. Kelompok ini membentuk berbagai asosiasi solidaritas buruh sesuai dengan asal usul dan kegemaran mereka. Misalnya organisasi *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinjnen en Landsautomobieldiensten op Sumatra* atau VBSTOL (Asosiasi Perkereta-apian,

---

<sup>13</sup> Pemerintah menangkap dan mengadili para buruh yang dicurigai menganut paham komunis, mengintrogasi hingga memecat buruh yang melakukan perlawanan ketika diperintahkan untuk bekerja pada tempat-tempat yang bukan tempat ia biasa bekerja.

angkutan Trem, Tambang Ombilin dan Dinas Mobil Pemerintah di Sumatra) yang telah terbentuk sejak tahun 1922 untuk orang-orang yang masuk dalam Kelompok A<sup>14</sup>. Tetapi organisasi ini tidak berjalan seperti semestinya, barulah setelah pemberontakan 1926/1927 organisasi ini menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah asosiasi yang lebih moderat dan dalam perjalanannya organisasi ini pun berupaya memperjuangkan perbaikan nasib buruh di pertambangan agar hidup lebih baik.

Studi-studi mengenai kehidupan buruh di Sumatera Barat pada awal abad ke-19 telah dilakukan sebelumnya, baik yang telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun sebagai sebuah karya akademis yang tidak diterbitkan. Namun semua studi tersebut pada umumnya mendeskripsikan tentang kehidupan sosial kaum buruh, seperti konflik internal di antara buruh dan perusahaan, tingkat kesejahteraan buruh, dan lain sebagainya yang bersinggungan dengan dinamika kehidupan sehari-hari kaum buruh dalam pertambangan.

Salah satu karya yang mengulas tentang kehidupan buruh, adalah karya yang ditulis oleh Erwiza Erman *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawah Lunto-Sumatera Barat (1892-1996)*. Dalam karya Erwiza Erman ini yang merupakan terjemahan dari disertasinya untuk meraih gelar Ph.D tahun 1999 di Universitas Amsterdam dan telah diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Indonesia, memfokuskan pada hubungan sosial dan kontrol sosial di dalam masyarakat penambang dan manajer di tambang batubara Ombilin Sawah Lunto dengan periodisasi lebih dari satu abad. Adapun karya lain mengenai kehidupan buruh, adalah yang termuat dalam karya akademis yang ditulis oleh Zaiyardam Zubir, *Kehidupan Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat 1891-1927*. Dalam karya Zaiyardam Zubir ini yang merupakan Tesis untuk memenuhi syarat mencapai S-2 Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora UGM pada tahun 1995, menguraikan tentang kehidupan buruh tambang batubara Ombilin yang kompleks.

---

<sup>14</sup> Dalam pengelompokan buruh berdasarkan sistem upah di tambang batubara Ombilin ada yang dikelompokkan dalam Golongan A, B, dan C. Kelompok A terbagi atas dua kelompok yaitu golongan A 18 dan Golongan A. Golongan A 18 berasal dari peranakan Belanda dan orang Belanda, sedangkan Golongan A adalah penduduk pribumi yang terdiri dari buruh paksa, buruh kontrak dan buruh bebas.

Selain itu, terdapat juga karya lain mengenai kehidupan sosial buruh khususnya mengenai permasalahan yang muncul setelah kehidupan buruh mulai dipengaruhi oleh tokoh-tokoh intelektual Minangkabau. Di antaranya, adalah karya A. Muluk Nasution, *Pemberontakan: Sarikat Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*, yang menceritakan bagaimana tokoh-tokoh organisasi buruh mulai terlibat ke dalam pertambangan dan mempengaruhi buruh tambang untuk melakukan pergerakan melawan kapitalisme kolonial Belanda dan karya Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Dalam buku ini, penulis mengkaji hubungan antara kemunculan gerakan pemberontakan dengan tekanan sosial ekonomi dan pengaturan yang datang dari rezim penguasa yang menindas.

Jadi dapat dikatakan belum ada karya yang menulis secara terperinci mengenai perjuangan kaum buruh tambang batubara Ombilin bersama organisasi buruh dalam memperjuangkan perbaikan nasib kaum buruh tertindas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tulisan ini mengupas bagaimana upaya buruh dan organisasinya dari politik perlawanan ke politik akomodasi untuk meminimalisir dominasi kekuasaan Pemerintah kolonial pada perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perjuangan kaum buruh bersama organisasi buruh dalam mencapai tujuannya menciptakan kesejahteraan bagi kaum buruh. Untuk mengulas permasalahan secara lebih dalam, akan diajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. bagaimana proses berdirinya perusahaan tambang batubara Ombilin (TBO) Sawah Lunto dan kebijakan-kebijakan apa yang berlaku dalam perusahaan tersebut?
2. bagaimana proses pembentukan dan perkembangan organisasi *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang Sawah Lunto* serta upayanya untuk memperjuangkan nasib buruh yang semakin tertindas?
3. bagaimana proses pemberontakan yang terjadi di Silungkang tahun 1926/1927 dan bagaimana sikap pemerintah Belanda terhadap

keberadaan organisasi buruh tambang di Sawah Lunto pasca pemberontakan tersebut?

4. bagaimana sikap organisasi *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* Sawah Lunto terhadap kebijakan politik perburuhan pemerintah kolonial dan upayanya dalam memperjuangkan aspirasi kaum buruh tambang batubara Ombilin?

### 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Judul penelitian ini adalah “Perjuangan Kaum Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto: Dari *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) Hingga *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* (VBSTOL) 1925-1934”. Judul ini dipilih karena di dalamnya akan dibahas perjuangan kaum buruh tambang batubara Ombilin bersama organisasi buruh untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Batasan temporal dari penulisan ini adalah tahun 1925 hingga 1934. Tahun 1925 menjadi periode awal pembahasan karena ditahun ini organisasi buruh *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) mulai diresmikan oleh Pemerintah Kolonial dan masuk ke dalam dunia tambang. Tahun 1934 menjadi batasan akhir, karena pada tahun tersebut menjadi akhir dari perjuangan buruh bersama organisasi *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* (VBSTOL) dan menjadi tahun terakhir bagi organisasi VBSTOL dalam memperjuangkan perbaikan kehidupan buruh tambang pada perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto.

Untuk batasan spasial, penulisan ini lebih memusatkan perhatian pada wilayah tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Pada akhir abad ke-19 perusahaan tambang batubara Ombilin merupakan perusahaan terbesar yang dikelola pemerintah Belanda dan memberikan pendapatan cukup besar bagi pemerintah Belanda, sehingga sarana dan prasarana yang dibangun untuk pengoperasian kawasan tambang ini sangat optimal. Selain itu, dengan didirikannya perusahaan tambang batubara Ombilin (*De Ombilin Steenkolenmijnen*), daerah Sawah Lunto pun mengalami perubahan baik dari segi fisik daerah maupun kehidupan masyarakatnya, sehingga daerah pedalaman ini

pun tumbuh menjadi kota industri yang terbuka bagi siapa pun. Untuk batasan tematik, dalam penelitian ini dibatasi pada pertumbuhan dan peranan dua organisasi buruh yang berbeda konsep tetapi memiliki tujuan akhir yang sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh tambang batubara agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini, adalah untuk memperkaya khasanah penulisan mengenai organisasi buruh di Indonesia pada awal abad ke-20, khususnya organisasi buruh tambang batubara. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada generasi muda tentang sejarah lokal yang diperjuangkan oleh orang-orang biasa di lingkungan masyarakatnya, sehingga paradigma mengenai sejarah dilahirkan dari kaum elit dapat ditambahkan dengan memunculkan sisi lain dari sebuah peristiwa sejarah, bahwa sejarah pun bisa lahir dari orang-orang biasa seperti buruh tambang batubara Ombilin.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode sejarah adalah sebagai alat yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sejarah, metode tersebut meliputi empat tahap. Tahap pertama adalah tahap heuristik, yang merupakan tahap pencarian, penelusuran, dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian ini. Pencarian sumber-sumber dilakukan melalui studi kepustakaan. Adapun sumber-sumber yang diperoleh berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang ditemukan berupa surat kabar dan majalah sezaman, dokumen pemerintah kolonial yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber sekunder yang berhasil penulis kumpulkan adalah berupa buku-buku, artikel, skripsi, tesis, dan laporan seminar atau lokakarya yang menunjang penulisan ini yang di dapat dari berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan FISIP UI, Perpustakaan Umum Adinegoro Kota Sawah Lunto dan Pusat Studi Humaniora UNAND dan Museum Goedang Ransoem Sawah Lunto.



Pada tahap kedua metode sejarah yang harus dilakukan adalah kritik terhadap data-data yang telah dikumpulkan, baik sumber primer maupun sekunder. Hal ini dilakukan dengan menguji melalui perbandingan dengan beberapa sumber yang relevan. Dari proses kritik ini diharapkan diperoleh fakta-fakta sejarah sebagai bahan penulisan yang memiliki kredibilitas sebagai sumber. Tahap interpretasi merupakan tahap ketiga yang harus dilakukan. Melalui tahap ini penulis berusaha menafsirkan fakta-fakta dan memberikan makna pada setiap fakta yang telah diperoleh untuk dapat merekonstruksikannya kedalam bentuk tulisan. Tahap terakhir dari metode sejarah adalah tahap historiografi. Pada tahap ini semua fakta yang telah melalui tahap kritik dan interpretasi ditulis dalam bentuk kisah sejarah berupa deskripsi sebuah peristiwa yang memiliki makna dan ditulis secara sistematis.

### 1.6 Sumber Sejarah

Penulisan ini menggunakan sumber-sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan sebagai acuan di antaranya, surat kabar *Soeara Tumbang* yang beredar setiap akhir bulan pada tahun 1925 sampai 1926. Surat kabar ini adalah salah satu media propaganda bagi organisasi buruh PKBT untuk menyebarkan pada khalayak tentang kehidupan para buruh tambang dalam tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Disamping itu media publikasi lainnya yang digunakan oleh organisasi buruh PKBT adalah surat kabar *Panas*, tetapi sumber fisik dari surat kabar *Panas* tidak dapat ditemukan karena surat kabar ini sudah dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada masanya. Namun demikian, masih diperoleh informasi tentang keberadaan sumber tersebut dari beberapa surat kabar lain yang beredar pada zamannya. Adapun surat kabar sezaman yang dijadikan bahan referensi lain, di antaranya *Tjaja Soematra*, *Pertimbangan*, *Bendera Islam*, *Rantai Mas*, *Sinar Sumatra*, *Si Tetap*, *Warta Hindia* dan *Djago-djago*.

Selain surat kabar yang terbit pada zamannya, sumber primer lain yang digunakan untuk referensi penulisan ini adalah sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia berupa *Regeerings Almanak voor Nederlansch Indie 1926*, *Tweede Gedeelte Kalender en Personalia*. Dari sumber ini diketahui daftar nama pejabat-pejabat kolonial Belanda yang memimpin wilayah-wilayah jajahannya,

termasuk untuk daerah Sawah Lunto dan sekitarnya. Akan tetapi dari sumber ini tidak disebutkan kebijakan yang diberlakukan oleh setiap pejabat Belanda yang memerintah di wilayah tersebut. Selain itu sumber primer lain yang dapat digunakan adalah *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, *Kolonial Verslag*, dan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*.

Sumber sekunder yang digunakan sebagai referensi utama diantaranya karya Erwiza Erman, berjudul *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawah Lunto-Sumatera Barat (1892-1996)*. Jakarta: Desantara Utama, 2005. Buku yang ditulis oleh Zaiyardam Zubir dengan judul *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai: Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin oleh Kolonial Belanda 1891-1927*. Padang: Andalas University Press, 2006. Selain itu masih ada beberapa buku lainnya yang ditulis oleh beberapa penulis yang memberikan perhatian lebih pada kehidupan dunia buruh, konsep buruh itu sendiri, dan beberapa buku yang berhubungan dengan radikalisme masa pergerakan khususnya untuk periode 1925-1942. Di antaranya, karya Harry J. Benda, Ruth T. McVey berjudul *The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*, karya Abdul Muluk Nasution berjudul *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Mutiara, 1981 dan karya Mestika Zed dengan judul *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan yang diberi judul “Perjuangan Kaum Buruh Tambang Batubara Ombilin: Dari *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) Hingga *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinjnen en Landsautomobieldiensten op Sumatra* (VBSTOL) 1925-1934” ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membicarakan beberapa hal pokok seperti latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sumber sejarah dan sistematika penulisan yang menjadi pengantar dari penulisan ini.

Bab kedua membahas keadaan geografis, ekonomi dan sosial masyarakat Sawah Lunto, penemuan sumber daya batubara di Ombilin, proses perekrutan buruh tambang, dan kehidupan buruh tambang serta permasalahannya dalam

perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Bab ketiga membahas proses pembentukan dan perkembangan organisasi buruh *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) Sawah Lunto. Bab ini juga membahas seberapa besar keterlibatan unsur komunis dalam mempengaruhi perkembangan organ buruh ini serta dinamika kehidupan politik buruh tambang yang mencapai puncaknya pada pemberontakan di Silungkang awal tahun 1927.

Bab ke empat membahas perjalanan organisasi buruh *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* (VBSTOL) dalam memperjuangkan nasib buruh tambang setelah tahun 1927. Bab ini juga membahas sikap dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial terhadap keberadaan organisasi buruh tambang di Sawah Lunto setelah terjadinya pemberontakan komunis di beberapa wilayah di Sumatera Barat, perubahan sikap politik buruh, pengaruh depresi ekonomi terhadap nasib buruh, hingga upaya yang ditempuh buruh dalam mempertahankan hidup pada masa-masa sulit tersebut.

Pada bab terakhir, yakni bab lima diberikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan setelah melalui tahap metode sejarah, sehingga melalui kesimpulan di dapat sesuatu pengetahuan baru atau makna dari sebuah fakta sejarah.

## BAB 2

### SAWAH LUNTO TEMPO DOELOE

#### 2.1 Gambaran Umum Daerah Sawah Lunto

##### 2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Sawah Lunto

Kota Sawah Lunto terletak di propinsi Sumatera Barat di daerah perbukitan dengan ketinggian 256 meter di atas permukaan laut di deretan pegunungan yang dikenal sebagai Bukit Barisan<sup>1</sup> yang membujur sepanjang Pulau Sumatera dan berjarak 95 km dari kota Padang arah ke Timur.<sup>2</sup> Wilayah kota Sawah Lunto terbentang dari Utara ke Selatan dan bagian Timur serta Selatan relatif curam, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar.<sup>3</sup> Kondisi geografisnya yang demikian membuat daerah ini memiliki banyak daerah tertutup, sehingga wilayah yang dapat dikembangkan menjadi perkotaan sangat terbatas. Secara administratif pemerintah Sawah Lunto memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Nagari Kolok (Kecamatan Barangin) dan Sijantang (Kecamatan Talawi).
- Sebelah Barat : berbatas dengan Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar)
- Sebelah Timur : berbatas dengan Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar)
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Nagari Kubang dan Nagari Silungkang (Kecamatan Silungkang)<sup>4</sup>

Kata Sawahlunto berasal dari dua kata, yaitu sawah dan lunto. “Sawah” yang terletak di sebuah lembah yang dialiri sebuah anak sungai bernama Batang Lunto, sehingga daerah itu dinamai dengan Sawah Lunto. Kata “Lunto” berasal dari kata “antah” atau “untoh” menurut dialek masyarakat setempat yang berarti tidak tahu, dan kata ini digunakan untuk menyebut anak sungai. Bagi orang

---

<sup>1</sup>Erwiza Erman, *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawah Lunto-Sumatera Barat (1892-1996)*. (Jakarta: Desantara Utama, 2005), hlm 40.

<sup>2</sup>Zulqayyim, “Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Sawahlunto Masa Kolonial sampai Sekarang” dalam *Seminar dan Lokakarya Konservasi Bangunan Tua dan Revitalisasi Kota Lama Sawahlunto*. (Sawahlunto, 11 Desember 2006), hlm 1.

<sup>3</sup>LPM ITB, *Rencana Kota Wisata Tambang Sawah Lunto*. (Bandung: LPM ITB, 2001), hlm 17.

<sup>4</sup>Andi Asoka, dkk., *Sawahlunto: Dulu, Kini, dan Esok, Menyongsong Kota Tambang yang Berbudaya*. (Padang: PSH dan Kota Sawahlunto), 2004, hlm 2. (Lampiran 14: Peta Sawah Lunto)

Belanda menyebut Sawah Lunto dengan *lunto kloof* atau lembah lunto, karena daerah ini terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan.

Topografi Sawah Lunto yang berbukit dan berlembah tersebut, memiliki banyak patahan-patahan yang tentunya relatif tidak kondusif untuk dijadikan areal pemukiman dan perkantoran. Areal perkantoran dan pemukiman umumnya dibangun didataran kaki bukit yang sempit atau dilereng-lereng bukit. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan Pemerintah kolonial Belanda memilih daerah Sawah Lunto untuk menjadi pusat administrasi pertambangan batubara Ombilin. Pertimbangan ini juga didukung oleh daerah yang menjadi lokasi penambangan seperti Parambahan, Sikalang, Tanjung Ampalu, Sungai Durian, Sigaluik, Padang Sibusuak, dan Lurah Gadang terletak mengitari Sawah Lunto dengan jarak yang relatif dekat, sehingga lebih mudah untuk mengontrol proses penambangan batubara.

Setelah Minangkabau ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1837, wilayah ini berada di bawah seorang residen yang mengepalai administrasi *Residentie van het Sumatra's Westkust* atau *Westkust van Sumatra* dan semenjak tahun 1895 sampai tahun 1902 Sawah Lunto menjadi bagian dari *Onderafdeeling VII Kota* yang dikepalai oleh seorang *Controleur* atau Kontrolir dan dibantu oleh seorang *Adspirant Controleur* atau Pembantu Kontrolir. Di tahun 1903 terjadi perubahan posisi Sawah Lunto menjadi *Onderafdeeling* Sawah Lunto yang merupakan bagian dari *Afdeeling Tanah Datar*. Pada tahun 1895-1910 *Afdeeling Tanah Datar* berkedudukan di *Fort van der Capelen*.<sup>5</sup> Pada tahun 1910 terjadi pembagian kedudukan asisten residen yang mengepalai *Afdeeling Tanah Datar* ke Sawah Lunto, *Residensi Padangsche Bovenlanden* dihapus dan diganti dengan *Gouvernement Sumatra's Westkust* yang terdiri dari delapan *Afdeeling*, sehingga sejak 1910 kedudukan *Assistent Resident* berkedudukan di Sawah Lunto.

Perkembangan administratif Kota Sawah Lunto sejak tahun 1910 sampai tahun 1929 menunjukkan bahwa kota Sawah Lunto bukan saja menjadi pusat kegiatan penambangan batubara Sumatera Barat, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda untuk *Afdeeling Tanah Datar*. Ketika reorganisasi

---

<sup>5</sup>Edi Utama, peny., *Sejarah Perjuangan Rakyat Sawahlunto: Dari Penjajahan ke Revolusi Kemerdekaan*. (Sawahlunto: DHC Angkatan 45 Kotamadya Sawahlunto dibantu Pemda Kotamadya Sawahlunto, Nopember 1998), hlm 2-3.

daerah Sumatera Barat mulai dilakukan, maka tahun 1929 administratif Sawah Lunto menjadi bagian dari *Afdeeling* Solok yang meliputi *Onderafdeeling* Solok, Sawah Lunto, Alahan Panjang dan Muara Labuh. Batas dari wilayah *Gemeente Sawahlunto* diperjelas dengan dikeluarkannya *Staatsblad van Nederlandsche Indie No. 400*,<sup>6</sup> dan aturan ini berlaku hingga berakhirnya kekuasaan Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada awal tahun 1942.

### 2.1.2 Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Sawah Lunto

Sumatera Barat pada abad ke-19 menjadi sangat penting bagi pemerintahan kolonial Belanda terutama karena potensi ekonomi yang terdapat di daerah ini. Potensi tersebut tersebar pada daerah-daerah Payakumbuh, Agam, Solok dan Sawah Lunto. Pertengahan abad ke-19 Sawah Lunto merupakan sebuah desa kecil yang terpencil dan terletak ditengah-tengah hutan belantara yang luas. Wilayahnya dikelilingi oleh bukit-bukit dan lembah yang terbentang seperti wajan penggorengan. Bukitnya kering dan tandus, sebagian penduduknya memanfaatkan lahan pertanian yang sangat terbatas untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan adakalanya tanaman padi ladang. Selain itu penduduk di daerah ini mengusahakan kegiatan kerajinan tangan atau industri rumah tangga secara kecil-kecilan. Di tanah yang datar di dasar lembah dibangunlah rumah-rumah, kantor, sekolah, pasar dan bangunan lainnya yang berdempetan satu sama lain bahkan mencapai kaki bukit.

Secara umum penduduk pedesaan Minangkabau bermata pencaharian pokok sebagai petani di sawah yang dibuat di kaki bukit, pinggang bukit, maupun di pinggir lembah. Sawah tersebut tidak hanya dikerjakan oleh petani pemilik tanah, tetapi juga dikerjakan oleh petani penggarap yakni penduduk yang berasal dari daerah lain dengan status sebagai buruh tani. Selain sektor pertanian, usaha lain yang dimasuki oleh masyarakat Minangkabau adalah sebagai pengrajin tenun, besi, nelayan, dan pedagang. Untuk melakukan hubungan atau kegiatan ekonomi dari dan ke daerah lain, masyarakat Minangkabau umumnya menggunakan alat transportasi sederhana berupa kuda beban, pedati atau alat transportasi yang menggunakan kerbau dan sapi sebagai alat penariknya. Tetapi ada pula

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 4.

masyarakat yang menempuh perjalanan sehari-hari dengan berjalan kaki melewati hutan belantara dan jalan-jalan setapak untuk mencapai suatu daerah yang dijadikan tempat atau tujuan perdagangan. Untuk lalu lintas perdagangan besar, masyarakat Minangkabau memanfaatkan jalan dari daerah pedalaman ke pantai barat dan pantai timur Sumatra. Komoditi yang diperdagangkan umumnya adalah hasil bumi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, kayu manis, gambir, tembakau dan kopra dan hasil kerajinan tangan penduduk setempat.

Pada saat kedatangan Belanda abad ke-19, pemerintah Belanda melakukan modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakannya<sup>7</sup> di ranah Minang. Salah satu di antaranya adalah dikenalkannya di daerah ini sistem perkebunan dan buruh perkebunan. Sejak dibukanya usaha perkebunan rakyat di beberapa wilayah di Sumatera Barat, banyak penduduk Minangkabau yang bekerja sebagai buruh di perkebunan.<sup>8</sup> Sama halnya ketika cadangan batubara ditemukan oleh beberapa ahli geologi Belanda di sepanjang sungai Ombilin, kehidupan masyarakat Sawah Lunto pun mengalami perubahan ke arah yang makin kompleks. Pejabat dari berbagai institusi Pemerintah Kolonial datang berkunjung ke daerah Sawah Lunto untuk membahas pembangunan sarana dan prasarana yang harus di bangun guna pengoperasian tambang.

Pembangunan tersebut mencakup bangunan-bangunan pemerintah, sarana transportasi jalan dan kereta api, kompleks perumahan, pasar, sekolah, gereja, mesjid, rumah bola, kolam renang, lapangan sepak bola dan bioskop. Pembangunan ini mengubah wajah kota Sawah Lunto, menjadi kota pertambangan kolonial yang terdiri dari berbagai lapisan sosial masyarakat. Dalam pembangunan sarana transportasi menuju tambang, Pemerintah membuka jalan dengan membangun jalur kereta api. Untuk menuju lokasi tambang batubara

---

<sup>7</sup>Modernisasi Minangkabau oleh pemerintah Belanda adalah sistem kenagarian. Dalam masyarakat Minangkabau, struktur sosialnya terdiri dari unit terkecil berupa suku, dan setiap suku mendiami daerah yang sama dan dipimpin oleh seorang kepala nagari atau penghulu, dan masing-masing nagari memiliki kebijakan tersendiri. Namun setelah kedatangan Belanda sistem itu diubah, menjadi karesidenan sesuai dengan yang diterapkan pemerintah Belanda di daerah Jawa.

<sup>8</sup> Melalui sistem tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda mengintensifkan sistem ladang kopi yang telah dikenal petani sebelumnya. Sistem kerja yang dijalankan dinamakan 'rodi kopi', dan buruh bekerja tanpa bayaran serta biaya makan pun ditanggung sendiri oleh buruh. Selama berlangsungnya sistem tanam paksa ini terjadi berbagai kerugian bagi masyarakat pedesaan. Lengkapnya lihat Mestika Zed, "Melayu Kopi Daun: Eksploitasi dalam Sistem Tanam Paksa di Minangkabau Sumatera Barat". Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1983.

Ombilin Pemerintah membangun rel sepanjang 4 km, yang dimulai dari halte Muaro Kalaban berbelok ke arah utara melalui sebuah terowongan dan jembatan yang melintasi Sungai Lunto sepanjang 30 meter, dan jalur ini pun baru resmi digunakan pada tanggal 1 Januari 1894.<sup>9</sup>

Setelah dibukanya tambang batubara Ombilin Sawah Lunto oleh pemerintah Belanda, sebagian penduduk beralih menjadi buruh tambang. Bekerja sebagai buruh dipertambangan adalah satu jenis pekerjaan baru yang dikenal masyarakat setempat. Rata-rata masyarakat Sawah Lunto mengandalkan kehidupannya dari hasil pertanian dan penjualan hasil tenun, sehingga bagi penduduk sekitar bekerja sebagai buruh tambang adalah suatu pekerjaan yang dianggap rendah/hina terutama jika dilihat dari adat serta sosial budaya daerah Minang yang sangat mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau seperti terlihat dari ikatan kesukuannya di daerah Sawah Lunto, membuat masyarakat Sawah Lunto enggan bekerja dipertambangan.<sup>10</sup>

Akan tetapi ketentuan adat tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Minang yang berasal dari daerah yang jauh dari Sawah Lunto, seperti dari nagari Taram, Piladang-Luhak Lima Puluh Koto, nagari Koto Tuo, Situmbuk, Supayang, dan Supatai-Luhak Tanah Data.<sup>11</sup> Umumnya mereka berasal dari daerah miskin yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai buruh tani pada sawah milik orang lain yang letaknya jauh dari daerah tempat mereka bermukim<sup>12</sup> dan bekerja di tambang lebih kepada alasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Buruh Minang yang bekerja di tambang tersebut tidak bekerja

<sup>9</sup>D.G. Stibbe, "Staatspoorweg Ter Sumatra's Westkust" dalam *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, Tweede Druck, Vierde Deel, Soemb-Z, S'gravenhage. (Leiden: Martinus Nijhoff-E.J.Brill), hlm 74.

<sup>10</sup> Jika ada salah satu dari anggota sukunya yang memilih kerja dipertambangan, maka ia akan dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari dan tidak dilibatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan hal tersebut berdampak buruk pada nama baik sukunya secara keseluruhan, sehingga akhirnya masyarakat yang hidup di sekitar tambang enggan/kurang tertarik dengan kehidupan di pertambangan.

<sup>11</sup>*Verslag der Exploitatir van den Staatspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1905*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1906), hlm 18.

<sup>12</sup> Penduduk Minang tidak semuanya memiliki sawah, sebagian dari mereka hanya bekerja sebagai buruh yang menggarap sawah milik petani lain dengan sistem pembayaran upah berupa pembagian hasil padi setelah masa panen. Penduduk ini tergolong miskin karena penghasilan mereka semata-mata hanya diperoleh dari bekerja dari menggarap sawah milik orang lain, dan selama masa sebelum panen, untuk pemenuhan kebutuhan keluarga mereka mengandalkan hasil tani dari kebun-kebun kecil yang ada disekitar tempat tinggal mereka.



sebagai buruh kasar atau bekerja di tambang dalam, karena kebanyakan dari fisik mereka tidak memenuhi kriteria sebagai buruh yang bekerja untuk tambang dalam, sehingga mereka hanya bekerja sebagai pembantu montir, tukang kayu, dan tukang batu. Adapun mereka yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi buruh tambang dalam, mereka pun tidak mau terikat dengan kontrak yang lama seperti buruh-buruh lainnya. Umumnya buruh Minang memilih bekerja dipertambangan dengan sistem upah harian atau mingguan, dan pada saat-saat tertentu ketika perusahaan membutuhkan tenaga mereka.

Pada tahun 1903 ketika daerah Sawah Lunto makin terbuka oleh pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kolonial, penduduk Minang yang berada jauh dari daerah Sawah Lunto pun mulai berdatangan. Mereka mulai bergabung dengan tambang batubara Ombilin sebagai buruh kontrak dan buruh bebas. Puncaknya terjadi pada tahun 1935, sekitar 3.800 orang penduduk Minangkabau bekerja pada sektor pertambangan, dengan 30 orang bekerja pada tambang bawah tanah. Selain karena desakan kebutuhan hidup, tawaran gaji yang diberikan perusahaan pun membuat mereka memilih bekerja di tambang.<sup>13</sup> Di samping itu, meskipun mereka bekerja di pertambangan mereka masih bisa menggarap tanah/sawah dan ladang ketika mereka tidak bekerja di pertambangan, sehingga mereka tidak selamanya bekerja untuk tambang.

Kedatangan Belanda juga membawa perubahan pada komposisi penduduk yang bermukim di Sumatra Barat. Sejumlah pendatang baru bermukim di Sawah Lunto, baik yang didatangkan langsung oleh Pemerintah Kolonial ke Sawah Lunto untuk kebutuhan tenaga kerja di pertambangan seperti orang-orang Eropa yang dipekerjakan sebagai pengawas, dan tenaga ahli.<sup>14</sup> Ada juga orang-orang Jawa, Batak, Bugis, Madura, yang didatangkan untuk menjadi buruh kasar guna membangun jalur kereta api dan tambang batubara Ombilin. Namun demikian ada pula pendatang yang sengaja datang ke daerah Sawah Lunto untuk mencari

---

<sup>13</sup> Pada tahun 1905, upah yang didapat buruh paksa hanya 18 sen/bulan, buruh kontrak mendapat upah 30 sen/bulan, dan buruh bebas mendapat upah 60 sen/bulan, tetapi pada tahun 1930an, upah mereka naik menjadi 25 sen/bulan untuk buruh paksa, 50 sen/bulan untuk buruh kontrak dan 70 sen/bulan untuk buruh bebas.

<sup>14</sup> Struktur dan personal pegawai Eropa pada Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto (Lampiran 7)

penghidupan baru, seperti sebagian orang Cina, Arab, Aceh, yang datang untuk berdagang, dan menetap dalam jangka waktu tertentu sehingga penduduk Minang pun mulai bersentuhan dengan etnik dan bangsa lain. Ketika diadakan sensus pada tahun 1852, jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 695.917 jiwa, dengan jumlah penduduk pribumi 689.582 jiwa<sup>15</sup> dan yang mendiami wilayah XIII dan IX Koto<sup>16</sup> termasuk daerah Sawah Lunto mencapai 70.980 jiwa.<sup>17</sup>

Meningkatnya jumlah penduduk yang mendiami daerah Sumatera Barat didukung oleh berbagai faktor, antara lain gencarnya aktivitas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah, terjadinya peningkatan kesejahteraan perekonomian dengan penerapan sistem kerja berdasarkan kontrak dan pemakaian ekonomi uang dan perubahan administrasi Pemerintah.<sup>18</sup> Daerah yang mengalami lonjakan penduduk umumnya terkonsentrasi pada daerah-daerah perkebunan dan pertambangan seperti halnya Sawah Lunto.<sup>19</sup>

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk asing di daerah Sumatra Barat pun mengalami peningkatan. Berdasarkan sensus tahun 1852 jumlah penduduk asing mencapai 3.870 jiwa, dan meningkat menjadi 6.839 jiwa di tahun 1880, bahkan tahun 1930 mencapai 22.432 jiwa.<sup>20</sup> Hal ini terjadi karena pasang surut proses migrasi orang asing ke wilayah Sumatera Barat oleh pemerintah Belanda untuk kepentingan militer, tenaga kerja untuk mengisi jabatan-jabatan dalam struktur birokrasi pemerintah, dan menjadi tenaga kerja yang ditempatkan pada perusahaan pemerintah yang ada di daerah Sumatra Barat termasuk dalam perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto.

<sup>15</sup>Dari jumlah 695.917 jiwa yang mendiami wilayah rantau adalah 170.777 jiwa dan 525.140 lainnya mendiami wilayah darek. Abrar "Angkutan Kereta Api dan Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat 1887-1940". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2001, hlm 22.

<sup>16</sup>*Afdeeling* XIII dan IX Koto adalah nama untuk daerah Solok dan Sawah Lunto merupakan bagian dari *onderafdeeling* Solok.

<sup>17</sup>Berdasarkan pada perkembangan penduduk tahun 1875, dalam *Arsip Sumatra Weskust* No. 128.23, 129.6, *Kolonial Verslag* 1907 lampiran A, *Volkstelling* 1930. (Batavia: Departemen van Economische Zaken, 1935) tabel II, hlm 8-11.

<sup>18</sup>Perubahan administrasi pemerintah seperti penggabungan suatu wilayah ke wilayah lainnya oleh pemerintah Belanda menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami suatu daerah di Sumatra Barat. Penggabungan itu antara lain, *afdeeling* Pariaman bergabung ke *afdeeling* Padang dan menjadi satu dengan *afdeeling* Padang. *Afdeeling* Painan bertambah wilayahnya dengan Kerinci, Agam menerima *onderafdeeling* baru dari Air Bangis dan Rao. Tanah Datar disamping berkurang wilayahnya karena keluarnya Sawahlunto ke Solok, juga mendapat daerah baru yaitu *afdeeling* Batipuh dan X Koto.

<sup>19</sup>Perkembangan Jumlah Penduduk Pribumi Sumatera Barat Menurut *Afdeeling* (Lampiran 8)

<sup>20</sup>Pertumbuhan Jumlah Penduduk Asing Sumatera Barat Berdasarkan Sensus (Lampiran 9)

## 2.2 Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto

### 2.2.1 Penemuan “Emas Hitam” di Sawah Lunto

Setelah adanya revolusi industri batubara bukan hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga diproduksi dalam skala besar untuk kebutuhan kapal perang dan industri di dunia internasional. Penggunaan batubara untuk industri ini mendorong terjadinya usaha dari berbagai negara di Eropa untuk mengeksplorasi ladang batubara dan tambang batubara di daerah-daerah yang diyakini memiliki sumber tersebut yang letaknya jauh dari benua Eropa. Selain itu, dengan ditemukannya teknologi baru seperti mesin uap mendorong beberapa negara di dunia untuk mencari sumber daya batubara ke berbagai belahan dunia, sehingga dua hal ini membawa pengaruh bagi aspek kehidupan ekonomi, dan sosial politik dunia, termasuk Belanda.

Untuk meningkatkan sumber pendapatan negara induk, Pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai usaha, yaitu menjalankan ekspedisi-ekspedisi ke wilayah koloni yang diyakini memiliki sumber daya potensial. Pada tahun 1858 bangsa Belanda meyakini akan adanya endapan batubara di daerah Ombilin dan menugaskan seorang ahli tambang bernama Ir. C. De Groot untuk meneliti daerah-daerah yang mengandung batubara tersebut. Kemudian pada tahun 1867 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 26 Mei 1867 ditugaskan Ir. W. H. de Greve untuk menyelidiki lebih lanjut dan secara pasti ditemukannya lapisan batubara pada tahun 1868 di daerah Ulu Air, tepi sungai Ombilin Sawah Lunto.<sup>21</sup>

Pada penelitian selanjutnya, batubara juga ditemukan di berbagai tempat di daerah Ombilin diperkirakan dapat ditambang selama lebih kurang 200 tahun.<sup>22</sup> Sumber batubara yang ada tersebut tersebar di sepanjang Batang Ombilin dan daerah di sekitarnya seperti Bukit Siguntang, Lurah Gadang, Sugar, Sungai Durian, Parambahan dan Sawah Lunto.<sup>23</sup> R.D.M. Verbeek, seorang ahli geologi

<sup>21</sup>Adeng Sunardi, *100 Tahun Tambang Batubara Ombilin 1891-1991*. (Sawahlunto: tanpa penerbit, 1991), hlm 3.

<sup>22</sup>W.H. de Greve, “ De Arbeid bij de Mijnbouwkundige Geognostische Opening van Sumatra’s Weskust dalam *Tijdschrift voor Nederlands Indie*, 1873 Bg. I. (Batavia: Groningen, 1874), hlm 361-371, dikutip dari Zaiyardam Zubir. “Kehidupan Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat 1891-1927”. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1995), hlm 82

<sup>23</sup>Peta Daerah Penemuan Batubara di Sawah Lunto (Lampiran 2)

Belanda yang juga berperan dalam penyelidikan batubara Ombilin melaporkan secara kasar cadangan batubara yang terkandung di tanah Sawah Lunto tersebut berjumlah lebih kurang 197 juta ton.<sup>24</sup>

Kandungan batubara yang terdapat di Sawah Lunto terbagi atas beberapa lapisan dan setiap lapisan memiliki perbedaan kedalaman serta kualitas yang berbeda pula. Ada batubara yang terdapat dipermukaan tanah yang dapat dilihat dengan kasat mata dan ada pula batubara yang membentuk perbukitan yang seluruhnya mengandung batubara. Para geolog membedakan lapisan tersebut dalam tiga bagian, yaitu lapisan A, lapisan B, dan lapisan C. Lapisan A terletak dipermukaan tanah yang berada pada kedalaman 0,80 meter, lapisan B terletak dari kedalaman 0,80 meter sampai 8 meter dari permukaan tanah dan lapisan C terletak pada kedalaman lebih dari delapan meter.<sup>25</sup>

Untuk menjelaskan kondisi topografi daerah pertambangan Ombilin, perlu diamati daerah di sekitarnya seperti Parambahan, Sungai Durian, Sigalut yang juga menyimpan cadangan batubara. Daerah ini mengelilingi daerah Sawah Lunto, sehingga Sawah Lunto menjadi pusat dari daerah yang mengandung sumber batubara.<sup>26</sup> Masing-masing daerah memiliki simpanan batubara pada lapisan yang berbeda-beda dan kualitas yang berbeda pula. Letak batubara yang tidak beraturan dan berada pada lapisan yang tidak beraturan membuat proses penambangan pun harus dibeda-bedakan. Selain itu, dalam laporan penelitian P. van Diest yang diperolehnya dari penelitian awal Greeve bahwa ketidakberaturan letak batubara di daerah Ombilin tersebut juga semakin diperumit oleh lapisan batuan lainnya yang juga melapisi permukaan batubara tersebut, sehingga di

<sup>24</sup>R.D.M. Verbeek, "Sumatra's Weskust, Verslag No. 3, Het Ombilin Kolenveld in de Padangsche Bovenlanden", dalam *Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indie*. (Amsterdam: C.F. Stemler, 1875), hlm 82, dikutip dari Zaiyardam Zubir, *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai: Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin oleh Kolonial Belanda 1891-1927*. (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm 113.

<sup>25</sup>Ditinjau dari kualitasnya, lapisan C adalah yang paling bagus karena terletak pada lapisan paling bawah dan terdalam, sedangkan untuk lapisan A umumnya terletak di permukaan tanah, dan lapisan B diantara keduanya, lihat W. Hollemen, "Beschrijving van de Afbouwmethode voor Ontginning der 8 Meter Dikke C-Laag der Ombilin steenkolenmijnen", dalam *De Mijningenier*, Bandung, 1931, hlm 25-30.

<sup>26</sup>Parambahan terletak 10 km dari Sawah Lunto, Sungai Durian terletak 7 km dari Sawah Lunto, dan Sigalut terletak 2 km dari Sawah Lunto. Dari kondisi geografis ini terlihat bahwa daerah Sawah Lunto menjadi titik sentral dari sumber barubara itu. Lihat Andi Asoka, dkk, *op. cit.*, hlm 5.

antara lapisan ke lapisan itu diselengi oleh bebatuan dan jenis tanah lainnya yang membuat penambangan menjadi rumit.<sup>27</sup>

Ditinjau dari segi kualitas, berdasarkan laporan, P. van Diest mengatakan bahwa tidak disangsikan lagi batubara Ombilin memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga jika ditambang, batubara ini dapat dipasarkan di pasar internasional dengan harga yang tinggi. Atas pertimbangan tersebut maka Pemerintah menginginkan agar usaha ini dikerjakan oleh pihak swasta. Pada tahun 1883 untuk pertama kalinya Pemerintah melakukan penawaran terbuka kepada pengusaha swasta Belanda untuk menanamkan modalnya pada pertambangan batubara di Ombilin SawahLunto. Penawaran yang dilakukan pemerintah ini meliputi pembangunan wilayah penambangan seluas 70 hektar di daerah Sungai Durian. Karena besarnya modal yang harus ditanamkan pihak swasta, akhirnya mereka mengundurkan diri.

Pada tahun 1886, Pemerintah kembali mengadakan penawaran pada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di tambang batubara Ombilin. Penawaran kali ini bukan hanya untuk pengelolaan tambang batubara Ombilin tetapi juga untuk pembangunan sarana transportasi berupa pembangunan jalan kereta api. Namun karena besarnya modal awal yang harus ditanamkan<sup>28</sup> dan belum pastinya keuntungan yang didapat oleh pihak swasta, akhirnya mereka mundur dan menyerahkan pengelolaan tambang sepenuhnya kepada Pemerintah. Setelah melewati proses yang berliku, akhirnya pada tahun 1891,<sup>29</sup> Pemerintah menanamkan modalnya secara langsung pada tambang batubara Ombilin untuk mendirikan perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto.

---

<sup>27</sup>Diest merumuskan lapisan batuan dan letak kedalaman batubara Ombilin, yaitu lebih kurang 50 meter berselang-seling dari batu pasir, *koollei* dan batuan tanah liat, 0,77 meter batubara, 5,37 meter *koollei*, 1,06 meter batubara, 50 meter lapisan selang-seling batu dan pasir, 1,96 batubara, 15 meter selang-seling batu pasir dan 2,38 meter batubara.

<sup>28</sup>Pada tahun 1883 pemerintah mengajukan syarat untuk pengelolaan tambang batubara agar berada di satu tangan, selengkapnya lihat Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang*. (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981), hlm 311

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm 312.

## 2.2.2 *De Ombilin Steenkolenmijnen*

### a. Awal Beroperasinya Tambang

Pada tahun 1891 pemerintah Hindia Belanda menunjuk Ir. J.A. Hooze melaksanakan persiapan kebutuhan penggalian batubara.<sup>30</sup> Akan tetapi yang diangkat sebagai pimpinan pertama di tambang batubara adalah Ir. W. Godefroy. Ia memimpin tambang selama satu tahun hingga tahun 1892. Di tahun 1892, di bawah pimpinan Ir. J.W. IJzerman barulah tambang batubara mulai beroperasi dan berproduksi. Untuk melakukan penambangan batubara Ombilin, dibutuhkan kekuatan hukum berupa Undang-undang, sehingga dibuatlah rancangan Undang-undang oleh Dewan Penasehat Negara pada tanggal 24 November 1891 untuk penambangan batubara Ombilin. Pada tanggal 4 Januari 1892 diterbitkan pada Lembaran Negara No. 2 yang isinya tentang kenaikan anggaran belanja Pemerintah Hindia Belanda untuk tahun 1892 dalam rangka eksploitasi Tambang Batubara Ombilin oleh pemerintah Belanda.

Dalam hal pengelolaan tambang batubara Ombilin, pemerintah kolonial Belanda bukan saja mengupayakan untuk pengelolaan tambang batubara, tetapi juga membangun sarana dan prasarana pendukung lainnya yang akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga untuk meningkatkan peranan tambang batubara dalam membantu sumber pendapatan Pemerintah Hindia Belanda maka tanggal 3 Juli 1918 di keluarkan Surat Keputusan No. 64 dan diterbitkan pada Lembaran Negara No. 375, yang mengukuhkan bahwa usaha pertambangan menjadi perusahaan tambang batubara Ombilin (*De Ombilin Steenkolenmijnen*) dan pengelolaannya berada di bawah Departemen usaha-usaha Pemerintah hingga tahun 1942.<sup>31</sup>

Dalam proses pembukaan tambang batubara Ombilin, Pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan dana dan transportasi, sehingga hal tersebut membuat proses penambangan terlambat dikerjakan. Selain itu, Pemerintah harus berhadapan dengan hukum adat masyarakat yang berlaku di daerah setempat. Pemerintah harus menemui penghulu di masing-masing daerah yang akan

<sup>30</sup>Ir. J.A. Hooze merupakan seorang insinyur pertambangan dan telah memiliki pengalaman di pertambangan Kalimantan. Ia diharapkan bisa mempermudah proses awal penambangan dan memberikan keuntungan bagi kas Negara.

<sup>31</sup>Adeng, *op. cit.*, hlm 5.

dijadikan pusat penambangan batubara untuk pembebasan tanah tambang batubara Ombilin menjadi milik Pemerintah kolonial. Dalam pelaksanaannya pada tahap awal penambangan batubara Ombilin Pemerintah harus melewati tahap pembebasan tanah dari kaum adat setempat dan konsesi penambangan dengan pemerintah kolonial Belanda sendiri di Negara induk.

Pada kenyataannya dalam penyelesaian hak tanah dengan penduduk setempat yang berkaitan dengan hukum pribumi, Pemerintah tidak menemui kendala yang berarti karena pada umumnya tanah yang akan dikelola oleh Pemerintah kolonial tersebut adalah tanah yang selama ini tidak dimanfaatkan sama sekali oleh penduduk sekitar. Area tersebut tidak dapat ditanami, sehingga penduduk menyerahkan dan melepaskan hak tanah tersebut kepada Pemerintah Belanda untuk ditambang.<sup>32</sup> Akan tetapi, untuk tanah-tanah penduduk yang harus diselesaikan dengan ganti rugi, Pemerintah kolonial Belanda berhadapan dengan penghulu adat yang menjadi wakil elit tradisional masyarakat Minangkabau. Dalam hal penguasaan tanah dan permasalahannya, penghulu memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan untuk menetapkan hak guna tanah yang akan dijadikan areal pertambangan oleh pemerintah Belanda. Setelah melakukan musyawarah dengan kaumnya, barulah penghulu menemui Pemerintah Kolonial serta mengajukan syarat-syarat tertentu sebagai ketentuan dalam hal ganti rugi tanah penduduk.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemikiran pemerintah kolonial Belanda, tanah yang tidak digarap oleh penduduk adalah tanah lepas. Artinya, tanah lepas adalah tanah milik Pemerintah, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kolonial berhak mengelola tanah tersebut. Untuk tanah persawahan masyarakat setempat, Pemerintah melakukan ganti rugi dengan sistem pembayaran pada satu kampung secara keseluruhan, bukan perorangan. Dalam proses ini terdapat perbedaan pendapat

---

<sup>32</sup>Walaupun tanah yang akan dijadikan tambang adalah tanah yang tidak digarap oleh penduduk setempat, berdasarkan hukum adat Minangkabau tanah tambang batubara Ombilin tersebut termasuk ke dalam kategori tanah pusaka tinggi. Lihat A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), hlm 152.

<sup>33</sup> Dalam pemanfaatan tanah secara hukum adat Minangkabau ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak guna tanah, di antaranya apabila tanah digarap oleh orang luar (termasuk Pemerintah Kolonial) haruslah terlebih dahulu membayar bea dalam jangka waktu tertentu, tidak dibenarkan memindahtangankan hak atas pengelolaan tanah tersebut, dan jika waktu izin pemakaian tanah telah berakhir si pemegang izin harus mengembalikan hak tanah tersebut kepada penghulu adat. *Ibid.*, hlm 153.

antara penduduk setempat dengan pihak pemerintah Belanda, Pemerintah menawarkan penggantian akan dibayarkan secara tahunan, tetapi penduduk setempat tidak setuju karena tanah yang akan dijadikan tambang tersebut umumnya adalah tanah ulayat,<sup>34</sup> sedangkan bagi Pemerintah Kolonial tanah tersebut hanya diakui sebagai hak guna. Hal inilah pada akhirnya yang membuat Pemerintah Kolonial enggan melanjutkan proses penggantian hak atas tanah tambang batubara Ombilin, sehingga secara sengaja Pemerintah mengabaikan hukum adat Minangkabau dengan tidak membayar ganti rugi atas tanah tambang.<sup>35</sup>

Dalam perusahaan tambang batubara Ombilin, ada banyak lembaga yang terlibat. Pada masa dimulainya eksploitasi tahun 1892, pemerintah memutuskan untuk memberikan tanggung jawab kepada Kepala Perkereta-Apian Sumatera Barat untuk mengurus proses pengangkutan dan pemasaran batubara. Pada awalnya lembaga ini berkedudukan di Bukittinggi, namun pada tahun 1907 dipindahkan ke Padang. Pada tahun 1917, kedua perusahaan ini, yaitu Perkereta-apian Sumatera dan tambang batubara Ombilin, dipisahkan. Perusahaan tambang batubara Ombilin berada di bawah supervisi Dinas Pertambangan. Pada saat setelah beroperasinya tambang maka pihak yang bertanggung jawab adalah Direktur Pengajaran, Agama dan Kerajinan (*Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid*). Kemudian tugas ini dialihkan kembali kepada Departemen Perusahaan-perusahaan Pemerintah (*Departement Gouvernements Bedrijven, DGB*) untuk jangka waktu lima tahun sampai tahun 1922.

Antara tahun 1922 hingga 1942, DGB merupakan bagian dari Direktur Pekerjaan Umum (*Directeur van Begerlijke en Openbare Werken*). Selain lembaga diatas ada dua lembaga yang juga memiliki peran penting dalam perusahaan tambang batubara Ombilin, yaitu Departemen Kehakiman dan

<sup>34</sup>Tanah Ulayat adalah tanah suatu kaum yang terdapat di setiap nagari.

<sup>35</sup> Dikarenakan ketidakpahaman pemerintah kolonial terhadap hukum adat Minangkabau tentang hak guna tanah yang dinilai rumit, pemerintah secara tegas menolak dengan mengeluarkan aturan berdasarkan surat Keputusan Residen Sumatera Barat tahun 1903 yang menegaskan bahwa pemerintah menolak mentah-mentah kemungkinan pembayaran uang adat bagi pertambangan Ombilin di masa akan datang. Secara terpaksa masyarakat setempat pun menerima keputusan tersebut dan kehilangan hak untuk menikmati hasil dari kekayaan alam yang terkandung dalam tanah mereka. Lihat Busra Azheri, "Konflik Penambang Batubara di Sawah Lunto: Dalam Perspektif Budaya Hukum", dalam Alfian Miko (ed.), *Dinamika Kota Tambang Sawah Lunto: Dari Ekonomi Kapitalis ke Ekonomi Rakyat*. Padang: Andalas University Press, 2006.



Departemen Pemerintah Dalam Negeri. Departemen Kehakiman bertanggung jawab atas perekrutan buruh paksa dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan perburuhan dan melakukan inspeksi kondisi kerja perusahaan setiap tahunnya. Lain pula dengan Departemen Pemerintah Dalam Negeri, memiliki tugas untuk mencari kuli-kuli kontrak, menjaga keamanan dan ketentraman perusahaan serta menghukum kuli-kuli yang melakukan pelanggaran.

### **b. Proses Perekrutan Buruh Tambang**

Pada awal beroperasinya tambang tahun 1892, di samping perangkat hukum pemerintah Belanda juga membutuhkan tenaga buruh untuk mengerjakan tambang batubara Ombilin dalam jumlah yang cukup besar. Berbagai upaya dilakukan untuk mendatangkan buruh agar bersedia bekerja di pertambangan batubara Ombilin, diantaranya dengan mempekerjakan tahanan penjara, merekrut buruh kontrak dari berbagai wilayah, dan mempekerjakan penduduk setempat sebagai buruh bebas. Pemerintah Belanda mempekerjakan orang-orang hukuman yang di ambil dari beberapa penjara, seperti dari penjara di Surabaya, penjara Glodok dan Cipinang di Batavia, serta penjara di Minangkabau, seperti dari Bukittinggi, Lubuk Alung, Batu Sangkar dan Padang<sup>36</sup> sebagai buruh paksa. Mereka bukan hanya bekerja sebagai kuli di pertambangan tetapi juga ditugaskan sebagai kuli untuk pembangunan sarana lainnya seperti jalan kereta api dari Padang ke Sawah Lunto dan proyek umum lainnya di wilayah Sumatera Barat.

Proses perekrutan buruh ini berlangsung sejak pertama kali tambang dibuka melalui kerjasama antara pihak pertambangan dengan Departemen Kehakiman (*Departement van Justitie*). Pengerahan tenaga buruh ini berpedoman pada pelaksanaan sistem tenaga kerja paksa (*dwangarbeiders*) dan sistem kerja kontrak (*contractkoelies*). Buruh paksa ini terdiri dari orang-orang Jawa, Bali, Madura, dan Bugis yang melakukan kontrak kerja tidak lebih dari satu tahun. Namun, karena kebutuhan akan tenaga kerja yang makin mendesak maka pemerintah Belanda menugaskan para narapidana tersebut agar bekerja lebih lama sampai lebih dari lima tahun masa kerja. Untuk pengerahan buruh tambang batubara melalui sistem kontrak kerja, Pemerintah melakukannya pada buruh kontrak Cina

<sup>36</sup>Erwiza Erman, et al., *Orang Rantai: Dari Penjara ke Penjara*. (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm 22.

yang di datangkan dari Singapura dan Penang. Buruh kontrak Cina ini hanya dua kali saja direkrut karena banyak dari mereka yang tidak bersedia memperpanjang kontrak kerja seperti yang diinginkan oleh pihak perusahaan.<sup>37</sup>

Selain itu, cara perekrutan tenaga buruh yang lebih sering dilakukan adalah melalui *leukeh* atau buruh yang telah habis masa kontraknya. Mantan buruh ini ditugaskan untuk mencari buruh kontrak baru ke berbagai tempat di negeri asalnya atau meminta bantuan pada kenalan mereka di berbagai tempat di pulau Jawa dan untuk calon buruh ini dibujuk dengan imbalan penghasilan yang besar. Hal lain yang dilakukan Pemerintah dalam mempermudah proses perekrutan adalah dengan cara membentuk suatu ikatan kekeluargaan di antara para pekerja dipertambangan, sehingga untuk masa berikutnya perekrutan akan dilakukan berdasarkan ikatan kekeluargaan.

Buruh lapangan yang bekerja pada tambang batubara Ombilin dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dikarenakan kurangnya kontrol dari pihak keamanan perusahaan, buruh yang tersebar luas di berbagai tempat dan yang tidak tahan dengan kehidupan dipertambangan dapat melarikan diri. Selain itu, akibat Perang Aceh tahun 1898, sekitar 901 pekerja paksa diperbantukan untuk perang dan dididik menjadi tentara serta dijadikan sebagai kuli bantu di Pidie untuk mengangkut barang-barang yang diperlukan untuk melangsungkan perang.<sup>38</sup> Akhirnya untuk menggantikan pekerja tersebut perusahaan mempekerjakan penduduk setempat menjadi buruh tambang. Orang-orang Minangkabau dan penduduk Nias dipekerjakan sebagai buruh lepas atau buruh bebas, dan dalam tambang Ombilin mereka hanya mengerjakan pekerjaan yang tidak berhubungan secara langsung dengan produksi, mereka hanya bekerja sebagai tukang kayu, bagian pengangkutan dan pembantu montir.

Hal ini terjadi karena bekerja sebagai buruh oleh masyarakat Minangkabau dianggap pekerjaan hina dan tidak sesuai dengan adat sosial masyarakat Minangkabau, sehingga penduduk setempat pun enggan bekerja ditambang batubara Ombilin. Adapun mereka yang pada akhirnya bersedia bekerja dipertambangan karena desakan ekonomi keluarga dan merekapun berasal dari daerah yang jauh dari kontrol adat suku mereka. Di samping itu, mereka yang

---

<sup>37</sup>*Besluit Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid* No. 31, 20 Juni 1901.

<sup>38</sup>Erwiza. *op. cit.*, hlm 77.

bekerja di tambang batubara umumnya bekerja dalam jangka waktu singkat sekitar dua/tiga minggu, atau satu tahun sehingga mereka tidak dapat diandalkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi di pertambangan batubara Ombilin Sawah Lunto.

Untuk memecahkan permasalahan tenaga kerja di pertambangan, pada tahun 1901 pimpinan perusahaan mulai melakukan pencarian buruh ke pulau Jawa. Perusahaan mendatangkan pekerja tambang yang di kontrak melalui kantor pengerahan tenaga kerja di Semarang, *Algemeen Delisch Emigratie Kantoer* (ADEK).<sup>39</sup> Dalam pengerahan ini adanya aturan buruh kontrak yang tergantung pada Sanksi Hukum yakni suatu ketentuan hukuman yang dikenakan kepada para kuli yang tidak mematuhi peraturan perburuhan yang tercantum dalam Ordonansi Kuli.<sup>40</sup> Hingga tahun 1920-an, buruh paksa dan buruh kontrak mendominasi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di tambang batubara Ombilin Sawah Lunto dan menjadi buruh yang diandalkan oleh perusahaan.

## 2.3 Kehidupan Buruh Tambang Batubara Ombilin

### 2.3.1 Klasifikasi Buruh dan Pembagian Kerja

Sebagai sebuah perusahaan Pemerintah yang bergerak dalam industri tambang batubara, untuk mempermudah manajemen perusahaan maka pimpinan melakukan pengelompokan atau klasifikasi tenaga kerja dan pembagian kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Setiap klasifikasi ini memberi gambaran bagaimana kondisi internal kehidupan buruh dan kedudukannya dalam perusahaan. Dalam perusahaan tambang batubara Ombilin dikenal adanya buruh dan pegawai, antara kedua kelompok ini juga memiliki pembagian masing-masing yang lebih kecil. Untuk kelompok buruh, klasifikasi buruh tambang dapat dibagi menjadi dua yakni berdasarkan etnik dan berdasarkan sistem kontrak kerja. Etnik

<sup>39</sup>Pada tahun 1916 *Directeur van Justitie* mengusulkan agar perekrutan kuli kontrak Jawa dikoordinasi oleh satu organisasi perekrutan. Di akhir tahun 1916 terwujudlah sebuah organisasi perekrutan dengan nama *Algemeen Delisch Emigratie Kantoer* (ADEK). Fungsi ADEK adalah mengkoordinasi perekrutan kuli kontrak dari Jawa untuk organisasi perusahaan perkebunan tembakau, terutama bagi organisasi perkebunan karet, lihat Razif, *Tahap-tahap Perekrutan dan Penguasaan Kuli Kontrak di Perkebunan Karet di Sumatera Timur (1904-1920)*. (Depok: FIB UI, 1988), hlm 72-74.

<sup>40</sup>Aturan ini pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada bulan Juli 1880 dengan nama resmi "Koelie-Ordonnantie". Lengkapnya lihat Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe: Dengan Derita dan Kemarahannya*. (Medan: Percetakan Waspada, 1977), hlm 64-65.

yang bekerja di tambang batubara Ombilin terdiri dari bangsa Eropa, Indo, Cina dan pribumi. Kalangan Eropa merupakan bangsa Belanda, dan etnik pribumi dibagi lagi menjadi penduduk Minangkabau dan yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Jawa, Bali dan Makassar.

Untuk klasifikasi buruh berdasarkan sistem kontrak kerja dibedakan menjadi dua yaitu buruh tetap dan buruh tambang. Buruh tetap adalah pegawai perusahaan yang menempati posisi mulai dari pimpinan perusahaan hingga mandor lapangan, sedangkan buruh tambang digolongkan dalam tiga bagian yakni buruh paksa, buruh kontrak dan buruh bebas.<sup>41</sup> Dalam perusahaan orang Belanda menduduki posisi yang paling strategis, karena mereka adalah pemilik modal dalam perusahaan, dan juga penentu seluruh kebijakan yang akan diterapkan di dalam perusahaan tambang batubara Ombilin. Orang Eropa yang bekerja di perusahaan tambang juga terbagi dalam orang Belanda totok dan Indo. Orang Belanda totok menduduki posisi sebagai pemimpin perusahaan, mekanik, kepala produksi, tenaga administrasi dan bagian kepegawaian. Untuk orang Indo umumnya mereka menduduki posisi yang cukup tinggi dalam perusahaan dibanding buruh biasa, mereka digolongkan dalam kategori pegawai seperti juru tulis dan mandor.

Klasifikasi buruh berdasarkan sistem kontrak kerja yaitu buruh tambang yang dikelompokkan dalam tiga bagian seperti buruh paksa, buruh kontrak dan buruh bebas memiliki ciri masing-masing yang menjadi pembeda di antara masing-masing kelompok ini. Buruh paksa adalah kelompok buruh yang terdiri dari orang-orang hukuman yang pada awalnya dipekerjakan untuk proyek-proyek Pemerintah seperti pembuatan jalan dan jalur kereta api. Buruh-buruh ini diambil dari penjara-penjara yang tersebar dari berbagai wilayah di Sumatera Barat, bahkan mereka juga didatangkan dari berbagai penjara di pulau Jawa. Karena kapasitas penjara di pulau Jawa yang sudah melebihi kapasitas, maka mereka dikirim untuk dipekerjakan diproyek Pemerintah termasuk di tambang batubara Ombilin. Buruh paksa pun dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tawanan politik dan kriminal biasa. Tawanan politik merupakan orang-orang yang melawan pemerintah kolonial Belanda dan dianggap berbahaya, sedangkan kriminal biasa

---

<sup>41</sup> Zaiyardam. *op. cit.*, hlm 158.

adalah orang yang mendapat hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri.

Buruh kontrak adalah buruh yang didatangkan dari luar daerah Minangkabau, dan umumnya mereka didatangkan dari pulau Jawa bahkan ada buruh Cina yang didatangkan dari Penang dan Singapura. Namun, buruh yang paling banyak bekerja di tambang batubara Ombilin adalah buruh yang didatangkan dari Jawa. Pada awalnya buruh ini diikat oleh kontrak kerja selama dua sampai tiga tahun kerja, dan setelah masa kontrak habis mereka diperbolehkan memperpanjang kontrak kembali. Akan tetapi dalam kenyataannya, mereka umumnya bekerja sampai bertahun-tahun sampai menjadi buruh ke anak-cucu.

Buruh bebas adalah orang-orang yang bekerja diperusahaan tambang tanpa adanya kontrak kerja. Mereka dengan leluasa dapat keluar masuk perusahaan sesuai keinginan mereka, dan umumnya mereka adalah penduduk asli Minangkabau. Dalam perekrutan buruh bebas, perusahaan merasa sangat diuntungkan karena mereka tidak mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan buruh untuk bekerja di pertambangan, sehingga dengan terbuka perusahaan menerima penduduk yang ingin bekerja di pertambangan.

Para buruh tambang atau kuli bekerja berkelompok-kelompok sesuai dengan kategori mereka masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari lima belas orang yang dipimpin oleh seorang mandor. Para kuli dibagi-bagi diantaranya ada yang bekerja memecah batubara yang masih berbentuk bukit-bukit batubara, ada yang mengangkut keluar masuk lobang berupa bongkahan-bongkahan batubara dengan memikul dipundak mereka, dan ada pula yang menaikkan batubara ke atas galeri utama dengan mendorong gerobak yang berisi batubara dengan berat mencapai 700 kg.<sup>42</sup>

Kuli yang bekerja berkelompok dibagi dalam beberapa regu sesuai dengan jam kerjanya. Regu pertama bekerja dari pukul 6 pagi sampai pukul dua siang, regu kedua bekerja dari pukul 2 siang hingga pukul 10 malam, dan regu ketiga bekerja dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi, pembagian jam kerja ini dapat diganti secara bergiliran setiap dua minggu sekali. Setiap regu dipimpin oleh

---

<sup>42</sup> Erwiza. *op. cit.*, hal 83.

seorang mandor junior yang bertanggung jawab kepada mandor senior, dan tanggung jawab terakhir berada di tangan Direktur Insinyur atau Tuan Besar. Pada waktu kuli masuk tambang, satu persatu akan diperiksa oleh mandor, dan diawasi oleh pengawas, untuk memastikan bahwa para kuli tidak membawa benda-benda terlarang seperti rokok dan korek api ke dalam tambang. Hal ini dilakukan karena mengingat kondisi di dalam lobang tambang yang sangat berbahaya. Di dalam tambang banyak sekali kandungan gas metan yang mudah terbakar, sehingga kuli benar-benar harus dijaga dengan ketat agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencelakakan mereka dan menghambat aktivitas penambangan nantinya.

### 2.3.2 Kesejahteraan Buruh

Buruh yang bekerja dipertambangan dibayar sesuai dengan golongan dan tempat kerjanya. Secara umum, mereka digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu golongan pertama adalah Golongan C yang terdiri dari orang-orang Belanda, golongan kedua adalah Golongan B berasal dari orang-orang peranakan Belanda atau Indo, dan golongan ketiga adalah Golongan A yang terbagi atas dua kelompok yaitu golongan A 18 dan Golongan A. Golongan A 18 berasal dari peranakan Belanda dan orang Belanda, sedangkan Golongan A adalah penduduk pribumi yang terdiri dari buruh paksa, buruh kontrak dan buruh bebas.<sup>43</sup>

Golongan C adalah kelompok yang menerima gaji paling besar, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk menekan atau menaikkan gaji buruh. Golongan C merupakan kelompok yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjadi pimpinan dan bertugas mengawasi semua yang terdapat pada perusahaan tambang batubara Ombilin. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas seperti rumah tempat tinggal, fasilitas kesehatan dari rumah sakit yang lebih baik, dan memperoleh gaji paling besar. Untuk golongan B yang merupakan Indo, mereka mendapat perlakuan yang sama seperti halnya Golongan C, tetapi yang membedakan mereka hanya tempat mereka bekerja sama dengan pribumi dan gaji yang diperoleh lebih kecil jika dibandingkan dengan Golongan C. Golongan A dan golongan A 18 juga menerima gaji yang berbeda. Golongan A 18 yang umumnya adalah peranakan Belanda dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari Golongan B mendapat gaji

---

<sup>43</sup>Zaiyardam. *op. cit.*, hlm 168.

di atas Golongan A. untuk golongan A sendiri, gaji mereka dibedakan lagi antara buruh paksa, buruh kontrak dan buruh bebas.

Buruh paksa, menerima upah paling rendah sebesar 18 sen/hari dan menerima premi yang dibayarkan perusahaan sebanyak dua kali sebulan dalam bentuk uang untuk waktu lembur. Dalam kenyataannya, uang lembur dan premi tersebut hanya dibayarkan diawal-awal masa kerja karena setelah itu perusahaan tidak pernah membayar sesen pun. Untuk buruh kontrak, mereka menerima upah 30 sen/hari jika mereka bekerja di tambang bawah tanah dan 20 sen/hari jika mereka bekerja di tambang terbuka. Selain itu buruh kontrak juga mendapat fasilitas berupa perumahan, pakaian tiga kali setahun, serta perawatan medis. Berbeda dengan buruh bebas, mereka menerima gaji lebih besar dari kedua kelompok buruh lainnya. Buruh bebas menerima upah sebesar 50 sen/hari jika mereka bekerja di tambang terbuka dan 65 sen/hari jika mereka bekerja di tambang bawah tanah.<sup>44</sup>

Upah dibayar berdasarkan jumlah batubara yang dihasilkan oleh berbagai regu kerja. Jumlah tersebut ditetapkan oleh perusahaan dengan perhitungan tebal tipisnya lapisan batubara yang terdapat di dalam tanah. Di dalam tambang segala sesuatunya telah diatur dan dipersiapkan oleh perusahaan, termasuk makanan. Untuk kebutuhan makanan di barak-barak para buruh, perusahaan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak lain. Namun, sejak tahun 1912 pihak perusahaan mengambil alih pendistribusian makanan karena banyaknya laporan yang menerangkan bahwa jumlah makanan yang diperoleh buruh jauh dari kata memadai dan tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan pihak perusahaan pada pihak pemasok makanan tersebut.

Akan tetapi, kendati urusan makanan telah diawasi langsung oleh pihak perusahaan dengan menyediakan seorang pengawas Belanda dan tiga orang penjaga, masalah pendistribusian makanan belum teratasi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kecurangan-kecurangan di masing-masing pihak, korupsi dan kolusi seringkali menjadi penyebab tidak baiknya urusan di dalam perusahaan.<sup>45</sup> Selain

---

<sup>44</sup> Berdasarkan tingkat upah yang diterima oleh buruh pada tahun 1905, lihat Zaiyardam, *ibid.*, hlm 185.

<sup>45</sup> Sebagai contoh, korupsi terjadi antara pemasok Cina (yang merupakan pihak yang dikontrak oleh pemerintah kolonial untuk mengurus distribusi makanan ke barak-barak buruh) bekerjasama dengan personil administrasi bagian makanan untuk memanipulasi jumlah pasokan beras yang

itu, pada masa selanjutnya menu makanan yang tidak bervariasi pun menjadi kendala serta semakin kecilnya jatah makan yang di dapat buruh pun makin memperbesar masalah pembagian makanan bagi buruh di tambang batubara Ombilin.

Tak jauh berbeda dengan pembagian makanan bagi buruh di tambang, pada masa awal pembukaan tambang antara tahun 1896-1900, tingkat kesehatan buruh pun sangat rendah. Namun demikian, pada masa-masa selanjutnya meskipun jumlah buruh yang dirawat di rumah sakit menurun bukan berarti perhatian perusahaan terhadap kesehatan buruh lebih baik. Buruh yang mengalami kecelakaan kerja ataupun yang mendapat hukuman, umumnya meninggal di luar rumah sakit. Dengan demikian, banyak dari buruh yang menjadi korban kecelakaan kerja atau pun terkena hukuman cambuk dari pihak perusahaan yang tidak terdata secara resmi.

Selain kesehatan dan makanan, tempat tinggal atau lebih dikenal dengan nama barak-barak untuk buruh pun menjadi tanggung jawab perusahaan. Pada masa awal barak-barak dibangun untuk buruh yang terdiri dari dua bangsal kamar panjang dan tidak dibagi-bagi menjadi ruangan-ruangan, berdinding bambu serta beralaskan tanah. Barak ini digunakan untuk menampung buruh paksa yang terletak di dekat lapangan sepak bola, sehingga barak ini dikenal dengan nama Tangsi Rantai. Pada tahun 1904, setelah jumlah buruh yang bekerja di tambang semakin bertambah pihak perusahaan membangun barak-barak baru dengan kondisi lebih baik setiap barak dibagi-bagi menjadi ruangan-ruangan kecil, dan barak ini pun dikenal dengan nama Tangsi Tanah Lapang.

Pada tahun 1910, pihak perusahaan mengadakan perubahan dalam pembangunan tipe barak-barak untuk buruh. Ada tiga tipe barak yang disediakan, ada barak yang berupa asrama dengan deretan panjang tempat tidur untuk kuli yang bujangan, ada pula tipe barak yang di sediakan untuk kuli-kuli yang telah beristeri dan dilengkapi dengan dapur bersama serta kamar mandi yang luas yang dapat digunakan oleh anggota keluarga buruh yang telah berumah tangga, dan ada pula barak yang disediakan berbentuk kamar-kamar khusus untuk isteri-isteri para kuli. Lokasi pembangunan barak-barak tersebut tidak terpusat pada satu tempat

---

masuk ke dapur umum, sehingga pada tahun 1900 banyak dari buruh yang tidak mendapat jatah makanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial/perusahaan.



saja, tetapi sesuai dengan perkembangan areal pembukaan tambang batubara, dan umumnya barak-barak tersebut dibangun mengelilingi areal pertambangan yang tersebar di wilayah Sawah Lunto. Pada dasarnya barak yang disediakan oleh pihak perusahaan sangat memuaskan, hanya saja hal yang dirasakan kurang oleh kuli hanyalah tingkat keamanan barak-barak tersebut karena memang tidak disediakan pegawai keamanan oleh pihak perusahaan.

### **2.3.3 Keresahan-keresahan Awal di Tambang**

Keresahan yang dialami buruh tambang berawal dari masalah kesejahteraan, terutama bagi buruh dari kalangan pekerja paksa. Kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh perusahaan terutama menyangkut kesejahteraan buruh seringkali tidak sesuai dengan besarnya usaha yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Kondisi seperti ini makin memperuncing keresahan-keresahan yang ada di kalangan buruh tersebut. Persoalan awal yang dihadapi buruh adalah pola pembagian upah yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh perusahaan, sehingga taraf hidup buruh tidak mengalami peningkatan kendati produksi meningkat, buruh tetap saja menerima upah rendah dibanding dengan yang telah mereka kerjakan.<sup>46</sup> Pada perusahaan tambang batubara Ombilin perusahaan tidak memberlakukan hubungan tingkat produksi dengan upah buruh, sehingga tingkat upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan perlakuan terhadap buruh tidak sejalan dengan produksi batubara.

Kondisi lingkungan di pertambangan sangat berat, kuli yang bekerja ditambang haruslah memiliki fisik yang kuat, sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu lama untuk bekerja di bawah tanah. Dalam perusahaan, Pemerintah melakukan pengendalian terorganisir bagi pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, sehingga kegiatan produksi di perusahaan berjalan lancar dan batubara dapat diproduksi sebanyak mungkin. Buruh bekerja dalam pengawasan seorang mandor dan mandor bertanggung jawab kepada kepala pengawas atas

---

<sup>46</sup> Pada tahun-tahun awal produksi, perusahaan mengalami kerugian karena merupakan perusahaan baru sehingga masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam perusahaan. Barulah pada tahun kedua tahun 1893 perusahaan memperoleh keuntungan dari produksinya hingga mencapai puncaknya pada tahun 1920 sebanyak 4.658.441 gulden. Namun demikian, upah yang diterima buruh tetap sama senilai upah sebelumnya.

jalannya produksi batubara di dalam tambang. Berikut adalah alur sederhana dari proses tanggungjawab produksi di tambang batubara Ombilin Sawah Lunto :



Dari skema sederhana di atas diperoleh sebuah gambaran bahwa buruh yang bekerja di tambang yang dibagi per regu tersebut bekerja diperintahkan bekerja semaksimal mungkin di bawah pimpinan seorang kepala regu. Kepala regu memberikan laporan kepada mandor yang mengawasi kinerja buruh secara keseluruhan di lapangan dan pada saat berakhirnya waktu kerja mandor pun berkewajiban memberikan laporan hasil produksi tambang yang telah dihasilkan buruh setiap harinya kepada kepala pengawas. Laporan yang telah didapat oleh kepala pengawas dari mandor tersebut dilaporkan kepada kepala pertambangan, sehingga dengan demikian kepala pertambangan mengetahui secara rinci jumlah produksi batubara yang dapat dihasilkan tambang setiap harinya.

Para mandor ditugaskan oleh perusahaan untuk mengawasi kinerja kuli-kuli di dalam tambang, namun wewenang yang diberikan perusahaan kepada mandor seringkali disalahgunakan dan memicu amarah dari para kuli. Mandor menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan memaksa kuli untuk bekerja lebih lama dalam tambang agar produksi batubara melebihi target perusahaan,<sup>47</sup> meminta kuli menyerahkan jatah makan buruh untuk mereka nikmati, dan menggunakan tenaga kuli diluar jam kerja untuk kepentingan pribadi agar para mandor mendapat keuntungan dari perusahaan.<sup>48</sup> Selain disebabkan oleh faktor kesejahteraan dan sikap mandor terhadap buruh, para buruh pun memiliki

<sup>47</sup> Setiap regu buruh yang bekerja di pertambangan diberikan target-target jumlah batubara yang harus mereka hasilkan setiap harinya. Target yang harus dicapai tiap kepala/buruh pada tahun 1901 sebesar 49,5 ton batubara dan meningkat menjadi 76 ton batubara/buruh pada tahun 1910. Lihat *Ibid.*, hlm 126-127.

<sup>48</sup> Jam kerja yang berlaku bagi setiap buruh dalam tambang batubara Ombilin adalah enam jam/hari, tetapi pada kenyataannya mereka dipekerjakan hingga malam hari. Dalam pengaturan jam kerja buruh dibagi dalam dua shift yakni shift I: masuk tambang pukul 06.00 s/d 14.00, dan shift II: pukul 14.00 s/d tengah malam.

permasalahan yang kompleks dalam kesehariannya di dalam tambang, yang akhirnya memicu persaingan dan perselisihan di dalam tambang dan berujung pada campur tangan perusahaan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Di samping itu, dalam lingkungan pertambangan yang mayoritas adalah kaum laki-laki, kalangan buruh pun tidak dapat menghindar dari penyimpangan perilaku seksual yang diderita oleh beberapa buruh tambang.<sup>49</sup> Selain itu, buruh juga dihadapkan pada fobia yang muncul ketika buruh baru masuk dan bekerja di tambang dalam, karena suasana kerja di tambang dalam jauh dari nyaman dan aman bagi buruh.<sup>50</sup> Fobia yang diderita buruh tersebut berdampak pada produksi tambang, hal ini makin menyolok dan menjadi perhatian dari pemerintah Belanda ketika Agustus 1925, 84 dari 86 orang buruh yang akan dipekerjakan pada tambang dalam mengalami fobia tambang. Oleh karena itu, Inspektur Perburuhan yang berkunjung ke Sawah Lunto meminta agar kuli-kuli baru yang akan dipekerjakan di tambang dalam, harus melewati proses adaptasi dengan meliputi empat minggu mulai dari dua jam kerja, tiga jam, enam jam kerja hingga mereka bisa bekerja penuh ditambang selama delapan jam sehari.<sup>51</sup>

Kendati dalam tambang batubara Ombilin tidak dikenal pengelompokan buruh berdasarkan etnisitas, ketegangan-ketegangan diantara kelompok etnis berbeda pun sering muncul dan menimbulkan keresahan di tambang. Ketegangan berawal dari hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kelompok etnis lain dan umumnya berawal dari satu individu dengan individu lainnya, dan kemudian berkembang menjadi perkelahian massal yang membuat rusuh tambang. Perkelahian di antara kuli ini tak luput dari jatuhnya korban di kalangan kuli sendiri, mulai dari luka-luka ringan sampai berujung pada

<sup>49</sup>Perilaku homoseksual dalam pertambangan ini bersifat kontadiktif dan berfungsi ganda, di satu pihak kuli melakukan karena mencari perlindungan dari kuli yang dianggap kuat dan di pihak lain untuk mencari barang langka (karena jumlah narapidana perempuan di penjara Sumatera Barat sangat sedikit), lihat Erwiza. *op. cit.*, hlm 108.

<sup>50</sup>Buruh yang umumnya berasal dari pedesaan tidak terbiasa bekerja pada suasana tambang, sebagian besar dari mereka adalah petani-petani desa. Mereka bekerja pada lobang yang berada jauh di dasar tanah tanpa dilengkapi dengan berbagai fasilitas pengaman, lembab, gelap karena fasilitas penerangan terbatas, dan penuh dengan bahaya karena banyak dari pekerja yang tidak menyadari bahwa dalam lobang tambang batubara banyak mengandung gas metan (CO<sub>2</sub>) yang mudah terbakar dan mengancam keselamatan mereka. Pada tahun 1896 serangan gas beracun menimpa buruh paksa dan mandor yang sedang menggali batubara pada tambang dalam, 139 orang pekerja menjadi korban pada kecelakaan tersebut. Zaiyardam, *op.cit.*, hlm 194.

<sup>51</sup>Erwiza, *op.cit.*, hlm 177-178.

kematian. Kuli yang seringkali dipersalahkan jika terjadi perkelahian oleh pihak perusahaan adalah kuli paksa karena mereka umumnya adalah para narapidana. Setiap kuli paksa berselisih dengan kuli kontrak, maka kuli paksalah yang akan mendapat hukuman cambuk dari perusahaan, sedangkan kuli kontrak dilepaskan begitu saja. Hal ini pulalah yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan di antara kuli, karena perusahaan membedakan perlakuan antara kuli kontrak dan kuli paksa, sehingga tingkat kecemburuan sosial di antara mereka meningkat.

Buruh yang bekerja pada tambang batubara Ombilin hidup dalam sebuah siklus yang relatif tetap.<sup>52</sup> Selama hidup dalam tambang, buruh bekerja sesuai dengan kelompok mereka, lalu menerima gaji sesuai hasil kerjanya dan menerima dan menghabiskan upah yang telah mereka terima dari perusahaan. Untuk mengikat buruh dalam siklus perusahaan, maka Pemerintah mendirikan pasar malam. Di pasar malam tersebut Pemerintah menyajikan hiburan bagi buruh yang telah bekerja keras untuk memproduksi batubara, sehingga buruh pun merasa terhibur dan betah bekerja di tambang. Di dalam pasar malam ini, perusahaan menyediakan berbagai arena judi, dan permainan lainnya yang dapat menghabiskan uang buruh dalam waktu singkat. Setelah kalah berjudi, untuk memenuhi kebutuhan hidup berikutnya buruh biasanya meminjam uang dari perusahaan melalui mandor, sehingga dengan begitu buruh akan tetap terikat oleh utang dan kerja di tambang sampai utang-utang mereka lunas.

Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh buruh dalam tambang batubara membuat beberapa dari mereka berupaya untuk lari dari kehidupan tambang. Pihak perusahaan sempat kewalahan dengan larinya buruh-buruh dari perusahaan, karena ini akan menghambat produksi batubara perusahaan. Perusahaan pun menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat agar buruh, khususnya kuli paksa tidak melarikan diri lagi. Akan tetapi permasalahan ini tidak begitu saja dapat diselesaikan, karena masalah demi masalah telah mengakar di perusahaan tambang batubara Ombilin di masa awal beroperasinya, sehingga keresahan-keresahan yang terjadi tersebut menjadi pemicu dari gejolak semangat perjuangan buruh pada masa berikutnya.

---

<sup>52</sup> Zaiyardam. *op. cit.*, hlm 187.

**BAB 3**  
**PERSATOEAN KAOEM BOEROEH TAMBANG (PKBT)**  
**SAWAH LUNTO**  
**1925-1927**

**3.1 Komunis dan Organisasi Buruh**

Paham marxis datang dari luar negeri dan ditanamkan di tanah air pada masa sebelum Perang Dunia I oleh seorang Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. Ia adalah seorang anggota dari SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*) yang pindah ke Semarang pada tahun 1913 dan ditahun 1914 mendirikan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) bersama-sama dengan rekannya J. A. Bransteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma untuk membentuk kader-kader pemimpin bagi sarikat-sarikat buruh. Pengaruh dari ajaran marxis ini semenjak tahun 1917 menyebar secara luas, dengan menggunakan taktik “*block within*”. Pada tahun 1920-an menjadi awal dari para tokoh pergerakan untuk menguji gagasan marxisme, hal ini ditandai oleh perdebatan ideologi di kalangan tokoh pergerakan tersebut melalui disiplin partai tahun 1921 dalam tubuh Sarekat Islam.<sup>1</sup> Di awal tahun 1920 di Jawa lahir sebuah partai berhaluan komunis, PKI (Partai Komunis Indonesia)<sup>2</sup> yang kebijakan-kebijakannya berdasarkan keputusan Komintern (Komunis Internasional). Partai ini membangun basis gerakan dalam SI Merah yang kemudian membentuk organisasi gerakan yang independen lewat Sarekat Rakyat dan cabang-cabangnya pun didirikan di daerah Jawa dan Sumatera.

Pengenalan gagasan komunis diawali dengan dibentuknya cabang PKI di Padang tahun 1923 yang dipimpin oleh Magas Abdul Majid. Tokoh-tokoh lokal mengenal komunis setelah menjalin hubungan dengan pemimpin PKI di Jawa seperti H. Mochtar Misbach, dan di Aceh dengan Natar Zainoeddin. Hubungan yang terjalin antara tokoh-tokoh lokal ini tercipta melalui lawatan kedua belah

---

<sup>1</sup> SI pecah menjadi dua, yakni SI Merah yang diboncengi oleh ideologi marxisme dan SI Putih menjadi ahli waris SI yang semula didirikan di Surakarta tahun 1912.

<sup>2</sup> Penggabungan Sarekat Islam Merah yang berganti nama menjadi Sarekat Rakyat dengan Partai Komunis Hindia mengakibatkan penggantian nama Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia pada tanggal 20 Mei 1920. Lihat Slametmuljana, *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Djilid I. (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1968), hlm 208.

pihak ke Jawa dan Sumatera Barat.<sup>3</sup> Di samping itu, penyebaran ideologi komunis juga diupayakan dengan berbagai cara, di antaranya menggunakan sarana kepemimpinan tokoh lokal yang menguasai media cetak,<sup>4</sup> dan menarik simpati dari kalangan pelajar di sekolah-sekolah Islam melalui kursus-kursus yang diadakan di luar sekolah.<sup>5</sup> Para propagandis juga menyebarkan paham komunis kepada kalangan petani pemilik tanah,<sup>6</sup> dan kepada buruh pribumi yang bekerja pada perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Kelompok-kelompok ini tergabung ke dalam *Sarekat Rakyat*, dan pada bulan September 1924 kelompok yang tersebar ini disatukan dalam sebuah kepemimpinan yang terpusat di wilayah Padang Panjang. Untuk lebih menyentuh berbagai kalangan, baik kalangan terpelajar maupun kalangan pekerja maka tokoh-tokoh yang tergabung dalam *Sarekat Rakyat* tersebut membentuk berbagai sarekat pekerja, di antaranya *Sarekat Tani* untuk wilayah Padang, *Sarekat Buruh Kereta Api* di Batipuh, *Sarekat Buruh Pelabuhan* di Emmahaven (Teluk Bayur) dan *Persatuan Kaum Buruh Tambang* di Sawah Lunto. Perkembangan gagasan komunis mulai berjalan makin baik setelah sarekat-sarekat ini menjadi bagian dari sarana propaganda PKI dan masuk ke dalam struktur kepengurusannya. Sarekat-

<sup>3</sup>Permulaan tahun 1923 H.Dt.Batuah pergi ke Sigli dan bertemu dengan Natar Zainuddin, seorang Minangkabau yang telah lama mengenal ajaran komunis di Jawa. Sekembalinya ke Padang ia mengenalkan ajaran tersebut kepada murid-muridnya di Sumatra Thawalib. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978), hlm 96-97 dan Erwiza, *op. cit.*, hlm 183.

<sup>4</sup>Kehadiran berbagai jenis surat kabar berhaluan komunis sangat membantu pengenalan paham ini pada fase awalnya di wilayah Sumatera Barat melalui opini-opini, interpetasi atau beberapa pemikiran yang bersifat spekulatif dan subjektif. Adapun media cetak berhaluan komunis yang beredar pada tahun 1923 hingga 1925, diantaranya *Pemandangan Islam* di Padang Panjang pimpinan H.Datuk Batuah, *Djago-Djago* di Padang Panjang pimpinan Natar Zainuddin, *Doenia Achirat* di Fort de Kock pimpinan Zainal Maliki, *Petir* di Padang pimpinan Baharuddin Shaleh, dan *Signal* di Sawah Lunto pimpinan H.Arif. Semua koran ini tidak bertahan lama, karena hanya terbit beberapa kali saja sebelum dibredel oleh pemerintah.

<sup>5</sup>Pada tahun 1924, murid-murid di Sumatra Thawalib diberikan kursus-kursus untuk mengembangkan paham-paham baru seperti *ilmu kuminih* (ajaran yang menanamkan kebencian kepada pemerintah Belanda yang kafir) dalam sebuah lembaga kursus yang diberi nama *International Debating Club* (IDC), lengkapnya lihat Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. (Jogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hlm 58.

<sup>6</sup>Dalam pengambilalihan tanah milik penduduk yang akan dijadikan lahan pertambangan ataupun perusahaan Belanda, pemerintah hanya melibatkan tokoh-tokoh pemuka adat sebagai wakil pemilik tanah dengan mengadakan pesta sebagai bentuk sebuah kesepakatan, sehingga dengan demikian pemerintah dapat menekan pengeluaran untuk membayar uang ganti rugi tanah penduduk setempat.

sarekat ini diharapkan tetap memelihara hubungan dengan Komite Sentral di Jawa, sehingga terbina koordinasi yang baik antara kepengurusan komunis pusat (Jawa) dengan kepengurusan komunis yang ada di daerah khususnya di wilayah Sumatra Barat.

*Sarekat Rakyat* yang didirikan di daerah Padang Panjang dipimpin oleh orang-orang yang merupakan kombinasi dari kelompok agama, kaum adat dan cendekiawan. Komunisme yang dikembangkan pun lebih bercorak ke-Islaman. Paham komunis yang disebarluaskan di ranah Minang bukanlah paham komunis yang diterima dari orang-orang komunis sekuler<sup>7</sup> melainkan dari orang-orang yang menjadikan komunisme sebagai gerakan alternatif.<sup>8</sup> Paham komunis yang diajarkan oleh Hadji Datuak Batuah ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, sehingga ia pun menyebut ajarannya dengan istilah “Islam Revolusioner” atau “Islam Komunis”.<sup>9</sup>

Dalam ajaran ini, terdapat penggabungan antara paham sosialisme Islam dan komunisme dalam perjuangan anti penjajahan. Pendapat-pendapat dari Al Qur'an dan Hadist Rasul diutarakan sedemikian rupa untuk menerangkan ajaran baru tersebut kepada masyarakat luas.<sup>10</sup> Teori marxis tentang *materialisme historis* dan perjuangan kelas tidak ia bahas secara mendalam, cukup dengan menghadapi gagasan tentang kesadaran kelasnya saja yakni kelas bumiputera yang tertindas oleh kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dialaminya akibat kebijakan penguasa kafir yakni kolonial Belanda. Ajaran ini berasaskan

<sup>7</sup>Orang-orang komunis sekuler yakni kalangan yang telah mendapat pemahaman secara mendalam tentang hakekat ajaran Marxisme mengenai *materialisme historis* dan perjuangan kelas (*class struggle*).

<sup>8</sup>Jiwa orang minang adalah Islam, dan ketika tokoh islam Minang mulai diikutsertakan dalam politik mereka menolak dengan alasan tidak suka berpolitik dan lebih memilih jalur menentang pemerintah kolonial dengan cara menggabungkan gerakan komunis yang tidak terlepas dari Islam dengan hadist-hadist yang mengutuk keras orang-orang kafir (pemerintah Belanda).

<sup>9</sup>Haji Datuk Batuah adalah seorang ulama yang mendapatkan pengetahuan tentang komunis dari perawatannya ke tanah Jawa. Pemahaman komunis yang didapatnya adalah sebuah bentuk rasa melawan dan tidak puas pada pemerintah Belanda, dan yang terpenting adalah rasa menentang *kapitalisme-imperialisme*. Lihat Hamka, *Ajaku: Riwayat Hidup DR. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. (Jakarta: Penerbit Djajamurni, tanpa tahun terbit).

<sup>10</sup>Dengan memanfaatkan situasi yang ada, seperti dengan menyebarkan keburukan pemerintah kolonial yang mengambil kekayaan alam negeri ini, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pribumi, maka ajaran ini sedemikian masuk akal bagi murid-murid Hadji Datuak Batuah yang masih muda belia. Ajaran ini ia sebar dalam kursus-kursus baik secara langsung, ataupun tidak langsung kepada murid-muridnya untuk mengarahkan mereka kedalam gerakan-gerakan yang lebih radikal dan revolusioner. Lihat Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. (Jogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hlm 60.

pada ajaran Tan Malaka yang menghubungkan ajaran tentang kesamaan dan kebersamaan manusia dalam Islam dan komunis.<sup>11</sup>

Ajaran komunis yang mereka pahami disejajarkan dengan semangat perjuangan Islam. Konsep perjuangan kelas yang menjadi dasar dalam melihat ketimpangan dalam masyarakat lebih ditekankan melalui makna ajaran *fiqh* dari sudut sosial dan politis dari pada ideologi murni komunis itu sendiri. Meskipun pada tanggal 12 Desember 1924 di Kota Gede, Yogyakarta, *Sarekat Rakyat* dibubarkan dalam kongres PKI, tetapi *Sarekat Rakyat* Sumatera Barat tidak membubarkan diri, bahkan di Sumatera Barat *onderbouw* PKI itu tetap hidup serta lebih populer ketimbang PKI. Hal ini dipilih oleh kalangan komunis Sumatra Barat, khususnya kubu Padang Panjang yang menentang politik dan bernaung dalam ikatan sebuah partai yakni Partai Komunis Indonesia, sehingga pada pertengahan tahun 1924, gerakan komunis di Sumatera Barat lebih suka bernaung di bawah *Sarekat Rakyat* dari pada di bawah naungan PKI langsung. Akhirnya *Sarekat Rakyat* dan PKI Sumatera Barat terpisah serta berjalan sendiri-sendiri dalam menerapkan beberapa metode untuk memperkenalkan paham komunis. Mereka melakukan propaganda, mengumpulkan senjata, dan melakukan aksi-aksi illegal.

Cara-cara propaganda yang dilakukan untuk menggalang kekuatan adalah dengan meningkatkan kegiatannya melalui rapat-rapat umum, mengadakan rapat rahasia dan kursus-kursus. Dalam hal mengumpulkan senjata, para propagandis mengadakan pungutan/sumbangan suka rela dari anggotanya secara teratur untuk membantu pengadaan senjata yang dibeli di Singapura.<sup>12</sup> Dalam melakukan aksi-aksi illegal, orang-orang komunis membentuk organisasi bawah tanah dan menjual “kartu merah” sebagai identitas dari anggota komunis. Kartu merah diniatkan untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk kegiatan organisasi

<sup>11</sup> Tokoh-tokoh yang menjadi pengikut ajaran ini, diantaranya Haji Datuk Batuah, Natar Zainuddin, Djamaluddin Tamin, Djamaluddin Ibrahim, Datuk Bagindo Ratu, Sulaiman Labai, M. Nur Ibrahim, Chatib Sulaiman, Abdullah, Leon Salim. Tokoh-tokoh ini berpandangan bahwa “Islam revolusioner” tidak ada hubungannya dengan sosialisme, komunisme, atau ideologi barat lainnya. Lihat Nasir Zulhasril, *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), hlm 75.

<sup>12</sup>Menjelang akhir tahun 1926 telah terkumpul kurang lebih 2000 pucuk senjata api seperti karaben, senapan balansa, granat tangan, dan bom, dalam *Kolonial Verslag* 1927, hlm 145.



sedangkan organisasi bawah tanah dibentuk untuk melakukan terror-terror dan intimidasi terhadap Pemerintah Kolonial.

Kesadaran berpolitik tumbuh dalam masyarakat Sumatera Barat karena adanya keterbukaan budaya dan tradisi konflik yang telah mengakar dalam kebudayaan Minangkabau.<sup>13</sup> Dalam masyarakat Minangkabau, organisasi yang dimasuki harus sesuai dengan kepentingannya masing-masing, seperti buruh yang lebih cenderung memilih PKI karena organisasi komunis tidak mengenal perbedaan antara agama dan kebangsaan, sedangkan masyarakat pedesaan lebih cenderung memilih *Sarekat Islam* karena mayoritas dari masyarakat pedesaan menganut agama Islam. Kehadiran organisasi ini memberikan kesadaran kepada anggotanya akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara atau anggota partai. Kesadaran berpolitik ini semakin ditingkatkan oleh kalangan terpelajar atau kelompok elite yang telah mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus mereka perjuangkan. Hal ini mereka perlihatkan dengan berbagai aktivitas politik dan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai organisasi sosial politik yang ada. Adapun organisasi yang cukup berkembang dan diterima oleh masyarakat umum di daerah Sumatera Barat adalah *Sarekat Islam* (SI), *Sarikat Rakyat* (SR), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Proses pengenalan masyarakat pada organisasi baik yang bersifat politik, agama dan sosial membawa masyarakat mengetahui secara lebih baik upaya yang dapat mereka lakukan untuk perbaikan nasib mereka. Misalnya saja pada masa setelah tahun 1920-an buruh mulai mengenal pola-pola organisasi modern seperti struktur politik, pembagian kerja, tujuan organisasi dan pengerahan anggota. Pengenalan ini semua tidak lepas dari faktor pendidikan yang diterima penduduk pribumi.<sup>14</sup> Pendidikan tidak hanya membuka cakrawala berpikir mereka terhadap perkembangan ilmu-ilmu dari dunia barat, tetapi juga menyadarkan mereka akan

<sup>13</sup>Di wilayah Minangkabau gerakan radikal mulai muncul sejak perlawanan menolak *belasting* di Kamang pada tahun 1908. Rasa benci terhadap kesewenang-wenangan pemerintah telah mengakar setelah peristiwa tersebut berhasil dipatahkan oleh pemerintah kolonial, sehingga ketika komunis masuk rasa benci terhadap kolonial tersebut tersalurkan. Lengkapnya lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978), hlm 55-57.

<sup>14</sup>Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial mendirikan Sekolah Raja pada tahun 1873 di Bukittinggi. Kehadiran pendidikan barat ini menumbuhkan ide kemajuan bagi masyarakat Minangkabau. Lihat Zaiyardam Zubir, "Kehidupan Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat 1891-1927". Tesis Program Pascasarjana Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm 1.

hak dan kewajibannya sebagai bangsa terjajah. Bahkan sejak dibukanya tambang batubara tahun 1892 hingga tahun 1925, tidak ditemukan gerakan-gerakan buruh yang terorganisir dan terencana karena mereka menghadapi permasalahan dalam tambang itu sendiri-sendiri.

### 3.2 Lahir dan Berkembangnya *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang*

#### 3.2.1 Perjalanan *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT)

Pada tanggal 12 April 1925 di kota Sawah Lunto secara resmi berdiri sebuah organisasi politik buruh dengan nama *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT) Sawah Lunto. Berdirinya PKBT diilhami oleh prinsip perjuangan kelas yang dipelopori oleh pemimpin-pemimpin politik lokal dan juga peran dari organisasi besar yang lahir sebelum terbentuknya organisasi ini, seperti *Sarekat Islam*, *Sarekat Rakyat* dan PKI. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan mempersatukan kaum buruh tambang seluruh Indonesia, agar dengan kekuatan persatuan tersebut dapat mengangkat kehidupan kaum buruh menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan bunyi *Algemeene Vergadering* PKBT, yang sekaligus menjadi aturan yang mengukuhkan berdirinya organisasi PKBT Sawah Lunto.

Organisasi PKBT merupakan serikat buruh yang dibentuk oleh *Sarikat Rakyat*, bersamaan dengan pembentukan beberapa serikat buruh lainnya di beberapa wilayah di Sumatera Barat.<sup>15</sup> Untuk mewujudkan tujuan dari organisasi PKBT Sawah Lunto, ada beberapa usaha yang dilakukan oleh organisasi<sup>16</sup> yang tercantum dalam *Statuten* PKBT pada Artikel 3, di antaranya:

- a. mengoempolkan boekti<sup>2</sup> jang berhoeboeng dengan pekerdjaan diperoesahaan tambang soepaja dengan djalan sematjam ini bias diminta dengan adil kepada pembesar<sup>2</sup> madjikan semoea perbaikan peratoeran pekerdjaan.
- b. memberi pertolongan dengan moral , fikiran atau oelang pada lid2nja, pertolongan mana akan ditentoean dalam *Huishoudelijk Reglement*.
- c. mengeloearkan organ soerat kabar jang memoeat segala karang2an, keadaan dalam pekerdjaan jang bergoena bagi lid2nja.
- d. mengadakan *vergadering*<sup>2</sup> dan protes<sup>2</sup>.
- e. melakoekan segala ichtiar jang bergoena bagi kemajoean perserikatan.

<sup>15</sup>Pemimpin-pemimpin *Sarekat Rakyat* membentuk serikat-serikat buruh seperti *Serikat Tani* di wilayah sekitar Padang Panjang, *Serikat Buruh Kereta Api* di Batipuh dan Gunung Panjalai, dan *Sarekat Buruh Pelabuhan* di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Lihat Harry J. Benda, Ruth T. McVey, *The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. (Ithaca, New York: Cornell University, 1960), hlm 106.

<sup>16</sup>*Soeara Tambang*, 30 April 1925.

Adapun tokoh-tokoh yang menjadi pelopor, pengurus tertinggi dan pengurus harian PKBT serta merangkap menjadi pengurus redaksi surat kabar organisasi adalah Nawawi Arief, F.A. Loetan, Ramaja, Sulaiman Labai, Kasan Wijoyo, Idroes, Salim Sutan Malenggang, Gazali, Haji Mahmud, Haji Bahaudin, Marzuki, Rajo Bujang, dan A. Muluk Nasution. Selain itu juga ada anggota PKBT yang cukup aktif dalam organisasi, di antaranya Salim Abdul Munaf yang menjadi *klerk* (juru tulis) di rumah sakit Sawah Lunto, dan Bakar, seorang bekas mandor yang diberhentikan dari pekerjaannya di tambang Ombilin. Mereka bekerjasama, bergotong royong dan membagi tugas-tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dalam mengelola organisasi.

Nawawi Arief adalah seorang mantan buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang batubara Ombilin, begitu juga dengan F.A. Loetan dan Ramaja, karena dicurigai sebagai pengikut komunis. Salim Sutan Malenggang alias Emek adalah mantan kepala S.S.S (*Station Staatsspoor*) yang diberhentikan karena pemogokan V.S.T.P tahun 1923.<sup>17</sup> Ia juga seorang pemimpin 'Barisan Merah' dan tokoh yang terlibat dalam pembunuhan Wali Nagari Silungkang serta merencanakan pembebasan buruh-buruh paksa dari penjara. Setelah diberhentikan dari tambang, ia aktif dalam menyebarkan dan mempropagandakan komunisme sekaligus menjadi editor *Soeara Tambang*.<sup>18</sup>

Idroes adalah seorang mantan pegawai B.O.W (*Burgerlijke en Openbare Werken*) atau Departemen Pekerja Umum Solok berpangkat *opnemer tekenaar*, yang diberhentikan karena menerjunkan diri ke dalam dunia pergerakan. Gazali adalah lulusan sekolah Sumatra Thawalib Padang Panjang, sedangkan Haji Bahaudin adalah guru sekolah Muhammadiyah Sawah Lunto dan A. Muluk Nasution sendiri adalah seorang pemuda berumur 19 tahun ketika bergabung dengan PKBT Sawah Lunto. Umumnya anggota organisasi PKBT Sawah Lunto terdiri dari para pedagang kecil yang berada disekitar tambang batubara Ombilin dan pegawai tingkat rendah pemerintahan kolonial Belanda. Para pegawai yang

<sup>17</sup>V.S.T.P (*Vereeniging van Spoor en Tramwegaenpersoneel*) adalah organisasi pekerja yang mewadahi pekerja kereta api dan tram dari kalangan pemerintah dan pekerja swasta. VSTP berpusat di Semarang dan resmi berdiri pada 14 November 1908, dan mendapat *rechtspersoon* pada 12 Februari 1909.

<sup>18</sup>*Sinar Sumatra*, 4 Januari 1927.

tergabung dengan PKBT ini umumnya adalah para pegawai yang diberhentikan karena tekanan ekonomi yang dialami perusahaan akibat krisis.

Ada banyak strategi yang dilakukan organisasi ini untuk menarik masyarakat Sawah Lunto bergabung dengan organisasi PKBT, di antaranya dengan mengutus beberapa orang tokoh yang cukup berpengaruh di lingkungannya untuk menyebarkan propaganda ke masyarakat luas, dan membujuk buruh-buruh napi yang ada di dalam tambang untuk bergabung. Propaganda dilakukan dengan tekun, mulai dari kalangan penduduk pedesaan di sekitar Sawah Lunto, penduduk kota, kalangan buruh sampai pada kalangan pemimpin-pemimpin di daerah Sawah Lunto. Propaganda dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, mesjid, tangsi, dan di dalam tambang batubara Ombilin.

Dalam menyebarkan tujuan organisasinya, PKBT secara diam-diam berupaya melakukan infiltrasi kader-kadernya ke dalam setiap seksi dari tempat kerja dan tangsi di perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Sikap tokoh-tokoh propaganda PKBT yang *low profile* dan pidatonya yang menggugah membuat para kuli tambang terpengaruh untuk ikut bergabung ke dalam organisasi buruh. Untuk menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat luas, organisasi PKBT pun masuk ke dalam jaringan guru-guru agama yang memberikan ceramah di mesjid-mesjid. Para propagandis PKBT berupaya membangkitkan rasa perlawanan rakyat terhadap Pemerintah Kolonial dengan mengangkat perubahan nasib buruh akan diperoleh jika buruh bersatu untuk memperbaiki kehidupannya termasuk dengan melawan kesewenang-wenangan Pemerintah Kolonial. Dengan cara demikian diharapkan organisasi PKBT dapat menarik dukungan dan simpati dari penduduk sebanyak mungkin, sehingga cita-cita PKBT untuk menggalang kekuatan dan persatuan untuk melawan Pemerintah guna mewujudkan tercapainya kehidupan yang lebih baik.

### **3.2.2 Media Propaganda *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang* (PKBT)**

Media massa cetak digunakan oleh organisasi sebagai alat komunikasi yang dapat mengembangkan gagasan guna menyebarkan propaganda dan ide-ide politik kepada pengikut-pengikutnya yang tersebar di berbagai tempat. Selain itu, media massa cetak merupakan pilihan media yang mudah dan murah dilakukan

apabila diukur dengan kemajuan teknologi komunikasi masyarakat pada saat itu. Akan tetapi media cetak pun memiliki kelemahan, yakni memerlukan kemampuan dan kebiasaan tulis-baca dari pembacanya, dan memiliki sasaran tersendiri yakni kalangan terdidik, agar pesan yang ada di media tersebut dapat sampai pada khalayak.

Pada saat peresmian berdirinya organisasi buruh *Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang Sawah Lunto*, secara bersamaan diterbitkan pulalah surat kabar *Soeara Tambang* dan *Panas*. Kedua surat kabar yang terbit secara berkala dan beredar setiap akhir bulan ini menjadi corong bagi PKBT Sawah Lunto dalam menyuarakan tujuan dan kegiatan organisasinya pada masyarakat luas. Surat kabar *Soeara Tambang* dipimpin oleh Nawawi Arief, yang dibantu oleh F.A. Loetan dan Ramaja, sedangkan redaksi *Panas* dipimpin oleh Sulaiman Labai.<sup>19</sup> Untuk memperoleh surat kabar ini, dikenakan biaya berlangganan f 1.20/bulan untuk kawasan Indonesia dan f 1.50/bulan untuk kawasan diluar Indonesia<sup>20</sup> dan khusus untuk anggota PKBT, surat kabar ini diberikan secara gratis.<sup>21</sup> Surat kabar ini banyak mengangkat tema tentang ketimpangan yang terjadi di dalam pertambangan, terutama perlakuan tidak manusiawi yang didapat oleh buruh tambang dari mandor. Selain itu surat kabar ini juga memuat agenda-agenda dari organisasi PKBT Sawah Lunto, mulai dari pengumuman-pengumuman daftar urusan rumah tangga organisasi sampai pada propaganda-propaganda kepada kaum buruh untuk bersatu dan bergabung dengan organisasi PKBT Sawah Lunto agar memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Dalam perjalanannya, surat kabar yang kental dengan ideologi komunis ini menemui berbagai rintangan, mulai dari pemeriksaan kantor sekretariat surat kabar, penangkapan tokoh-tokoh redaksi, tidak seimbangny neraca keuangan perusahaan, sampai pada pembredelan oleh pemerintah Belanda. Surat kabar *Soeara Tambang* hanya terbit sebanyak sepuluh kali mulai dari bulan April 1925 hingga Februari 1926, pada bulan November tidak terbit, dan surat kabar *Panas* hanya terbit sebanyak empat kali dari bulan November 1925 hingga Februari

<sup>19</sup> Sulaiman Labai adalah seorang pemimpin Sarikat Islam Silungkang tahun 1918 dan Sarekat Rakjat Silungkang tahun 1924. Foto Sulaiman Labai (Lampiran 4)

<sup>20</sup> Tidak terdapat keterangan lengkap yang menyebutkan sampai kemana saja penyebaran surat kabar *Soeara Tambang* di luar wilayah Indonesia.

<sup>21</sup> *Soeara Tambang*, 30 April 1925.

1926, namun edisi kedua belum sempat diedarkan pada masyarakat luas, karena terkena pemeriksaan mendadak oleh *politie* dalam penertiban media yang dicurigai mengancam keberadaan Pemerintah Kolonial.<sup>22</sup>

Pada tanggal 7 Juli 1925, di saat masih gelap gulita datang seorang asisten residen, satu *controleur*, satu demang, satu mantri *politie*, dan dua orang *politie opziener* ke kantor PKBT dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan. Barang-barang yang ada di dalam kantor dibawa oleh petugas, berikut dua orang pengurus PKBT, yaitu Nawawi Arief dan Abdul Halim, serta dua orang tokoh *Sarekat Rakyat* yaitu Marah Imin dan Danin. Pemeriksaan ini sebenarnya sering dilakukan oleh Pemerintah, untuk menertibkan media yang dicurigai mengancam keberadaan Pemerintah Kolonial. Tetapi untuk pemeriksaan kali ini, pemerintah juga membawa serta pengurus PKBT, sehingga menimbulkan amarah kalangan pengurus lainnya terhadap Pemerintah. Keesokan harinya pengurus PKBT lainnya mendatangi penjara Doerian, tempat tokoh-tokoh tersebut ditahan, untuk melakukan aksi pembelaan terhadap rekan-rekan mereka tersebut. Setelah melakukan perdebatan dan pembelaan yang panjang maka semua pengurus PKBT beserta tokoh *Sarekat Rakyat* yang ditahan tersebut dibebaskan kembali.

Tulisan-tulisan yang ada dalam setiap edisi surat kabar *Soeara Tumbang* dan *Panas* merupakan tulisan yang dikirim oleh kontributor dari berbagai tempat dan ada pula laporan dari propagandis-propagandis PKBT yang bekerja di dalam tumbang. Sebuah tulisan yang dimuat dalam surat kabar *Soeara Tumbang* edisi no.4, yang dituntut oleh Pemerintah karena dinilai menghasut buruh supaya melakukan perlawanan. Karena tulisan pada tanggal 11 Agustus 1925 tersebut Nawawi Arief yang bertanggung jawab sebagai redaktur pun dipanggil untuk menghadap *Controleur* Sawah Lunto, dan sesampainya di kantor *Controleur* Sawah Lunto ia diminta untuk membaca salah satu tulisan yang terdapat dalam surat kabar tersebut yang berjudul "Maoe Mampoes". Setelah selesai membacanya, Nawawi Arief ditanya oleh pihak *controleur* siapa yang membuat

---

<sup>22</sup>Hendra Naldi. "Perkembangan Media Pers Daerah: Cerminan Perubahan Masyarakat di Sumatera Barat pada Masa Kolonial (1900-1930)". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2002, hlm 146.

tulisan itu. Akan tetapi, demi menjaga kode etik pers maka ia menutupi identitas penulis dengan hanya memberitahukan bahwa itu adalah tulisan dari salah satu anggota PKBT Sawah Lunto. Kemudian *controleur* membacakan fasal 160,<sup>23</sup> yang berujung pada penahanan saudara Nawawi Arief dalam bui selama tiga setengah tahun di penjara Cipinang Jakarta.<sup>24</sup>

Sejak penangkapan Nawawi Arief karena *pers delict*, maka kepengurusan PKBT dan redaktur surat kabar *Soeara Tampang* digantikan oleh Idroes.<sup>25</sup> Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap setiap unsur yang dianggap mengancam kekuasaan Pemerintah Kolonial dengan mengeluarkan fasal 153 Bis dan 156 Ter.<sup>26</sup> Hal ini diterapkan oleh Pemerintah Kolonial pada Desember 1925 terhadap surat kabar *Panas* no.2 dan no.4. Surat kabar *Panas* no.2, yang telah dicetak ribuan lembar dan belum sempat dikirim kepada agen-agen disita oleh Pemerintah dalam pemeriksaan rutin terhadap sekretariat sebuah orgaan.

Lain halnya dengan surat kabar *Panas* no.4, Idroes sebagai penanggung jawab redaksi ditangkap dan ditahan komisarisi polisi karena tulisan yang termuat dalam surat kabar tersebut memuat berita politik tingkat tinggi.<sup>27</sup> Sepeninggal polisi-polisi tersebut, para redaksi surat kabar pun kebingungan karena semua pimpinan terbaik sudah ditahan oleh pihak polisi Pemerintahan Kolonial,

<sup>23</sup> Fasal 160, “ia yang ditempat terbuka dengan mulut atau tulisan mengasut akan satu sama lain tiada mendengar baik pada pemerintah *wet*, baikpun pada perintahnya pembesar yang diberikan karena berdasar pada kekuatannya *wet* negeri, itu dihukum dengan penjara setinggi-tingginya enam tahun atau denda uang sebanyak f 300, dalam *Soeara Tampang*, 31 Agustus 1925.

<sup>24</sup> *Soeara Tampang*, 31 Desember 1925.

<sup>25</sup> *Soeara Tampang*, 4 Desember 1925.

<sup>26</sup> Fasal 153 Bis, “Barang siapa, jang sengadja melahirkan dengan perkataan, toelisan ataoe gambar, jang bermaksoed, baik sindiran, baik tengah-tengah atau bisa didoega-doega, mengganggoe ketenteraman oemoem, baik berkehendak atau setudjoe dengan angan-angan jang mendjatoehkan ato menjerang dari kekoesaan di negeri Belanda ataoe di Indonesia, akan dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja enam tahoen ataoe denda wang setinggi-tingginja tiga ratoes roepiah”. Fasal 156 TER, “Barang siapa jang menjetoejoei ataoe menjebarkan dengan toelisan ataoe gambar, jang bermaksoed baik sindiran, baik tengah-tengah ataoe dengan perkataan lain, jang bisa menjebarkan kegadoehan ketenteraman oemoem, ataoe mendjatoehkan ataoe menjerang kekoesaan jang ada di negeri Belanda ataoe di Indonesia, dengan maksoed itoe dioemoemkan ataoe membesarkan, menjebat, memberitahukan pada oemoem ataoe berkata, akan dihoekoem dengan hoekoeman pendjara setinggi-tingginja lima tahoen ataoe denda wang setinggi-tingginja tiga ratoes roepiah”, dalam *Si Tetap*, Mei 1926.

<sup>27</sup> Dalam sebuah tajuk rencana berjudul “Sedia Payung Sebelum Hujan” yang membahas perselisihan antara Inggris dan Jerman dalam memperebutkan ladang minyak di Mosul Irak yang masih merupakan kekuasaan Turki. Tajuk rencana tersebut menggambarkan kerakusan kaum kapitalis dan bencana tersebut pun sedang mengancam tanah air. Tajuk rencana tersebut pula yang mengakhiri riwayat *Panas*. Lihat Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. (Jogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hlm 120.

sehingga pada saat itu juga selama setengah jam dilakukan musyawarah, dan diputuskan bahwa penanggung jawab redaksi *Soeara Tambang* dan *Panas* dipercayakan kepada A. Muluk Nasution yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris PKBT Sawah Lunto.<sup>28</sup> A. Muluk Nasution dan beberapa rekan yang tersisa tetap berupaya menjalankan surat kabar hingga Maret 1926 dengan bantuan dari pemimpin-pemimpin di Silungkang, sedangkan kepemimpinan PKBT dipegang oleh Kasan Widjojo.<sup>29</sup>

Selain menggunakan media surat kabar, organisasi PKBT juga memanfaatkan media cetak lainnya berupa kertas edaran yang berisikan tulisan-tulisan lepas dari para propagandis PKBT. Surat edaran tersebut disebarakan lewat perorangan di dalam tambang. surat edaran yang cukup menarik perhatian pada masa itu adalah tulisan yang menyorot tentang penyalahgunaan kekuasaan di tambang oleh orang-orang Eropa yang dijuluki “buaya putih” yang telah menelan kaum pribumi. Surat edaran ini ditulis oleh Idroes, salah seorang redaktur dan kontributor surat kabar *Soeara Tambang*, namun edaran ini mendapat kecaman dari Pemerintah, sehingga pada bulan Februari 1926 Idroes pun ditangkap oleh Pemerintah.

### **3.3 Pergerakan Kaum Buruh Tambang Batubara Ombilin**

#### **3.3.1 Dinamika Kehidupan Politik Kaum Buruh Tambang**

Propaganda untuk mendirikan organisasi buruh di bawah naungan bendera komunis telah muncul sejak tahun 1920-an, yakni dengan terlibatnya tokoh-tokoh buruh dalam kampanye terbuka di beberapa tempat umum di Sawah Lunto. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah buruh kontrak, buruh bebas, dan buruh paksa yang ada pada perusahaan tambang batubara Ombilin. Awalnya ideologi komunis yang disebarakan tidak murni diikuti pengikutnya, karena adanya

<sup>28</sup> Abdul Muluk Nasution, *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm 60.

<sup>29</sup> Kasan Widjojo adalah seorang tokoh buruh beretnis Jawa yang pernah bekerja sebagai buruh kontrak pada perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Dikarenakan keterlibatannya dalam kegiatan komunis dan karena tulisannya dalam surat kabar *Soeara Tambang* edisi 31 Juli 1925 yang dianggap menentang pemerintah, pada tahun tersebut ia dipulangkan kembali ke tanah Jawa. Namun kendati ia berada di Jawa ia tetap menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh komunis di Sumatera Barat, hal ini terbukti dengan kembalinya ia dan terlibat dalam pemberontakan Silungkang 1926/1927, dan ia pun dipercaya menjadi pemimpin salah satu rombongan pemberontak.



akulturasi dengan ideologi lain yaitu Islam dan Nasionalis. Ketiga ideologi inilah yang mempersatukan dan membangkitkan gerakan menentang dominasi kekuasaan Belanda pada perusahaan tambang batubara Ombilin. Banyaknya buruh yang memilih bergabung menjadi anggota komunis dalam sebuah organisasi buruh lebih dikarenakan oleh penindasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang terhadap mereka, terutama terhadap buruh paksa yang terasa sangat menyakitkan, sehingga para buruh pun menyimpan dendam dan amarah terhadap perusahaan. Semenjak masuknya orang-orang yang tergabung dalam organisasi buruh ke dalam tambang, semua bentuk protes itu berubah menjadi pemogokan yang bersifat terang-terangan menentang pihak perusahaan.

PKBT adalah organisasi buruh yang berhasil masuk ke dalam wilayah pertambangan melalui beberapa kadernya yang bekerja di dalam tambang. Bagi buruh tambang, PKBT adalah sebuah sarana untuk memperjuangkan ketidakadilan yang selama ini dirasakan dan menjanjikan sebuah kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Organisasi buruh membuat suatu perbedaan, yakni mentransformasikan politik perlawanan buruh yang bersifat individual menjadi protes yang terorganisir. Pada awalnya buruh melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dari tambang atau melakukan perkelahian dengan sesama buruh agar terhindar dari pekerjaan yang tidak dikehendakinya. Di dalam organisasi PKBT, buruh merasakan hawa yang berbeda karena antara buruh rendahan, karyawan, pedagang kecil dan penduduk setempat tidak terdapat jurang pemisah yang membuat mereka merasa direndahkan.

Organisasi PKBT mampu menjadi jembatan penghubung perbedaan etnis di antara anggotanya. Melalui organisasi inilah buruh mulai mengenal hak dan kewajibannya yang sebenarnya, serta hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pihak perusahaan kepada mereka. Dengan bergabungnya buruh-buruh dari berbagai tingkatan pekerjaan di tambang batubara Ombilin, secara tidak langsung para buruh membentuk sebuah kekuatan sosial untuk menentang pemerintah Belanda di perusahaan tambang batubara Ombilin. Mereka ikut bergabung dengan penduduk setempat, pemimpin-pemimpin PKI, dan Sarekat Rakyat guna menyampaikan protes mereka pada pihak perusahaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Erwiza, *op. cit.*, hlm 194-195

Di wilayah perintis Selatan,<sup>31</sup> seperti Silungkang dan Sawah Lunto, permasalahan ekonomi serta dampak dari dominasi kekuasaan Belanda yang intensif di berbagai sektor kehidupan masyarakat setempat, menjadi penyebab utama keterlibatan mereka dalam protes-protes bahkan sampai pada masa pemberontakan. Selama tahun 1926, di samping buruh, penduduk setempat pun mulai terlibat dalam pergolakan yang merupakan pencerminan dari ketegangan mental antar berbagai kalangan. Di daerah Ombilin, propaganda komunis untuk contoh menyuarakan slogan “tambang harus dikitakan”, sangat cocok dengan situasi dan keluhan dari masyarakat setempat.<sup>32</sup> Mengingat sejak didirikannya perusahaan tambang batubara Ombilin di daerah Sawah Lunto, penduduk setempat belum pernah merasakan secara langsung manfaat dari pembangunan daerahnya yang telah berubah menjadi kawasan industri tambang kolonial.

Semenjak adanya aturan yang melarang mengadakan rapat-rapat dan pemberangusan surat kabar, situasi makin panas, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak organisasi buruh beserta masyarakat setempat. Pemerintah Kolonial berupaya meningkatkan pengamanan di berbagai tempat dengan menambah jumlah petugas keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan kota dan membuat portal-portal di depan pemukiman petinggi-petinggi Belanda. Di dalam tambang perusahaan menambah jumlah mandor dalam mengawasi kinerja buruh. Mandor yang dipekerjakan umumnya adalah mandor yang berasal dari etnis Jawa dan mandor Indo Eropa. Akan tetapi usaha dari Pemerintah Belanda tersebut semakin menguatkan gejolak perlawanan dari kaum buruh dan penduduk setempat. Hal ini terbukti, buruh bersama penduduk setempat dan organisasi buruh seperti PKBT, *Sarikat Rakyat* dan PKI pada malam pergantian tahun 1926/1927 melakukan pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Belanda di perusahaan tambang batubara Ombilin.

---

<sup>31</sup> Wilayah perintis selatan adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut wilayah perbatasan Selatan mencakup wilayah Sawah Lunto dan sekitarnya yang berpenduduk jarang, dan berhutan luas. *Ibid.*, hal 186.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 185.

### 3.3.2 Pecahnya Pemberontakan Silungkang 1927 dan Reaksi Pemerintah Hindia Belanda.

Melalui kemampuan organisasi yang efektif dari orang-orang komunis untuk mengemas aspirasi masyarakat ke dalam satu gerakan emansipasi sosial, makin menyadarkan rakyat bahwa mereka sedang ditindas oleh rezim penguasa kolonial.<sup>33</sup> Gagasan untuk mengangkat senjata melawan dominasi kekuasaan pemerintah Belanda makin menggebu-gebu dalam jiwa orang Minangkabau, terutama bagi buruh di perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Pada tahun-tahun menjelang pemberontakan terjadi, terdapat perpaduan dari beberapa kelompok dalam masyarakat Minangkabau yang anti Belanda, mulai dari komunitas pedagang, ulama, guru-guru, sejumlah pemimpin nagari, aktivis politik, hingga buruh.

Menjelang pemberontakan di malam pergantian tahun 1926/1927, ada tiga pusat utama kegiatan politik radikal dan perlawanan terhadap kekuasaan penjajah di wilayah Sumatera Barat, yaitu Padang Panjang, Silungkang dan Padang. Lingkungan kegiatan politik beserta ciri dari pergerakan yang terjadi di tiga daerah ini sangat berlainan. Di daerah Padang Panjang berdiri sekolah-sekolah modernis Islam setingkat MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) atau sekolah menengah bernama Sumatra Thawalib dan Perguruan Diniyyah. Mulai tahun 1920-an, perguruan-perguruan agama ini menjadi tempat pertautan antara agama dan politik radikal, dan sekolah-sekolah ini pula yang menjadi basis utama bagi PKI dan *Sarikat Rakyat*. Para guru dan murid sekolah agama modernis ini meyakini bahwa ajaran komunis dan Islam memiliki pandangan yang sama dalam perjuangan melawan kekuasaan kaum kafir (pemerintah kolonial Belanda).

Berbeda dengan di daerah Silungkang, gagasan politik radikal sampai di daerah ini melalui hubungan dagang daerah ini dengan daerah lain, terutama dari daerah tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Para saudagar yang membuka usaha di sekitar tambang terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sarikat pekerja dan politik radikal buruh tambang Ombilin. Di Padang,

---

<sup>33</sup> Bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau, bergabung ke dalam *Sarekat Rakyat* atau pun SI Merah adalah sebuah bentuk usaha untuk menentang kekuasaan kolonial. Mereka tidak peduli apakah *Sarekat Rakyat* atau SI Merah itu komunis atau bukan. Lihat Abdul Muluk, *op. cit.*, hlm 117.

perkembangan kegiatan politik radikal terjadi karena adanya peran dari saudagar besar pribumi yang memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dan perhimpunan sosial serta keagamaan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan anti penjajahan.

Sebelum mengadakan pemberontakan, diadakan pertemuan di daerah Silungkang<sup>34</sup> tepatnya di kediaman Samponi Kayo<sup>35</sup> pada tanggal 31 Desember 1926. Di tempat ini disusun rencana operasi pemberontakan,<sup>36</sup> yaitu:

1. Barisan Perang, yang terdiri dari barisan inti dan barisan cadangan. Barisan inti terdiri dari anggota-anggota militer garnisun Sawah Lunto yang dipimpin oleh mantan Sersan Mayor Pontoh dan mantan Sersan Rumuat.<sup>37</sup> Barisan cadangan terdiri dari lima barisan, yakni barisan dari Tanjung Ampalu yang dipimpin oleh Munaf dan Mohammad Zen, barisan dari Silungkang dipimpin oleh Latief dan Wahid, barisan dari Tarungtarung dipimpin oleh Abdul Muluk, barisan dari Muaro Kalaban dipimpin oleh Karim Marokko dan Muluk Caniago, dan barisan dari Sawah Lunto dipimpin oleh Kasan Wijoyo dan Rajo Bujang yang terdiri dari anggota Sarikat Rakyat dan buruh tambang batubara Ombilin.
2. Barisan Khusus, yaitu barisan pengawal yang terdiri dari Sarikat Hitam<sup>38</sup> dipimpin oleh Kamaruddin gelar Manggulung, Yusuf Sampono Kayo, dan Berahim beserta puluhan anggota.

<sup>34</sup>Silungkang merupakan daerah yang bentang alamnya berbukit-bukit dan tanahnya tandus, sehingga banyak dari anak nagarinya bergiat di sektor perdagangan, atau membuat kerajinan seperti tenun Silungkang, disamping pergi merantau ke tanah Jawa.

<sup>35</sup>Berdasarkan jawaban Sampono Kayo dalam persidangan pemeriksaan pelaku pemberontakan Silungkang tanggal 18 Juni 1927, ia terpaksa memberikan izin untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat rapat sebelum pemberontakan berlangsung. Hal ini dilakukannya dikarenakan ancaman dari pemimpin komunis bahwa ia akan dibunuh, sehingga dengan terpaksa ia menuruti perintah tersebut. Lengkapnya lihat *Bendera Islam*, 27 Juni 1927 dan 30 Juni 1927.

<sup>36</sup>Abdul Muluk Nasution, *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm 98-99.

<sup>37</sup>Mantan Sersan Mayor Pontoh dan mantan Sersan Rumuat adalah dua orang Menado yang dipecat dari dinas ketentaraan Belanda karena dituduh terlibat dan bergabung dengan komunis. Pada tahun 1920-an garnisun militer Belanda Sawah Lunto terdiri dari 30 orang dibawah tiga orang komandan Belanda dan komandan terendah berasal dari Indonesia, dan umumnya berasal dari Menado, Ambon, Aceh, dan Batak. Lengkapnya lihat Harry J. Benda, dan Ruth T. McVey, *The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. (Ithaca, New York: Cornell University, 1960) hlm 161.

<sup>38</sup>Organisasi ini didirikan di Padang pada bulan April 1926 untuk menggerakkan aksi-aksi PKI yang bersifat illegal berupa terror dan intimidasi. Lihat, *Ibid.*, hlm 90.

Rencana yang dibuat dalam rapat di Silungkang tersebut menetapkan Sawah Lunto sebagai fokus utama pemberontakan yang akan dilaksanakan pada tengah malam tanggal 1 Januari 1927. Sasaran utama dari pemberontakan adalah merampas sejumlah kantor Pemerintah dan membunuh pegawainya, menyerang gedung *Societeit* Sawah Lunto, menyerang perusahaan tambang batubara Ombilin, membunuh sejumlah pejabat tinggi yang tinggal di kompleks perusahaan, melepaskan semua tawanan politik, hingga akhirnya dapat menguasai wilayah Sawah Lunto secara keseluruhan.<sup>39</sup>

Barisan Perang bertugas untuk membunuh sejumlah pejabat Pemerintah, termasuk kepala nagari dan orang-orang yang dipandang loyal pada kekuasaan kolonial. Selain itu, sebagian dari mereka ada yang dikirim ke Muara Kalaban untuk merebut pos polisi dan penjara tua yang ada di daerah itu. Pukul 23.00 malam mereka sudah mulai beraksi sesuai dengan sasaran masing-masing.<sup>40</sup> Aksi pertama yang dipimpin oleh Salim Emek, membunuh Muhammad Djamil gelar Rang Kajo Nan Gadang yang merupakan kepala nagari Silungkang, dan sasaran selanjutnya adalah tiga orang guru: Mahmud, Djumin dan Rahman. Pada pukul 01.00 pemberontak bergerak untuk menyudahi kepala stasiun kereta api Silungkang, namun sasaran berhasil melarikan diri.

Dalam perjalanan menuju Sawah Lunto, rombongan Silungkang lainnya yang dipimpin oleh Karim yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan melintasi barak-barak tentara Belanda, tidak menyadari adanya sekelompok barisan tentara Belanda bersenjata yang sedang piket, sehingga mereka pun dihadang oleh pasukan tentara kolonial, dan pasukan inilah yang berhasil menumpas dan mematahkan serangan para pemberontak tersebut. Sama halnya dengan rombongan A. Muluk, ketika hendak melanjutkan perjalanan menuju Sawah Lunto, mereka dihadang oleh pasukan tembak Pemerintah, sehingga mereka pun tertangkap dan beberapa orang pemberontak roboh. Penghadangan terjadi karena rencana serangan yang terjadi sudah diketahui oleh pihak

---

<sup>39</sup> Daftar korban yang menjadi sasaran dalam pemberontakan Silungkang 1927 pada Lampiran 5.

<sup>40</sup> Selain di daerah Silungkang dan Sawah Lunto, aksi juga terjadi di beberapa daerah kecil lainnya, diantaranya Siaro-aro, Aia Luo, Sijantang, Pemuatan, Padang Laweh, Pianggu, Tak Boncah, Tanjung Ampalu, Sepajang, Padang Sibusuk, Tarung-tarung, Kampung Baru, Kabun, dan Sijunjung. Lihat Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 51.

pemerintah Belanda beberapa saat setelah tertangkapnya mantan Sersan Pontoh dan mantan Sersan Rumuat, sehingga ketika serangan muncul pemerintah sudah siap dengan sejumlah pasukan di beberapa titik yang dicurigai menjadi sasaran pemberontakan.<sup>41</sup>

Pemberontakan yang terjadi pada malam pergantian tahun 1926/1927 tersebut menelan banyak korban dari pihak pemberontak, baik korban luka-luka, tertangkap, dan meninggal dunia.<sup>42</sup> Perlawanan masih berlanjut pada hari-hari berikutnya, terutama di daerah Muara Kalaban, Padang Sibusuk dan Tanjung Ampalu. Pada tanggal 4 Januari 1927, rombongan pemberontak dari kelompok Abdul Manaf berhasil memusnahkan satu kompi serdadu Belanda yang sedang berpatroli untuk melakukan penangkapan di tiga daerah tersebut. Dalam pertempuran sengit tersebut hampir seluruh pasukan Belanda tewas termasuk pemimpin mereka, Letnan Simon.<sup>43</sup>

Pemerintah Belanda sangat terkejut dengan serangan yang terjadi pada malam pergantian tahun tersebut, kendati mereka telah mengetahui akan terjadi gerakan perlawanan menentang Pemerintah terutama dari para pemimpin gerakan yang pernah tertangkap sebelumnya.<sup>44</sup> Pada saat itu, Pemerintah berupaya mengerahkan semua pasukan yang ada di Sawah Lunto, *Fort de Kock*, Solok, Muara Kalaban, dan Padang Panjang. Hingga tanggal 12 Januari 1927, pemerintah berhasil menangkap kurang lebih 1300 orang yang diduga terlibat dalam pemberontakan itu dan Pemerintah pun berhasil menyita ratusan bom, senjata api, dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan pihak pemberontak.<sup>45</sup> Setelah melakukan pembersihan dan pengamanan, maka Pemerintah pun melakukan proses pengadilan orang-orang yang terlibat pemberontakan.<sup>46</sup> Hal ini menelan waktu yang sangat lama karena banyaknya kasus yang harus disidangkan, sedangkan jumlah hakim yang mampu menangani kasus ini sangat terbatas.

Berat ringan vonis yang dijatuhkan tergantung pada kedudukan, keterlibatan, dan perbuatan tersangka dalam pemberontakan. Ada yang divonis

---

<sup>41</sup> Harry J. Benda, dan Ruth T. McVey, *op.cit.*, hlm 172.

<sup>42</sup> Daftar orang-orang yang menjadi korban pada pemberontakan Silungkang 1926/1927 baik dari pihak pemberontak maupun dari pihak pemerintah (Lampiran 5)

<sup>43</sup> *Kolonial Verslag, Bijlage B II*, 1928.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Kolonial Verslag, Bijlage B II*, 1927, hlm 8.

<sup>46</sup> Daftar pelaku pemberontakan yang tertangkap dan diadili (Lampiran 10)

hukuman penjara satu bulan, tiga bulan, satu tahun, lima tahun, dua puluh tahun, bahkan ada yang divonis hukuman mati. Mereka yang mendapat hukuman dibawah dua tahun dijebloskan ke dalam penjara Sawah Lunto, sedangkan yang diatas dua tahun dikirim ke beberapa penjara di Jawa, seperti penjara Glodok, Cipinang, Ambarawa, Sragen, Surabaya, Pamekasan Madura, dan ke Digul. Namun, dari ribuan tawanan, ada pula yang dilepaskan karena mereka tidak terbukti bersalah. Begitu banyaknya yang terlibat dalam pemberontakan tersebut, sehingga pengadilan Sawah Lunto akhirnya dapat menyelesaikan perkara-perkara pada bulan September 1928.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. (Jogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hlm 145.

**BAB 4**  
**VEREENIGING BOEMIPOETRA STAATSSPOOR, TRAMWEGEN,**  
**OMBILINMIJNEN EN LANDSAUTOMOBIELDIENSTEN OP SUMATRA**  
**(VBSTOL)**

**4.1 Dari Politik Perlawanan ke Politik Akomodasi hingga Depresi Ekonomi Hindia Belanda.**

Setelah peristiwa pemberontakan Silungkang 1926/1927 berhasil ditumpas oleh tentara kolonial, Pemerintah Kolonial makin mempersempit ruang gerak bagi organisasi-organisasi politik. Disamping itu, depresi ekonomi yang terjadi tahun 1929<sup>1</sup> membuat pemerintah kolonial memberlakukan aturan yang semakin ketat di tanah jajahannya. Krisis ekonomi dunia ini membuat segala aspek kehidupan di pertambangan, baik buruh, perusahaan tambang batubara Ombilin maupun masyarakat yang hidup di sekitar tambang batubara Ombilin Sawah Lunto berubah. Pada sektor pertambangan, depresi ekonomi menyebabkan perusahaan mengurangi produksi batubara. Hal ini dilakukan karena turunnya nilai ekspor hasil tambang di pasar internasional yang membuat Pemerintah terpukul.<sup>2</sup> Langkah utama yang diambil oleh perusahaan adalah peningkatan efisiensi dan mencegah merebaknya korupsi. Perusahaan mulai menerapkan pengendalian yang lebih ketat dalam pendistribusian makanan dan disiplin kerja, terutama bagi buruh kontrak,<sup>3</sup> guna mengurangi pengeluaran biaya yang dirasa tidak perlu. Selain itu perusahaan juga melakukan pengurangan tenaga kerja dari kalangan pekerja Eropa<sup>4</sup> dan mengangkat tenaga kerja Indo-Eropa serta menaikkan pangkat mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Depresi ekonomi disebabkan oleh jatuhnya harga saham di New York yang berakibat pada jatuhnya harga bahan mentah, sehingga hal ini berdampak pada perdagangan internasional yang semakin memburuk, dan ditambah pula dengan jatuhnya indeks harga seluruh penjualan hasil pertanian dunia. Keadaan ini membuat Negara-negara Eropa pemilik koloni-koloni penghasil bahan mentah seperti Belanda ikut mengalami keterpurukan.

<sup>2</sup> J.H. Boek, *The Evolution of the Netherland Indie Economi*. hlm 32.

<sup>3</sup>Terhitung 14 Agustus 1929, perusahaan memberlakukan aturan untuk mengontrol pemberian jatah makanan terhadap buruh. Bagi buruh yang tidak bekerja tanpa alasan yang sah maka tidak dibenarkan menerima jatah makanan dan jatah makanan dibagikan ditempat buruh tersebut bekerja.

<sup>4</sup>Sebagian dari pekerja Eropa dipulangkan ke Negara asalnya, mengingat keuntungan perusahaan yang semakin menurun. Dengan dipulangkannya sebagian dari pekerja Eropa ini perusahaan dapat menghemat anggaran untuk penyediaan fasilitas-fasilitas bagi pegawai Eropa tersebut dialihkan



Krisis yang terjadi tersebut diikuti oleh tekanan politik Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran cukup besar dalam kehidupan sosial masyarakat Sawah Lunto. Dalam perusahaan tambang, keberadaan orang Eropa mulai digeser oleh orang-orang Indo-Eropa yang umumnya adalah lulusan dari Sekolah Pertambangan Sawah Lunto<sup>6</sup> dan mereka dididik untuk dipekerjakan sebagai pengawas junior. Mereka bertugas sebagai jembatan penghubung antara buruh dan mandor.<sup>7</sup> Keunggulan dari orang-orang Indo-Eropa lainnya adalah mereka lebih mendapat tempat dihati penduduk setempat, karena rata-rata orang-orang Indo-Eropa tersebut bermukim di sekitar rumah penduduk bersama dengan anggota keluarganya, dan mereka pun mampu menguasai bahasa penduduk setempat, sehingga mempermudah interaksi dan memperkecil perbedaan sosial diantara mereka.

Depresi ekonomi dunia telah mengubah wajah masyarakat pertambangan, termasuk di daerah Sawah Lunto. Pemerintah memperketat pengamanan kota dengan menambah jumlah polisi lapangan dan *pasukan preman*<sup>8</sup> untuk melindungi kota dari kemungkinan terulangnya peristiwa pemberontakan oleh pihak-pihak yang menentang Pemerintah. Pengawasan dan pengendalian ketat ini membawa dampak, yaitu berkurangnya aktivitas buruh dan peran tokoh-tokoh politik dalam gerakan-gerakan buruh terdahulu. Krisis ekonomi dan tekanan politik Pemerintah membuat sirnanya semangat politik konfrontasi penambang Ombilin. Hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan dalam latar belakang lapisan personil tinggi dan menengah yang diwakili oleh orang Eropa dan Indo. Kehadiran mayoritas

---

untuk modal produksi, sehingga kendati keuntungan perusahaan mengalami penurunan, tetap dapat diminimalisir dengan mempertahankan produksi di tambang.

<sup>5</sup>Perusahaan mengangkat tenaga kerja Indo-Eropa karena mereka digaji lebih rendah dibandingkan tenaga kerja Eropa, sehingga hal ini dapat mengurangi biaya produksi dalam hal pembayaran gaji pegawai perusahaan.

<sup>6</sup>Sekolah Pertambangan dibuka di Sawah Lunto pada tahun 1918 dengan konsep pendidikan yang mengkombinasikan antara teori dan praktek. Tujuan utama dibukanya sekolah ini adalah untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja terampil pada perusahaan pertambangan milik Negara di Hindia Belanda. Di sekolah ini siswa tidak saja diberikan materi tulis tentang pertambangan, tetapi juga diterjunkan langsung ke dalam tambang bersama-sama dengan buruh tambang lainnya.

<sup>7</sup>Ada dua kategori pengawas, yaitu pengawas junior dan senior. Pengawas terdiri dari pengawas Indo-Eropa dan pribumi, dan yang membedakan mereka hanya dalam hal tingkat pengalaman kerja. Ada kalanya pengawas pribumi yang menduduki posisi pengawas junior, dan sebaliknya. Sedangkan untuk seorang mandor, ia diangkat berdasarkan pada kemampuannya untuk mengatur sebuah regu dalam bekerja dan memiliki kekuatan fisik serta keberanian.

<sup>8</sup> Pasukan preman adalah istilah yang biasa digunakan penduduk setempat untuk menyebut sekelompok orang-orang berbadan tegap, berperawakan garang, berotot dan biasanya memiliki ilmu kebal.

orang Indo yang mampu berbahasa Jawa, Minang, dan Melayu ini membuat kondisi kehidupan sosial di antara penambang semakin dinamis. Orang Indo mampu menjangkau berbagai lapisan dalam masyarakat, termasuk kalangan pribumi yang bekerja pada tingkat rendah di perusahaan. Mereka membentuk asosiasi-asosiasi yang mempersatukan masyarakat dari berbagai kalangan berdasarkan pada kegemaran, asal usul dan tempat kerja mereka, sehingga dalam asosiasi ini masyarakat dapat merumuskan serta mengungkapkan pendapat mereka dalam berbagai hal.

Adapun asosiasi yang lahir setelah pemberontakan Silungkang 1926/1927 hingga berakhirnya kekuasaan Pemerintah Kolonial di Sumatera Barat, di antaranya *Club Silaturrahim*,<sup>9</sup> VIM atau *Vereeniging van het Inheemse Personeel van het Mijnwezen* (Asosiasi Personil Pribumi Pertambangan), dan SIPOM atau *Societeit van het Inheemse Personeel van het Mijnwezen* (Klub Personil Pribumi Pertambangan).<sup>10</sup> Kehadiran asosiasi-asosiasi ini menjadi salah satu tanda perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat di tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Asosiasi ini menjadi suatu forum solidaritas dan diskusi bagi para buruh, pegawai Indo-Eropa, dan masyarakat setempat untuk membicarakan wacana-wacana yang berkembang di tempat mereka bekerja ataupun mendiskusikan isu-isu lain yang berkembang di luar komunitas mereka.

Pada tingkat buruh, perubahan terjadi dalam hal komposisi angkatan kerja dan menurunnya angka kekerasan. Hal ini terjadi karena kuli-kuli paksa yang mayoritas adalah napi, diisolasi dalam satu kamp khusus, sehingga interaksi antara mereka dengan buruh lainnya hanya terjadi di tempat kerja dan terbatas. Setelah pemberontakan 1927, pihak perusahaan melakukan perubahan dengan meningkatkan jumlah pekerja/buruh bebas dan musiman serta mengurangi secara perlahan pekerja dari kalangan buruh paksa. Kehidupan di pertambangan makin memperlihatkan perbaikan dari waktu ke waktu, dan perusahaan pun mulai

<sup>9</sup>Asosiasi ini dibentuk pada tahun 1931, dipimpin oleh Haroen. S (juru tulis di Ombilin) bersama dengan Hamzah SK. Asosiasi ini beranggotakan 50 orang dan berhasil melakukan tawar-menawar dengan para pedagang untuk mensuplai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah. *Sinar Sumatera*, 1 Mei 1931.

<sup>10</sup>VIM dan SIPOM didirikan pada bulan Juli 1937. *Sinar Sumatera*, 28 Juli 1937, dan 23 Nonember 1937.

memperhatikan tingkat kesejahteraan serta kesehatan buruh.<sup>11</sup> Bahkan untuk menarik minat penduduk setempat agar bekerja kembali dipertambangan, manajer tambang batubara Ombilin memberlakukan kebijakan baru dalam hal pembayaran upah buruh dengan memakai sistem *natura*<sup>12</sup> dan memberi premium/upah tambahan<sup>13</sup> kepada penambang yang telah bekerja dengan optimal.

Selain semakin membaiknya kondisi di pertambangan, perubahan politik masyarakat pertambangan juga didukung oleh kehadiran anggota keluarga di sekitar pekerja tambang. Kehadiran anggota keluarga di lingkungan buruh mampu menunjang kehidupan ekonomi buruh itu sendiri, karena selain memperoleh penghasilan dari upah dipertambangan, anggota keluarga buruh pun umumnya melakukan usaha sampingan untuk menambah keuangan keluarga dengan berjualan *penganan* disekitar tambang. Pada tahun 1931, perusahaan pun mulai memperkenalkan teknologi baru kepada buruh dipertambangan,<sup>14</sup> sehingga tingkat kecelakaan kerja buruh mengalami penurunan<sup>15</sup> dan pihak perusahaan pun makin memperhatikan tingkat kesehatan buruh yang bekerja di pertambangan. Selain itu, perlakuan mandor di dalam tambang pun makin membaik dan lebih manusiawi. Mandor lebih bersikap damai terhadap kuli-kuli tambang karena kehidupan mandor pun sangat bergantung pada tambang terutama pada masa krisis berlangsung.

---

<sup>11</sup>Erwiza. *op. cit.*, hlm 210-211.

<sup>12</sup>Untuk kuli musiman dibayarkan upah berupa beras, kacang tanah, serta ikan asin untuk 10 hari kerja. *Sinar Sumatra*, 19 Juli 1940.

<sup>13</sup>Pemberian upah tambahan terjadi jika batubara yang dihasilkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan jika tingkat kehadiran sepenuh waktu minimal selama enam bulan, sehingga buruh pun berhak mendapatkan insentif tersebut.

<sup>14</sup>Pada sistem kerja yang lama kuli membawa batubara ke tempat pengumpulan di tambang dengan lori sederhana. Namun setelah pengenalan teknologi baru, buruh melakukan pengangkutan batubara secara otomatis dengan ban berjalan. Akan tetapi pengenalan teknologi ini membutuhkan waktu untuk membangun keterampilan dari buruh agar mampu mengoperasikan alat tersebut.

<sup>15</sup> Pada tahun 1930 jumlah kuli yang mengalami kecelakaan kerja adalah 370 orang, dan di tahun 1931 menurun menjadi 232 orang, hingga akhirnya pada tahun 1933 angka tersebut semakin turun hingga mencapai 113 orang. Lihat Erwiza, *op.cit.*, hal 211.

## 4.2 Lahir dan Berkembangnya *Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilijnmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra* (VBSTOL)

### 4.2.1 Dari VB PSS (*Vereeniging Boemi Poetera Staatsspoor*) ke VBSTOL 1922-1934

VB PSS (*Vereeniging Boemi Poetera Staatsspoor*) atau Organisasi Pegawai Kereta Api Bumiputera Sumatera didirikan pada tanggal 18 Mei 1922 berdasarkan keputusan *Gouvernement Besluit* no. 85 tertanggal 18 Mei 1922. Perkumpulan ini dibentuk oleh kalangan pribumi yang terbatas untuk pegawai negeri atau orang-orang bergaji bulanan yang masuk dalam Kelompok A.<sup>16</sup> Namun, dalam perkembangannya organisasi ini tidak berjalan dengan semestinya, karena mayoritas dari kalangan pekerja pribumi yang bekerja pada perusahaan Pemerintah hanya masuk dalam golongan rendah. Akhirnya organisasi ini tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah organisasi yang menaungi pekerja-pekerja dari berbagai kalangan pekerja, termasuk pekerja pribumi. Setelah berakhirnya peristiwa pemberontakan Silungkang diakhir tahun 1926, organisasi ini mulai bergerak memperluas ruang lingkup organisasinya melalui kerjasama dengan salah seorang tokoh muda pemerhati pendidikan bernama M.Sjafei untuk mendirikan sebuah sekolah di daerah Kayu Tanam.

Pada tahun 1926, VB PSS bersama M.Sjafei bekerjasama membangun sebuah sekolah yang diberi nama INS (*Indonesische Nederlandsche School*) Kajoe Tanam yang menampung anak-anak dari anggota VB PSS yang tidak diterima disekolah-sekolah umum sekelas HIS<sup>17</sup> dan siswa yang telah *drop-out* dari sekolah tersebut. Melalui sekolah tersebut VB PSS berharap dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak-anak pribumi dan memperkenalkan pada masyarakat bahwa kegiatan organisasi ini sangat menjunjung tinggi kemajuan dunia pendidikan anak negeri. Namun bantuan yang diberikan oleh organisasi ini hanya seadanya mengingat anggota dari organisasi masih terbatas, sehingga uang yang dikumpulkan untuk pendirian sekolah pun terbatas. Barulah pada Desember

<sup>16</sup>Golongan A terbagi atas dua kelompok yaitu golongan A 18 dan Golongan A. Golongan A 18 berasal dari peranakan Belanda dan orang Belanda, sedangkan Golongan A adalah penduduk pribumi yang terdiri dari buruh paksa, buruh kontrak dan buruh bebas.

<sup>17</sup>HIS (*Holland Inlansche School*), merupakan sekolah yang disediakan untuk anak-anak bumiputra dari lapisan atas seperti anak-anak dari kepala pemerintah bumiputra.

1928, organisasi ini mengupayakan untuk menghidupkan kembali kegiatan organisasinya dengan mengajukan legalitas pendirian sebuah organisasi kepada Pemerintah, untuk mendapat bantuan keuangan sekaligus mengumumkan kembali keberadaan organisasi VBPS kepada masyarakat luas dan setahun kemudian barulah pengajuan tersebut disahkan oleh Pemerintah.

Karena ruang lingkup kerja organisasi ini makin diperluas maka pada tanggal 10 Oktober 1929 namanya diubah menjadi VBSTOL (*Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinmijnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra*) atau Organisasi Pegawai Kereta Api, Trem, Tambang Ombilin dan Angkutan Darat di Sumatera. Ruang lingkup organisasi tidak hanya sebatas pada pegawai pribumi yang bekerja pada perusahaan kereta api di Sumatera Barat. Akan tetapi juga pegawai pribumi yang bekerja pada perusahaan milik pemerintah Belanda yang tersebar dari Aceh hingga Lampung, mulai dari pegawai kereta api hingga tambang batubara. Organisasi ini bertujuan untuk memperbaiki nasib kaum pekerja dari segala golongan pekerjaan dan jabatan agar hidup lebih baik dan melalui kegiatan organisasinya tersebut diharapkan dapat memajukan pendidikan anak negeri.

Kantor pusat VBSTOL berada di Sawahan No. 84 Padang,<sup>18</sup> satu kantor dengan sekretariat redaksi surat kabar *Pertimbangan* yang menjadi corong publikasi bagi organisasi ini. Selain di Padang, VBSTOL juga memiliki kepengurusan dan kantor cabang di beberapa daerah kecil di Sumatera Barat, di antaranya di *Fort de Kock*, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Sawah Lunto dan Payakumbuh. Masing-masing daerah memiliki pengurus sendiri-sendiri sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam *statuten* VBSTOL. Namun demikian, antara VBSTOL daerah dan pusat tetap ada koordinasi yang baik.<sup>19</sup> Berikut ini adalah susunan pengurus pusat VBSTOL<sup>20</sup> di Padang:

- Ketua : A. Rachman
- Wakil Ketua : Zainoedin galar Marah Maharja.
- Sekretaris I : L. Wahid

<sup>18</sup>Berdasarkan pengumuman dari surat kabar *Pertimbangan*, 15 Juni 1930, kantor redaksi dan administrasi VBSTOL dan *Pertimbangan* pindah ke Sawahan No. 97 Padang.

<sup>19</sup>Koordinasi yang dimaksud adalah dalam penetapan kebijakan-kebijakan umum seperti penetapan besarnya uang *contributie* yang akan dibebankan pada anggota, dan pemilihan kepengurusan VBSTOL untuk setiap cabang.

<sup>20</sup>*Pertimbangan*, 15 November 1929.

- Sekretaris II : Mohamad Said galar Sutan Toemanggoeng.
- Bendahara : Hakim galar Datoek Bangso Diradjo
- Komisaris-komisaris : Mohamad Noerdin galar Bagindo Soeleman, Abdul Madjid galar Bagindo Sinaro, Abdullah galar Soetan Madjolelo, Adenan galar Soetan Radjo Bilang, Hamzah galar Rangkajo Moelia, Djamaloeddin galar Soetan Radjo Mansoer, Abdoel Hakim galar Soetan Tjaniago, Muhamad Taib galar Radjo Lelo, Muhamad Taib galar Mangkudun Sati, Noerdin galar Datoek nan Boengsoe, Hasan galar Soetan Maharadja, dan Abdul Madjid galar Mangkoeto Radja.

Untuk membiayai kegiatan organisasi masing-masing cabang VBSTOL harus memiliki kas untuk menolong anggotanya, seperti yang disebutkan dalam fasal 3 *statuten* VBSTOL: “mengadakan kas oentoe k penoeloeng lid-lidnya, sehingga oleh kerna itoe patoet dilakoekan satoe oesaha boeat maksoed terseboet”. Berbagai usaha dilakukan oleh organisasi demi meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang tersebar di banyak tempat. Masing-masing anggota VBSTOL akan dimintakan uang *contributie* sebesar lima cent setiap bulannya atau sebesar f 0,10 yang dikumpulkan setiap tiga bulan sekali, tetapi sejak 1929 uang *contributie* yang harus dikumpulkan oleh anggota VBSTOL tersebut dihapuskan dan diganti dengan uang *contributie* yang bersifat sukarela.<sup>21</sup> Namun sesuai dengan rapat anggota VBSTOL pada tanggal 1 Februari 1930 masing-masing anggota kembali diwajibkan membayar uang *contributie* sebesar f 1,50 bagi anggota yang gajinya f 150/bulan.<sup>22</sup> Selain mendapat uang kas dari uang *contributie* yang dibayarkan oleh masing-masing anggota VBSTOL, organisasi juga memiliki usaha-usaha lainnya untuk meningkatkan pendapatan organisasi, salah satunya adalah mendirikan usaha *Assurantie Maatschappij* dengan biaya premi maksimal f 0,20/bulan dan tidak harus dibayarkan tiap bulannya (jika perlu saja).<sup>23</sup>

Setelah resmi sebagai sebuah organisasi yang menaungi pekerja-pekerja dari berbagai golongan, VBSTOL makin meningkatkan usahanya untuk memajukan negeri dan merangkul para pekerja untuk bergabung dengan organisasinya. Terhitung sejak Januari 1930, *Personeel Ombilinjnen* Sawah

<sup>21</sup> Berdasarkan keputusan dalam *Verslag Buitengewane Algemeene Ledenvergadering*, tanggal 31 Oktober 1929 pukul 08.00 malam yang bertempat di gedung *Sociteit Wilskracht* Padang Panjang.

<sup>22</sup> Terjadinya perubahan dalam penentuan uang *contributie* bagi anggota VBSTOL karena semakin meningkatnya anggaran rumah tangga diiringi pula dengan semakin bertambahnya anggota dan meluasnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi VBSTOL.

<sup>23</sup> *Pertimbangan*, 15 Januari 1931

Lunto secara resmi bergabung dengan organisasi ini, dengan susunan pengurus harian sebagai berikut:

- Presiden : Mohamad Noerdin galar Bagindo Soeleman
- Wakil Presiden : Mohamad Isa galar Soetan Tjoemanu
- Sekretaris : Soeman galar Datoek Soetan Maharadjo
- Bendahara : Mohamad Rasad galar Imam Poetin
- Komisaris-komisaris : Sjamsoedin galar Soetan Pamenan, Rasad galar Pangoeloe Moedo, Isa galar Soetan Saidi, Adam galar Bagindo Moedo, Rasjid galar Soetan Sinaro.

Organisasi VBSTOL cabang Sawah Lunto didirikan karena di daerah ini banyak anggota masyarakatnya yang bekerja di perusahaan Pemerintah, khususnya buruh kontrak dan buruh bebas yang bekerja pada tambang batubara Ombilin. Ketika baru bergabung dengan VBSTOL Sawah Lunto, jumlah buruh yang tergabung ke dalam organisasi ini hanya 55 orang, setelah akhir tahun 1930 jumlahnya meningkat menjadi 200 orang dan mencapai 220 pada Februari 1931.<sup>24</sup> Keuntungan yang diperoleh apabila ikut bergabung menjadi anggota VBSTOL.<sup>25</sup>

Di antaranya, adalah:

- 1e. Masoek mendjadi *lid* VBSTOL orang sudah memasoeki satoe *vakvereeniging* goena memperbaiki *positienja* dalam pekerdjaan masing2 dengan djalan jang sah (*wettig*)
- 2e. Mendjadi *lid* VBSTOL sama artinja dengan toeroet memadjukan *onderwijs* jang selaras dengan semangat zaman goena kepentingan bangsa sendiri, kerna *leden* VBSTOL dipandang *leden* djoega dari K.O.O (*Kamer van Opvoeding en Onderwijs*)
- 3e. Mendjadi *lid* VBSTOL soedah mendjadi *lid* djoega dari satoe *assurantie maatschappy* ketjil kepoenjaan bangsa sendiri.
- 4e. Mendjadi *lid* dari *assurantie my* jang ketjil ini seoempama kita soedah memenuhi kewajiban kita terhadap kepada pergaoelan hidoep setjara manoesia serta memenoehi perintahnya TOEHAN ALLAH jang menjoeroeh kita bertoeloeng2an atas djalan kebaikan sesama manoesia.

Organisasi VBSTOL adalah perkumpulan bagi segala jenis pekerja yang sangat peduli pada kesejahteraan anggotanya. Umumnya anggota VBSTOL adalah para buruh pribumi dengan tingkat penghasilan lebih rendah, jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh pekerja Indo-Eropa yang bekerja di perusahaan pemerintah Belanda. Salah satu program utama dari VBSTOL untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan mengadakan

<sup>24</sup>Meningkatnya jumlah anggota VBSTOL di daerah Sawah Lunto dari tahun ke tahun dikarenakan semakin tersebar luasnya informasi dari satu orang ke yang lainnya tentang tujuan dari organisasi ini. Disamping itu organisasi ini bersifat terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung dengan tujuan memajukan kehidupan bangsa.

<sup>25</sup>*Loc. Cit.*

kegiatan bernama “Toeloeng Menoeloeng” dan “Kongsi Mati”. Kegiatan “Toeloeng Menoeloeng” ini dicetuskan oleh anggota VBSTOL dalam rapat yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1929 di Padang Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan pertama kepada anggota VBSTOL yang meninggal dunia agar pemakamannya dapat terlaksana tanpa ada kendala keuangan. Setiap anggota VBSTOL yang meninggal dunia haruslah dilaporkan oleh pihak keluarga atau anggota VBSTOL lain yang dekat dengan anggota VBSTOL yang meninggal tersebut.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memberi bantuan berupa uang sejumlah f 20 sampai f 25 kepada keluarga anggota VBSTOL yang meninggal untuk membiayai proses pemakaman agar terlaksana sempurna. Selain memberikan bantuan uang untuk proses pemakaman, VBSTOL juga memberikan bantuan tambahan sejumlah uang kepada pihak keluarga yang ditinggal sebagai bentuk kepedulian sebagai anggota VBSTOL. Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh VBSTOL dalam pemberian uang “Toeloeng Menoeloeng” kepada anggota keluarga VBSTOL yang ditinggalkan tertera dalam *Statuten* VBSTOL Fatsal 51,<sup>26</sup> yaitu:

“Merika jang harus menerima ketinggalan oelang pertoeloengan seperti jang diterangkan dibawah ini:

- 1e. Teroetama musti diberikan kepada isteri jang tertoea dari lid jang meninggal itoe.
- 2e. Kalaoe isteri seperti itoe tidak ada, harus diberikan kepada anak-anak kandoengnya dengan pemberian jang sama banjak.
- 3e. Kalaoe anak-anak itoe tidak ada poela, harus diberikan kepada ibu bapa dari lid jang meninggal itoe.
- 4e. Kalaoe ibu bapa terseboet tidak ada, harus diberikan kepada soedara-soedara kandoeng dari lid jang meninggal itoe dengan pembangian sama banjak.
- 5e. Kaloe soedara-soedara terseboet tidak poela ada, maka oelang itoe akan diberikan kepada waris-warisan menoeoet sependjang adat Minangkabau, ataoe kalaoe lid jang meninggal boekan orang Minangkabau, akan ditoeroet sependjang adat negerinja sendiri, ataoe boleh juga menoeoet keboelatan moefakat segala leden Vereeniging jang ada ditempat simati itoe, asal dilakoekan menoeoet jang patoet”.

Bantuan ini akan diperoleh setiap anggota VBSTOL yang selalu taat membayar uang *contributie* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan organisasi. Jika ada anggota VBSTOL yang telah keluar dari keanggotaan VBSTOL terutama karena kelalaiannya dalam membayar uang *contributie* maka ia tidak berhak lagi atas uang dari kongsi ini. Pada tahun 1930, tepatnya 15 Februari 1930 nama kongsi ini diganti menjadi “Boeat Toeloeng Menoelong” yang bukan hanya

<sup>26</sup>*Pertimbangan*, 15 November 1929.



berupa bantuan untuk pemakaman anggota VBSTOL yang meninggal, tetapi juga untuk membantu keuangan anggota VBSTOL yang mengadakan kenduri atau perhelatan lainnya yang membutuhkan bantuan dana.<sup>27</sup>

Selain itu, kegiatan dari VBSTOL adalah dengan membentuk “Kongsi Mati” yaitu satu bentuk cabang usaha dari organisasi guna membantu kesulitan keuangan anak, isteri, ibu dan bapa dari anggota VBSTOL. Untuk mengumpulkan uang dalam kegiatan ini tidak dibebankan setiap bulannya kepada anggota lama, hanya saja bagi anggota baru yang ingin bergabung kedalam VBSTOL akan dikenakan biaya administrasi sebesar 25 cent untuk awal masuk dan satu cent dalam seminggu setiap hari gaji.<sup>28</sup> Untuk mempermudah pengelolaan uang yang telah terkumpul maka pengurus membagi wilayah pengumpulan uang berdasarkan *afdeeling* masing-masing, misalnya *station* Loeboek Aloeng sampai Naras masoek *afdeeling* Priaman, *station* Siloengkang sampai Sawah Loento dan *Ombilinjnen* masuk *afdeeling* Sawah Lunto.<sup>29</sup>

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, VBSTOL juga memberikan bantuan kepada anggota VBSTOL yang mendapat kecelakaan, anggota yang telah pensiun dari tempat kerjanya, dan anggota yang dikeluarkan/diberhentikan dari perusahaan tempat ia bekerja. Namun demikian, dari semua anggota yang diberi uang pertolongan tersebut, bagi pengurus VBSTOL pun memiliki ketentuan pihak mana yang lebih dahulu diberi bantuan jika semua anggota VBSTOL saling membutuhkan bantuan.<sup>30</sup> Aturan tersebut tertera dalam *statuten* VBSTOL futsal 55<sup>31</sup> yang berbunyi:

“Apabila kedjadian2 jang terseboet dalam bahagian A, B, C dan D terdjadi dalam satoe waktoe atau lebih banjak maka jang perloe diberi pertoeloengan lebih dahoeloe menoeoeret roentoenannja, jalah:

<sup>27</sup> *Pertimbangan*, 15 Maret 1930.

<sup>28</sup> Setiap anggota baru akan mendapatkan *Bewijs van Lid Maatschap* dan satu buku *statuten* serta *huishoudelijk reglement*. Apabila anggota kehilangan atau menghilangkan *bewijs van maatschap* harus membayar gantinya sebesar f 0,05, dan f 0,25 untuk buku *statuten* dan *huishoudelijk reglement* sesuai dengan Fatsal 58 *Statuten* VBSTOL dalam *Pertimbangan*, 15 Desember 1929, hlm 4.

<sup>29</sup> *Pertimbangan*, 15 Februari 1930, hlm 4.

<sup>30</sup> Dalam *Pertimbangan*, 15 Desember 1929, hlm 4. Bantuan diberikan berdasarkan urutan yang utama membutuhkan bantuan, yaitu:

- A. Leden yang meninggal dunia
- B. Leden yang mendapatkan kecelakaan
- C. Leden yang pensiun dari pekerjaannya
- D. Leden yang *overcompleet* dari pekerjaannya

<sup>31</sup> *Pertimbangan*, 15 Desember 1929.

- A. Keperloean jang teroetama
- B. Keperloean jang kedoea
- C. Keperloean jang ketiga
- D. Keperloean jang keempat

Dalam hal ini diserahkan memboeat peratoeran dengan begitoe matjam kepada hoofdbestuur, sehingga dalam satoe boelan tidak lebih dari 2 matjam kedjadian jang boleh dilakoekan memberikan pertoeoengan itoe menoeroet roenoetannya, soepaja pembajaran itoe tidak berat boeat leden. Jang doe lainnja dioeroes poela dalam boelan berikoet, begitoe teroes sampai selesai. Bagi keperloean leden jang meninggal, meskipoen menoeroet atoeran diatas ini diselesaikan tjoema doea kedjadian dalam satoe boelan tetapi oeang pindjaman jang f 25,- waktoe terdjadi meninggal itoe akan dibajar djoega sebentar itoe oleh hoofdbestuur soenggoeh poen berapa banjak djoega leden jang meninggal”.

Untuk lebih menyentuh semua anggota VBSTOL dan masyarakat luas di Sumatera Barat, organisasi pun berupaya melakukan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan banyak pihak, di antaranya memberikan bantuan secara berkala pada sebuah sekolah yang sejak tahun 1926 menjadi basis utama kegiatan sosial VBSTOL dalam dunia pendidikan, yaitu INS (*Indonesisch Nederlandsche School*) Kajoe Tanam.<sup>32</sup> Melalui sekolah ini VBSTOL berharap dapat sedikit membantu secara konkrit anak-anak pribumi yang ingin menimba ilmu namun kurang beruntung karena mereka tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk bergabung ke dalam sekolah yang diadakan oleh pemerintah Belanda. Bagi VBSTOL, pendidikan di bangku sekolah sangat penting karena dengan pendidikan manusia dididik menjadi manusia yang berguna dalam pergaulan hidup. Dengan adanya sekolah swasta seperti INS anak-anak pribumi yang memiliki semangat tinggi untuk belajar dapat dididik di sekolah tersebut menjadi generasi penerus yang mampu bersaing dengan anak-anak pribumi lain yang bersekolah di sekolah pemerintah serta bersaing dengan anak-anak Indo-Eropa yang memiliki kesempatan besar untuk menikmati pendidikan.

#### **4.2.2 *Pertimbangan* : Surat Kabar Orgaan VBSTOL (1929-1934)**

Surat kabar merupakan salah satu media yang paling efektif untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan yang berguna untuk kemajuan bangsa. Pada tahun 1929, di daerah Padang lahir sebuah surat kabar yang bernama *Pertimbangan* yang dinaungi oleh sebuah organisasi buruh yang memajukan

<sup>32</sup>Pada tahun 1931 karena merasa anak-anak yang berada di daerah pelosok Sawah Lunto merasakan kesulitan untuk menempuh sekolah di Kajoe Tanam maka dibangunlah INS Sawah Lunto dengan dana yang diperoleh dari uang contributie VBSTOL cabang Sawah Lunto yang dialokasikan khusus untuk membangun sekolah dan kurikulumnya pun berdasarkan pada INS Kajoe Tanam.

kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan. Sebelumnya pada tahun 1925 organisasi VBSTOL (awalnya bernama VBPS) pun telah memiliki sebuah surat kabar bernama *Soera Boemi Poetra Staatspoor*,<sup>33</sup> namun seiring dengan perubahan ruang lingkup organisasi maka organisasi berikut surat kabarnya pun berganti nama menjadi *Pertimbangan*. Surat kabar ini merupakan media cetak yang digunakan oleh VBSTOL untuk menyebarluaskan ide-ide organisasinya kepada masyarakat luas. Surat kabar *Pertimbangan* terbit setiap tanggal 15 bulan Belanda, dan pertama kali beredar di masyarakat pada tanggal 15 November 1929 dengan persyaratan waktu berlangganan paling sedikit selama tiga bulan dengan biaya sebesar f 0,75 dan bagi anggota VBSTOL surat kabar diberikan secara gratis. Berikut ini susunan dari redaksi surat kabar *Pertimbangan*:

- Voorzitter tevens redactuer : A.Rachman
- Secretaris : Mohamad Said
- Penningmeester : Datoek Bangso Di Radjo
- Medewerker : M. Noerdin

Surat kabar *Pertimbangan* di cetak oleh *N.V. Volksdrukkerij Handel Mijnen* Padang yang terdiri dari empat halaman. Surat kabar ini banyak mengangkat tema tentang dunia pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial. Sebagian besar isi dari surat kabar ini adalah berupa berita kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh VBSTOL, mulai dari memberitakan laporan-laporan hasil rapat dari setiap cabang VBSTOL yang tersebar di daerah Sumatera Barat, pengumuman-pengumuman tentang kebijakan-kebijakan baru dari VBSTOL (jika ada perubahan), kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh VBSTOL setiap waktunya, artikel-artikel bebas yang membahas tentang keterlibatan kaum pribumi dalam percaturan politik, pengumuman tentang perkembangan beserta laporan keuangan dari

---

<sup>33</sup> Surat kabar *Soera Boemi Poetra Staatspoor* adalah surat kabar yang menjadi media publikasi bagi organ VBPS (sekarang VBSTOL). Surat kabar ini terbit dan beredar pada tahun 1925 hingga tahun 1929, tetapi informasi tentang surat kabar ini tidak dapat dipaparkan secara lengkap. Kondisi fisik dari surat kabar ini di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sudah tidak dapat dijumpai lagi. Pada saat rekonstruksi media ini dari wujud kertas ke microfilm terjadinya kecelakaan, sehingga surat kabar ini pun dinyatakan hilang oleh pihak perpustakaan. Dengan demikian penulis tidak dapat memberikan informasi secara terperinci tentang profil dan isu yang diangkat oleh surat kabar tersebut.

Comite Derma INS, sampai kepada laporan keuangan VBSTOL setiap tiga bulan sekali.

Tulisan-tulisan yang ada dalam setiap edisi surat kabar *Pertimbangan* adalah tulisan yang dikirim oleh kontributor dari berbagai tempat yang merupakan anggota dari VBSTOL sendiri. Dalam perjalanannya, surat kabar ini tidak menemui kendala berarti dari pemerintah Belanda, karena secara umum surat kabar yang menjadi media publikasi VBSTOL ini telah mendapat izin secara resmi dari pemerintah Belanda, sehingga isi dari surat kabar ini pun tidak pernah mendapat kritikan atau sorotan dari pemerintah Belanda. Di samping itu, surat kabar ini bersifat lunak terhadap pemerintah karena hanya meliput masalah pendidikan dan kegiatan organisasi VBSTOL yang selalu melibatkan pejabat pemerintahan dalam setiap kegiatannya.

Keistimewaan dari surat kabar ini adalah berupa laporan keuangan VBSTOL yang dikeluarkan setiap tiga bulan sekali sebagai suatu wujud keterbukaan organisasi kepada seluruh anggotanya yang tersebar di pelosok-pelosok Sumatera Barat. Dalam laporan keuangan tersebut diberitakan secara rinci berapa pemasukan, pengeluaran dan saldo yang ada dibagian keuangan organisasi, sehingga berapapun uang yang diterima oleh organisasi dan dari pihak manapun selalu diketahui oleh setiap anggota VBSTOL.<sup>34</sup> Surat kabar ini hanya beredar selama lebih kurang lima tahun, karena setelah organisasi VBSTOL memutuskan mundur dari pergulatan politik negeri maka surat kabar ini pun menghentikan penerbitannya.

#### **4.2.3 Perjuangan VBSTOL Melalui INS Kajoe Tanam dan INS (Onderbouw) Sawah Lunto (1926-1932)**

Sistem pengajaran modern diperkenalkan oleh pemerintah Belanda sebagai salah satu bagian dari kebijakan Politik Etis.<sup>35</sup> Pengenalan sistem pendidikan barat ini untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah akan tenaga terdidik dari kalangan bumi putera. Sekolah telah membuka pintu ke sistem kolonial bagi

<sup>34</sup> Contoh laporan keuangan VBSTOL dalam surat kabar *Pertimbangan* yang terbit setiap tiga bulan sekali (Lampiran 6)

<sup>35</sup>Politik etis yang dikemukakan oleh Van Deventer telah mengubah pandangan dalam politik kolonial sehingga pemerintah Belanda beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan untuk dapat memenuhi keperluannya serta adanya peningkatan budaya rakyat.

bumi putera untuk menembus lapisan atas birokrasi yang sebelumnya sangat tidak mungkin disentuh. Akan tetapi pada masa berikutnya sistem pendidikan tersebut melahirkan kekecewaan dari lulusannya sehingga hal ini mendorong kalangan pribumi terdidik untuk mendirikan sekolah swasta sendiri atau mengajar di sekolah swasta meskipun dengan gaji rendah. Misalnya saja Rahmah el Yunusyah yang mendirikan *Diniyah School* Padang Panjang pada tahun 1921. Gejala pembangunan sekolah-sekolah swasta ini merupakan reaksi atas sistem pengajaran yang berlaku pada sekolah-sekolah Pemerintah dan telah dimulai di Jawa oleh K.H. Ahmad Dahlan, kemudian disusul oleh Tan Malaka dan Suwardi Surjaningrat. Hal yang serupa diikuti oleh Muhammad Sjafei di Sumatera Barat dengan mendirikan INS (*Indonesisch Nederlandsche School*) di daerah Kajoe Tanam pada tahun 1926.

Pada tahun 1926, M.Sjafei bekerjasama dengan sebuah organisasi untuk mendirikan sekolah pribumi di daerah Kajoe Tanam. Ide mendirikan sekolah ini berasal dari ayah angkat M.Sjafei bernama Mara Soetan, seorang guru sekolah dan aktivis pergerakan. Mara Soetan dilahirkan di Kajoe Tanam dengan nama lengkap Ibrahim galar Mara Soetan. Ia adalah seorang Bagindo Nagari yang menjadi penghulu<sup>36</sup> dagang di daerah Bukittinggi dan bersekolah di sekolah rendah di Bukittinggi kemudian melanjutkannya ke Sekolah Raja hingga tahun 1890. Pada tahun tersebut ia pun diangkat sebagai guru sekolah rendah di Padang. Namun pada tahun berikutnya ia memutuskan untuk tinggal dan menetap di Batavia serta memasuki organisasi-organisasi sosial politik dan membuka kursus bahasa Melayu di sekitar tempat tinggalnya.

Mara Soetan memiliki istri bernama Chalidjah dan mereka tidak dikaruniai seorang anak, sehingga setiap kali ditempat tugasnya Mara Soetan bersama istrinya mengangkat anak-anak untuk dipelihara dan dididik olehnya. Misalnya saja ketika Mara Soetan bertugas di daerah Pontianak, ia mengangkat M.Sjafei dan melalui tangan M.Sjafei inilah cita-cita Mara Soetan untuk mendirikan sekolah dapat terwujud.<sup>37</sup> Setelah menyelesaikan pendidikannya M.Sjafei

<sup>36</sup>Penghulu adalah elite tradisional yang berdasarkan keturunan dan ia merupakan seorang kepala adat dalam sukunya.

<sup>37</sup> M. Sjafei memasuki bangku sekolah pertama kali pada usia sepuluh tahun di sekolah Melayu di daerah Idi-Aceh. Pada pertengahan tahun 1906 ia mengikuti orang tua angkatnya hijrah ke Sambas

memutuskan untuk mengajar di Sekolah Kartini yang didirikan atas dukungan Perkumpulan *Kartinifonds*.<sup>38</sup> Sekolah inilah yang menjadi tempat pertama bagi M.Sjafei untuk mengembangkan ilmunya, dan untuk pertama kalinya ia ditugaskan mengajar siswa di kelas satu. Setelah memperoleh ijazah Bahasa Belanda atau *Nederlansch Acte* pada tahun 1918, dan mendapatkan dukungan dari ayah angkatnya pada tanggal 31 Mei 1922, M Sjafei berangkat ke negeri Belanda.

Ketika kembali ke tanah air, M.Sjafei memutuskan bekerjasama dengan VB PSS untuk mendirikan sebuah sekolah guna menampung anak-anak anggota VB PSS yang ditolak oleh HIS (*Hollands Inlandsche School*) dan di *drop out* dari sekolah-sekolah sejenis. Kerjasama ini dipilih oleh M.Sjafei mengingat hubungan antara anggota organisasi VB PSS (*Vereeniging Boemi Poetera Staatsspoor*) dengan dirinya sudah berlangsung sejak lama. Melalui sekolah yang didirikan di daerah Sumatera Barat ini, M.Sjafei berharap ide-ide baru dari sekolah yang dirintisnya ini dapat menyebar ke seluruh Indonesia mengingat kebiasaan orang Minangkabau yang gemar merantau.<sup>39</sup> Keputusan untuk mendirikan sekolah ini dirumuskan dalam sebuah rapat yang diadakan pada tanggal 17 April 1926 dan dihadiri oleh ketua beserta anggota VB PSS, serta Asisten Demang dan Mantri Polisi. Rapat memutuskan sekolah akan dibuka pada tanggal 1 Agustus 1926, tetapi karena pemilihan lokasi sekolah belum disepakati maka pembukaannya ditunda menjadi tanggal 31 Oktober 1926.

Dana untuk pengelolaan INS pertama kali berasal dari dana pribadi M.Sjafei dari honorarium kegiatan tulis menulisnya dan dana dari Ibu M.Sjafei bernama Chalidjah yang menggadaikan emasnya untuk membantu kekurangan biaya sekolah. Pada masa berikutnya INS juga mendapatkan bantuan dari VB PSS melalui K.O.O (*Kamer van Opvoeding en Onderwijs*) atau Seksi Pendidikan dan Pengajaran dan ditambah lagi dari pembayaran uang sekolah yang ditarik dari murid sebesar f. 2,50/orang/bulan. Untuk memenuhi biaya operasional sekolah, atas inisiatif VB PSS maka dibentuklah sebuah Komite Derma INS pada tanggal

---

hingga tahun 1908, dan melanjutkan kembali sekolah di Sekolah Raja di Bukittinggi hingga lulus tahun 1914 dan kembali pindah ke Batavia pada tahun yang sama.

<sup>38</sup>*Kartinifonds* adalah sebuah perkumpulan yang didirikan atas usaha dari Tuan dan Nyonya Th. van Deventer.

<sup>39</sup>Merantau adalah sebuah tradisi dari orang Minangkabau, khususnya bagi kaum laki-laki untuk meninggalkan kampung halaman pergi ke tempat lain mencari nafkah dan pendidikan.

27 Desember 1928. Berikut adalah susunan dari Komite Derma INS Kayu Tanam<sup>40</sup> :

- Penasehat : M.Sjafei (Kepala Sekolah INS), M.Djamil gelar Soetan Radjo Lelo (Mantri Polisi)
- Ketua : Abdoel Rachman gelar Soetan Sadjatinjo (juru telegram)
- Wakil ketua : M.Sjoekoer (guru dan pengurus Thawalib)
- Sekretaris I : Navis gelar Soetan Maradjo (Mandor Kepala Sumatra Staatspoor)
- Sekretaris II : Abdoel Hamid gelar Radjo Mangkoeto (Penulis)
- Bendahara : Rasjidin gelar Datoek
- Komisaris : Soetan Saidi (Kondektur Kepala), Rasjid gelar Soetan Kajo (pemilik sekolah), M.Rasjad (guru), Angku Mudo Hamid (Kepala Sekolah Thawalib), M.Taher gelar Soetan Soelaeman (Kepala Sekolah Diniyah), Agoes (guru dan pengurus Thawalib), Joenoos (guru dan pengurus Thawalib), dan Soetan Edar (juru telegram).

Adapun usaha yang akan dilakukan oleh comite ini selain mengumpulkan dana dari para anggota VBSTOL yang tersebar di beberapa wilayah di Sumatra Barat, comite ini pun telah merencanakan kegiatan atau program-program untuk menunjang pengumpulan dana, diantaranya dengan mengadakan pertandingan *voetbal*, *bioscoop* derma, *toneel uirvoering* (pertunjukan sandiwara) (murid-murid sekolah INS Kayu Tanam), *tentoonstelling* (pameran) dari kepandaian murid sekolah INS Kayu Tanam.

Pada awal pembukaannya, untuk sementara INS hanya menerima murid laki-laki karena terbatasnya tempat, guru, dan adanya kesulitan untuk menentukan keterampilan apa yang layak diberikan pada siswa perempuan. Namun, hingga tahun 1942 INS tidak pernah menerima murid perempuan dan yang bersekolah di INS rata-rata berumur 14 tahun.<sup>41</sup> Jenjang pendidikan INS tidak mengikuti

<sup>40</sup>Keberagaman profesi dari Komite Derma INS ini dipilih untuk mempermudah dan memperluas jaringan penggalangan dana untuk pembangunan sekolah tersebut dan untuk menunjukkan bahwa sekolah ini didirikan untuk siapa pun anak pribumi yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian tujuan utama dari pendirian sekolah ini untuk mencerdaskan anak negeri dapat terwujud. Khusus untuk keterlibatan guru dan pengurus Sumatra Thawalib dan Sekolah Diniyah karena mereka tertarik dengan sistem pendidikan yang diterapkan di INS. Pengurus Sumatra Thawalib pernah meminta M.Sjafei mengajar di sekolah tersebut, namun ditolaknya dengan alasan ia tidak menguasai agama secara sempurna, sebaliknya M.Sjafei bersedia mengajar segala keterampilan di sekolah tersebut.

<sup>41</sup>Hal ini dipilih oleh M.Sjafei karena keterbatasan tempat, guru, dan kesulitan dalam menentukan pelajaran keterampilan apa yang pantas bagi murid perempuan. Pada dasarnya sikap dan pandangan yang dipilih oleh M.Sjafei ini sama dengan pandangan yang dianut oleh Ki Hadjar Dewantara dalam hal ko-edukasi dan o-instruksi, yakni mendidik dan mengajar anak wanita dan anak laki-laki bersama-sama baik untuk anak sampai usia 14 tahun, jika lebih sebaiknya mereka

pemerintah dan M. Sjafei membagi jenjang sekolah menjadi *Onderbouw* (ruang bawah) dan *Bovenbouw* (ruang atas). Pada tingkat *Onderbouw* siswa menempuh masa belajar selama tujuh tahun atau setingkat dengan HIS, sedangkan untuk tingkat *Bovenbouw* siswa diharuskan belajar selama empat tahun atau setingkat dengan Taman Dewasa pada Taman Siswa.<sup>42</sup> M.Sjafei membagi jenjang sekolah menjadi *onderbouw* (7 tahun), dan *bovenbouw* (4 tahun) untuk memberikan corak khusus bagi pendidikan di INS, menghemat biaya pendidikan, dan agar pendidikan bumiputra tidak hanya terbatas pada pendidikan rendah saja.

Dasar pendidikan yang diterapkan INS dalam mendidik siswanya adalah perpaduan antara ilmu umum dan praktek kejuruan. Perpaduan kedua ilmu ini diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam penerapan sebuah ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmu umum diberikan dengan harapan ilmu tersebut dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang cita-cita dan tujuan pendidikan, sedangkan praktek kejuruan atau keterampilan diberikan untuk mewujudkan teori-teori yang telah di dapat selama dibangku sekolah. Dalam pendidikan INS tidak mementingkan pelajaran agama, karena M.Sjafei mengajarkan pendidikan agama melalui praktek langsung. Namun demikian, satu pelajaran penting yang sangat diutamakan oleh M.Sjafei pada INS adalah adanya pelajaran Budi Pekerti atau Kesusilaan, dengan harapan agar manusia yang memiliki kecakapan tinggi tetap harus memiliki akhlak yang baik.

Pada tahun 1930, INS mulai menunjukkan kemajuan dengan pindah ke lokasi sekolah yang baru di atas sebidang tanah dilengkapi dengan gedung sekolah. INS Kayu Tanam mendapatkan tanah *erfpacht* (hak guna pakai jangka panjang) seluas 16 hektar, ditambah dengan hibah dari masyarakat setempat seluas 2 hektar yang berlokasi di daerah Pelabihan lebih kurang tiga kilometer dari Kayu Tanam di pinggir jalan antara Padang dan Bukittinggi. Pembangunan sekolah pun selesai pada tanggal 31 Oktober 1931 yang terdiri dari delapan ruang kelas.<sup>43</sup> Pada

---

dipisahkan. Lihat Ki Hadjar Dewantara. *Karja K. H. Dewantara bagian pertama: Pendidikan*. (Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa, 1962), hlm 6-9.

<sup>42</sup>Taman Siswa adalah suatu Lembaga Perguruan Kebangsaan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Pada awalnya sekolah ini bernama *National Onderwijs Instituut Taman Siswa*. Lihat Djohan Makmur, dkk, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993), hlm 86-88.

<sup>43</sup>*Rantai Mas*, no. 11, November 1931.



tahap selanjutnya, berdasarkan *verslag* ringkas *leden vergadering* VBSTOL *afdeeling* Sawah Lunto yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1930 yang bertempat di panggung bioskop “Scala Bio”, anggota VBSTOL cabang Sawah Lunto berinisiatif untuk memperluas pendidikan INS ke daerahnya dengan mendirikan sebuah sekolah dengan nama INS (*Onderbouw*) Sawah Lunto.

Sekolah ini didirikan dikarenakan oleh keinginan kuat dari anggota VBSTOL yang telah membuktikan kualitas anak-anak didikan yang dihasilkan dari INS Kayu Tanam dalam acara *toneel uitvoering* (pertunjukan sandiwara) di Solok, sehingga anggota VBSTOL semakin berharap dengan didirikannya sekolah tersebut di daerah mereka maka anak-anak mereka pun akan bisa seperti halnya anak-anak INS Kayu Tanam. Dalam pertemuan tersebut disepakati setiap anggota VBSTOL membayar derma sebesar f 0.50 selama delapan bulan berturut-turut, dan kepengurusan VBSTOL menerima tambahan anggota baru dengan menerima *personeel* bergaji harian dan sudah tetap dalam kerjanya.<sup>44</sup> Pada awalnya kesepakatan untuk pendirian INS (*onderbouw*) Sawah Lunto ini diragukan oleh beberapa anggota VBSTOL lainnya, karena mereka merasa jika INS didirikan pula di Sawah Lunto bagaimana dengan nasib keuangan INS yang selama ini diperoleh dari pekerja di *Ombilinmijnen*.

Dt. Mangkuto Alam dan Dt. Soetan Maradjo selaku *voorzitter* yang memimpin pertemuan saat itu memberikan penjelasan bahwa kendati INS Sawah Lunto berdiri, tidak akan membawa kerugian pada INS Kayu Tanam.<sup>45</sup> Dengan demikian keputusan rapat pun menetapkan komisi-komisi yang akan menjadi pengurus untuk mempersiapkan pembangunan INS (*onderbouw*) Sawah Lunto, diantaranya Dt. M. Alam (*Opzichter Bouwwerken*), Ismael (*Hoofdmandoer Bouwwerken*), Soetan Malano (*Mandoer Bouwwerken*), dan Djainoen galar Madjo Indo (*Bureau Werkkrachten*). Selain mengumpulkan dana melalui derma setiap bulannya, komisi yang telah dibentuk tersebut diharapkan mampu melakukan

<sup>44</sup>*Pertimbangan*, 15 September 1930.

<sup>45</sup>Hal tersebut diyakinkan oleh *voorzitter* dengan memberikan penjelasan: “dahulu sebelum *personeel* Ombilinmijnen menjadi *leden* VBSTOL sekolah INS telah berdiri, dan saat ini pun hampir 300 orang *leden* dari Ombilinmijnen dengan *contributie* ± f 130 sebulan, sekolah itu tetap dalam kondisi miskin melarat. Sungguhpun demikian, diharapkan *afdeeling* Sawah Lunto berikhtiar uang yang ±f 100 dikirim ke Padang tetap dikirim sejumlah itu. Untuk itu *afdeeling* harus memperluas *leden* yang bergabung dengan VBSTOL dan dilakukan dengan hati-hati”. Lihat dalam hasil *verslag* ringkas *leden vergadering* VBSTOL *afdeeling* Sawah Lunto dalam *Pertimbangan*, 15 September 1930.

usaha lain seperti mengadakan *toneel uitvoering* (pertunjukan sandiwara) murid-murid INS Kayu Tanam untuk membantu keuangan INS itu sendiri dan propaganda untuk anggota Sawah Lunto yang banyak itu agar terbagung ke dalam keanggotaan VBSTOL.

Pada tanggal 21 September 1930 diadakan pertemuan antara afdeeling Sawah Lunto dengan M.Sjafei untuk membahas lebih lanjut rencana pendirian INS (*onderbouw*) Sawah Lunto, dan di dapatkan kesepakatan bahwa:

- a. Untuk kebutuhan guru di INS Sawah Lunto pada tahun pertama ada dua pilihan yaitu mendatangkan pendidik dari Kayu Tanam yang merupakan lulusan diploma dengan digaji sebesar f 30 sebulan atau dengan cara mengangkat murid INS yang cakap menjadi guru.
- b. Untuk bangunan sekolah akan didirikan bangunan sederhana atau menyewa tempat sederhana yang letaknya jauh dari pusat keramaian, hal ini dipilih agar siswa dapat belajar dengan serius dan tenang.
- c. Untuk kebutuhan perlengkapan sekolah berupa bangku dan meja, akan dibuat sendiri oleh murid-murid dengan teknik yang akan diajarkan oleh M.Sjafei langsung.
- d. Dalam usaha menambah pemasukan, maka akan diadakan *toneel uitvoering* dari siswa INS Kayu Tanam di daerah Sawah Lunto untuk beberapa waktu. Untuk itu, segala perlengkapan untuk pementasan akan dikerjakan sendiri oleh murid INS, namun segala biayanya akan ditanggung oleh afdeeling Sawah Lunto.
- e. Untuk pengadaan panggung, disediakan oleh afdeeling Sawah Lunto baik dengan cara membuat panggung sendiri atau menyewa panggung sebuah bioskop.

Melalui keputusan ini, uang derma sebesar f 0.50 yang telah ditetapkan dahulu akan dimulai penarikannya terhitung sejak tanggal 1 November 1930.<sup>46</sup> Untuk mengimbangi keuangan di INS Kayu Tanam, maka pengurus VBSTOL melalui Mara Soetan pun melakukan usaha keras untuk mengumpulkan dana demi kelangsungan kedua sekolah ini nantinya.

Berbagai usaha dilakukan untuk mewujudkan sekolah baru di Sawah Lunto dan hingga akhirnya pada April 1931 disepakati pendirian INS (*onderbouw*) Sawah Lunto yang terdiri dari lima kelas.<sup>47</sup> Setamatnya dari kelas lima murid-murid dapat melanjutkan ke *bovenbouw* di Kayu Tanam. Pada sekolah INS (*onderbouw*) Sawah Lunto akan diutamakan pengajaran tentang pekerjaan

<sup>46</sup> *Pertimbangan*, 15 Oktober 1930.

<sup>47</sup> *Pertimbangan*, 15 Mei 1931

tangan (*handen arbeid*) agar murid-murid tersebut dapat bekerja sendiri untuk kehidupannya. Pada sekolah INS tidak mengharapkan anak didik akan bekerja menjadi pegawai pemerintah, tetapi lebih kepada untuk menjadikan muridnya mampu hidup mandiri tanpa tergantung kepada orang lain. Pada bulan Januari 1932 akan diadakan *toneel uitvoering* serta tontonan barang-barang kerajinan murid INS Kayu Tanam di Payakumbuh, *Fort de Kock*, dan Batoe Sangkar dan pada bulan Mei akan dikirim sekitar 35 orang murid INS Kayu Tanam ke daerah Sibolga, Pematang Siantar, Tandjoeng Balai, Medan, Langsa, Kotaradja (Atjeh), terus ke Bengkoeloen, Palembang, Lampoeng, dan Betawi selama kira-kira tiga bulan. Diharapkan usaha ini akan mendapatkan hasil yang optimal untuk kemajuan sekolah INS Kayu Tanam dan Sawah Lunto.<sup>48</sup>

Pada tahun 1932 VBSTOL mulai menemui permasalahan dalam hal pengaturan keuangan organisasi untuk *leden* yang meninggal dunia. Terutama jika terjadi seorang anggota VBSTOL meninggal dunia dan *afdeelingbestuur* tidak mempunyai simpanan kas yang memadai untuk diserahkan kepada *lid* tersebut sebagai uang “Tolong Menolong” yang telah menjadi haknya. Dalam sebuah artikel dalam surat kabar *Pertimbangan* disebutkan bahwa “untuk permasalahan keuangan seperti ini *chef* dari *lid* yang meninggal tersebut harus terlebih dahulu mengirim telegram kepada *hoofdbestuur* dan ongkos kirim tersebut ditanggung oleh keluarga *lid* yang meninggal tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan ini maka telegram tentang kematian *lid* ini yang dialamatkan kepada *hoofdbestuur* dari *vereeniging* bolehlah jika *chef* dari *lid* mengirim sebagai *dienst* telegram”.<sup>49</sup> Jika melihat tujuan utama dari uang Tolong Menolong adalah memberikan bantuan kepada pihak keluarga agar pemakaman *lid* yang meninggal dunia dapat terlaksana dengan sempurna, tetapi dalam masalah ini pihak keluarga yang ditinggal malah diberi kesusahan dengan harus memikirkan biaya untuk mengganti ongkos kirim telegram. Hal ini cukup menyita perhatian pengurus VBSTOL dan anggota lainnya, sehingga hal ini pun diharapkan bisa diketengahkan dalam *algemeene ledenvergadering* berikutnya.

Selain menemui permasalahan dalam mengatur keuangan untuk kongsi “Tolong Menolong”, VBSTOL juga menemui kendala dalam mengatur uang

<sup>48</sup>*Pertimbangan*, 15 Oktober 1931

<sup>49</sup>Sporman. “Telegram tentang kematian *leden*” dalam *Pertimbangan*, 15 Juni 1932.

*contributie* yang dialokasikan untuk INS Kayu Tanam dan Sawah Lunto. VBSTOL menyarankan agar bantuan keuangan untuk INS tidak hanya dipikul oleh satu organisasi tetapi juga diserahkan kepada beberapa perkumpulan lainnya. Hal ini dilakukan oleh VBSTOL karena permasalahan keuangan yang semakin rumit, dimana banyak dari anggota VBSTOL yang tidak taat membayar uang *contributie* dan berkurangnya para dermawan yang mengirimkan uang kepada *comite derma* INS.<sup>50</sup>

Dalam *algemeene leden vergadering* VBSTOL pada 31 Juli 1932 yang diadakan di Sawah Lunto, *voorzitter* kembali memutuskan tentang aturan rumah tangga *vergadering* yang baru, yang intinya menegaskan aturan baru dalam pembayaran uang *contributie* bagi anggota VBSTOL baik yang bergaji bulanan maupun bergaji harian. Ditambahkan lagi bahwa untuk pemberian bantuan berupa uang “Tolong Menolong” dan “Kongsi Mati” ditetapkan aturan yang lebih ketat dan selektif, agar *lid* yang menerima bantuan tersebut benar-benar menerima manfaat dari kegiatan VBSTOL tersebut.<sup>51</sup> Untuk mengurangi dampak dari permasalahan keuangan yang dihadapi oleh VBSTOL, maka pada tahun 1932 VBSTOL mengembalikan tanggungjawabnya terhadap INS kepada M.Sjafei, sehingga terhitung sejak 1 Agustus 1932 VBSTOL melepaskan diri dari kegiatan sosialnya di INS Kayu Tanam dan INS (*onderbouw*) Sawah Lunto.

#### 4.3 Perjuangan Demi Perjuangan

Sewaktu INS menjalin hubungan dengan VBSTOL, segala bentuk kegiatan yang diadakan disekolah tersebut tidak memunculkan kecurigaan dari pemerintah, meskipun sekolah ini menerapkan kurikulum yang berbeda dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah bulan Agustus 1932, VBSTOL memutuskan hubungan dengan INS sejak saat itu pulalah INS benar-benar mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut dengan menanamkan sikap mandiri kepada setiap siswanya. INS berupaya menanamkan sikap mandiri dan berani berbuat apapun tanpa harus takut melakukan kesalahan

<sup>50</sup>Hal ini terjadi karena adanya penurunan upah dari pekerja-pekerja yang bekerja pada perusahaan pemerintah dan swasta. Pada masa-masa sulit saat krisis melanda pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menurunkan gaji ambtenaar sebesar 20% dan hal inilah yang semakin memperburuk kondisi keuangan anggota VBSTOL.

<sup>51</sup>*Verlag Algemeene leden vergadering* VBSTOL dalam *Pertimbangan*, 15 Agustus 1932.

kepada setiap siswanya, seperti dalam pelajaran keterampilan/kerajinan tangan, dimana setiap anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreatifitasnya dalam membuat sebuah kerajinan tangan tanpa harus memperhatikan hasilnya bagus atau jelek.<sup>52</sup>

Pada waktu INS betul-betul lepas dari VBSTOL, dan berdiri sendiri tanpa adanya ikatan dengan organisasi atau perkumpulan lainnya, maka saat itu menjadi zaman baru bagi INS. Pengurus INS berupaya keras untuk mempertahankan keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut dengan melakukan penggalangan dana ke berbagai tempat. Usaha-usaha baru pun diterapkan oleh pengurus sekolah INS Kayu Tanam dan Sawah Lunto, diantaranya dengan mengadakan pertunjukan hasil pekerjaan tangan murid-murid INS, sekaligus pertunjukan praktek kerja mereka dalam membuat kerajinan tangan tersebut. Selain itu, juga diusahakan untuk membuat sebuah pentas seni dari murid INS, dan pertunjukan gambar-gambar yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Sikap yang ditanamkan INS kepada murid-muridnya untuk selalu bersikap mandiri dan berani menimbulkan sebuah kekhawatiran bagi pemerintah kolonial. Menurut pemerintah kolonial, jika sikap tersebut semakin berkembang dalam diri murid INS maka akan muncul kesadaran dalam diri mereka sebagai orang terjajah, karena dari generasi yang demikian akan menimbulkan kesadaran untuk merdeka. Untuk itu pemerintah pun mulai melakukan pengawasan terhadap aktivitas di sekolah partikelir tak bersubsidi seperti INS.<sup>53</sup>

Beriringan dengan pengawasan tersebut pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi Pengawasan Sekolah-sekolah Swasta (*Toezicht Ordonnantie Particulier Ondewijs*) atau lebih dikenal dengan sebutan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*) yang berlaku sejak 1 Oktober 1932.<sup>54</sup> Menurut pejabat direktur pengajaran Belanda, J.F.W. van der Meulen: “tujuan dari

<sup>52</sup>Lembaga Pengembangan Pendidikan INS. *Ruang Pendidik INS: Dulu, Kini dan Esok*. (Jakarta: LPP-INS, 1986), hlm 20-21.

<sup>53</sup>*Semangat Pemoeda*, 15 Oktober 1932.

<sup>54</sup>Sama halnya dengan ordonansi tahun 1923, ordonansi bertujuan untuk memelihara ketertiban umum. Sejak tahun 1923 pemerintah bersifat represif, dimana peraturan akan berlaku kalau dalam praktek pengajaran yang telah diberikan sudah menimbulkan bahaya, sedangkan ordonansi tahun 1932 bersifat preventif, dimana calon guru yang datang ke sekolah-sekolah partikelir wajib melaporkan diri dan wajib memberikan keterangan mengenai maksud pengajarannya kepada pejabat yang telah ditentukan, dan permintaan izin untuk memberikan pengajaran tersebut dapat ditolak oleh pemerintah. Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. (Jakarta: PT. Upima Utama Indonesia, 1986), hlm 104-105.

peraturan tersebut agar pemerintah mendapat kepastian tentang bentuk dan sifat pengajaran luar biasa ini dan agar pemerintah selalu mengetahui bilamana perlu pengawasan dan agar pemerintah dapat dengan segera mengakhiri apabila sekolah-sekolah tersebut mengambil jalan yang membahayakan ketertiban umum”.<sup>55</sup> Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan sebuah manifesto agar seluruh pergerakan kebangsaan melakukan aksi atau perlawanan pasif.<sup>56</sup> Di wilayah Sumatera Barat hal ini disambut antusias oleh pimpinan INS dengan melakukan kunjungan langsung ke Jogjakarta pada bulan Desember 1932 dengan menyatakan bahwa seluruh Minangkabau sepakat dengan aksi perlawanan pasif yang diusung oleh K.H. Dewantara tersebut. Akhirnya pada Februari 1933, pemerintah Belanda menunda pelaksanaan ordonansi tersebut dan barulah pada tahun 1935 ordonansi tersebut benar-benar dicabut oleh pemerintah Belanda.<sup>57</sup> Kendati INS telah tidak bekerjasama lagi dengan VBSTOL, INS tetap berjalan dan semakin berkembang pada puncaknya tahun 1941 dengan dibentuknya sebuah Yayasan Badan Wakaf INS Kajoe Tanam yang mengurus segala sesuatu tentang kebutuhan sekolah yang dipelopori oleh M.Sjafei ini.

Perjuangan organisasi VBSTOL dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang umumnya bekerja sebagai buruh pada perusahaan Pemerintah Kolonial termasuk pada tambang batubara Ombilin Sawah Lunto setelah melepaskan pengelolaan INS Kayu Tanam dan INS (*onderbouw*) Sawah Lunto belumlah berakhir. Organisasi VBSTOL berupaya memperkuat ikatan diantara para anggotanya melalui kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Para pengurus VBSTOL pun berupaya merangkul seluruh anggotanya untuk

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 103.

<sup>56</sup> K.H. Dewantara mengirim aksi protes dengan telegram kepada Gubernur Jenderal dan memberikan peringatan bahwa karena terpaksa boleh jadi akan diadakan perlawanan sekuat-kuatnya dengan cara tidak menggunakan kekerasan (*lijdelijk verzet*). Pemerintah Belanda sangat khawatir dengan perlawanan umum tanpa kekerasan tersebut, sehingga membawa perundingan tersebut ke meja Dewan Rakyat.

<sup>57</sup> Pada tahun 1933 pemerintah tidak menghapuskan secara utuh dari ordonansi, tetapi lebih membuat lunak ordonansi tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab protes dari Wiranatakusumah (*initiatie voorstel Wiranatakusumah*) kepada Dewan Rakyat Belanda dengan cara menunda pelaksanaan ordonansi hingga 1 Maret 1934. Barulah setelah surat protes dari Ki Hajar Dewantara kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda ikut bersuara, maka pada tahun 1935 ordonansi benar-benar dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Adapun isi dari Ordonansi adalah 1) Pendirian sekolah partikelir harus minta izin kepada Pemerintah Hindia Belanda, 2) Bagi guru-guru sekolah partikelir sebelum mengajar terlebih dahulu harus memiliki izin mengejar dari Pemerintah Hindia Belanda, 3) Isi pengajaran harus disesuaikan dengan Sekolah Negeri dan tidak boleh melanggarnya.

selalu berbuat kebaikan, salah satunya dengan meningkatkan ketaatan dalam membayar uang *contributie* organisasi. Uang *contributie* yang terkumpul tersebut dapat membantu kondisi keuangan para anggota VBSTOL yang sedang dalam kesulitan. Namun demikian, pengaruh krisis yang melanda dunia yang berdampak pada ekonomi Hindia Belanda pun ikut mempengaruhi ketaatan para buruh dalam membayar uang *contributie* hingga pada akhirnya organisasi pun mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan organisasi yang akan dialokasikan untuk anggota yang membutuhkan bantuan.

Tahun 1933 menjadi puncak dari krisis keuangan yang dihadapi oleh VBSTOL. Seringkali peringatan-peringatan dilayangkan oleh pihak *hoofdbestuur* kepada anggota-anggota yang melalaikan kewajibannya dalam membayar uang *contributie*. Kebanyakan dari anggota VBSTOL yang lalai dalam membayar *contributie* menjelaskan bahwa kesulitan hidup akibat *malaise* membuat mereka lebih memprioritaskan penghidupan keluarga mereka dibandingkan penghidupan perkumpulan.<sup>58</sup> Berbagai usaha dilakukan oleh pihak organisasi agar rumah tangga VBSTOL tetap berjalan, termasuk dengan mengganti beberapa orang pengurus VBSTOL, menurunkan jumlah uang *contributie*, dan melakukan penghematan untuk uang sewa gedung organisasi.<sup>59</sup> Akan tetapi, usaha tersebut hanya mampu mempertahankan keberadaan organisasi VBSTOL dari badai krisis keuangan hingga akhir tahun 1934.

---

<sup>58</sup> Pertimbangan, 15 April 1933.

<sup>59</sup> Pertimbangan, 15 Agustus 1933.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada permasalahan yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, setelah berdirinya perusahaan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto pada tahun 1892 dan berlakunya kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di dalam segala aspek kehidupan masyarakat Minangkabau membawa perubahan pada tatanan masyarakat Minangkabau. Misalnya saja, dalam bidang sosial salah satu perubahan yang jelas terlihat adalah dalam hal kekuasaan seorang penghulu dalam suatu nagari di Minangkabau yang mulai digantikan dengan sistem karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen dan asisten residen, sedangkan dalam bidang ekonomi masyarakat Minang mulai mengenal sistem ekonomi uang dalam perdagangan, sistem upah dalam perkebunan dan pertambangan. Disamping itu dalam bidang politik, masyarakat Minang mulai bersentuhan dengan partai politik seperti *Sarekat Islam*, *Sarekat Rakyat*, Partai Komunis Indonesia dan tergabung ke dalam organisasi buruh, sedangkan dalam bidang pendidikan, masyarakat Minang diperkenalkan dengan sistem pendidikan barat dengan didirikannya sekolah dari tingkat dasar sampai menengah di beberapa daerah di wilayah Sumatera Barat.

Kedua, pada tahun 1925 saat PKBT (*Persatoean Kaoem Boeroeh Tambang*) berhasil masuk ke dalam wilayah pertambangan melalui beberapa kadernya yang bekerja di dalam tambang, PKBT menjadi sebuah wadah untuk memperjuangkan ketidakadilan yang selama ini dirasakan di dalam tambang. PKBT menjanjikan sebuah kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan membuat suatu perbedaan, yakni mentransformasikan politik perlawanan buruh yang bersifat individual menjadi protes yang terorganisir. Melalui organisasi inilah buruh mulai mengenal hak dan kewajibannya yang sebenarnya, serta hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pihak perusahaan kepada mereka. Buruh bersama beberapa organisasi politik bekerjasama menggalang kekuatan untuk mendobrak dominasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang dirasakan sewenang-wenang terutama di perusahaan tambang barubara Ombilin. Kekuatan untuk melakukan perlawanan ini mencapai puncaknya pada



malam pergantian tahun 1926/1927, dengan pecahnya pemberontakan buruh di daerah Silungkang.

Ketiga, paham komunis yang disebarluaskan di ranah Minang bukanlah paham komunis yang diterima dari orang-orang komunis dari kalangan sekuler yang telah mendapat pemahaman secara mendalam tentang hakekat ajaran Marxisme mengenai *materialisme historis* dan perjuangan kelas, melainkan dari orang-orang yang menjadikan komunisme sebagai gerakan alternatif. Dimana pemahaman komunis yang didapatkan oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat adalah sebuah bentuk rasa melawan dan tidak puas pada pemerintah Belanda, dan yang terpenting adalah rasa menentang *kapitalisme-imperialisme* untuk mendobrak dominasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat.

Keempat, VBSTOL (*Vereeniging Boemipoetra Staatsspoor, Tramwegen, Ombilinjnen en Landsautomobiendiensten op Sumatra*) merupakan salah satu organisasi buruh yang muncul pada tahun 1929. Organisasi ini lebih memilih bersikap kooperatif terhadap kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu. Perjuangan yang dilakukan organisasi ini dalam meningkatkan kesejahteraan buruh adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan anak negeri. Hal ini diwujudkan VBSTOL dengan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama INS (*Indonesisch Nederlandsche School*) di daerah Kayu Tanam dan INS (*onderbouw*) di daerah Sawah Lunto bekerjasama dengan seorang tokoh pendidikan Sumatera Barat, M. Sjafei. Bagi VBSTOL memajukan pendidikan anak negeri sama halnya dengan memajukan kehidupan bangsa.

Kelima, PKBT dan VBSTOL adalah dua serikat buruh yang lahir dan berkembang pada waktu dan keadaan yang berbeda. PKBT lahir dan berkembang ketika masa radikalisme mencapai puncaknya. Organisasi ini bersikap non kooperatif terhadap setiap kebijakan pemerintah kolonial yang seringkali memberatkan rakyat, sedang VBSTOL lahir dan berkembang ketika kebijakan pemerintah kolonial semakin ketat terhadap organisasi politik dan krisis ekonomi dunia pun melanda Hindia Belanda. Sikap kooperatif adalah pilihan yang diambil oleh VBSTOL agar tetap bisa bergerak memperjuangkan nasib anggotanya yang tak lain adalah kaum buruh yang bekerja pada perusahaan Pemerintah Kolonial Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Primer:

#### Dokumen Pemerintah

Koleksi ANRI, *Besluit Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid* No. 31, 20 Juni 1901.

Koleksi ANRI, *Regeerings Almanak voor Nederlansch Indie*, Tweede Gedeelte Kalender en Personalia, 1926.

Koleksi Perpustakaan Nasional RI, *Jaarboek van Het Mijwezen in Nederlandsch Oost Indie*, no. 3 dan no. 4 bag 1. Batavia: Landsdrukkerij-Weltevreden, 1875.

Koleksi Perpustakaan Nasional RI, *Jaarboek van Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie*. Batavia: Landsdrukkerij, 1913.

Koleksi Perpustakaan Nasional RI, *Verslag van de Sumatra Staatsspoorweg en van de Ombilinmijnen*, jrg1901-jrg1924. Batavia: Landsdrukkerij, 1901-1924.

Koleksi Perpustakaan Nasional RI, *Verslag der Exploitatie van den Staatspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin Kolenvelden Over 1905*. Batavia: Landsdrukkerij, 1906.

#### Surat Kabar

*Bendera Islam*. Jogjakarta, 1927.

*Djago-djago*. Padang Panjang, 1924.

*Pertimbangan*. Padang, 1929-1934.

*Rantai Mas*. Kayu Tanam, 1931.

*Sinar Sumatra*. Padang, 1927.

*Soeara Tambang*. Sawah Lunto, 1925-1926.

*Si Tetap*. Semarang, 1926.

*Tjaja Soematra*. Padang, 1925, 1929-1930.

*Warta Hindia*. Padang, 1925.

### Sumber Sekunder:

#### Artikel

Azheri, Busra. "Konflik Penambang Batubara di Sawah Lunto: Dalam Perspektif Budaya Hukum", dalam Alfian Miko (ed.), *Dinamika Kota Tambang Sawah Lunto: Dari Ekonomi Kapitalis ke Ekonomi Rakyat*. Padang: Andalas University Press, 2006.

Zubir, Zayardam. "Orang Rantai, orang lobang, dan tambang: studi tentang eksploitasi buruh tambang Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat 1891-1927" dalam Edi Sedyawati, Susanto Zuhdi, *Arung Samudera Persembahan Memperingati Sembilan Windu A. B. Lopian*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2001.

Zulqayyim. "Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Sawahlunto Masa Kolonial sampai Sekarang". dalam *Seminar dan Lokakarya Konservasi Bangunan Tua dan Revitalisasi Kota Lama Sawahlunto*. Sawahlunto, 11 Desember 2006.

### **Tulisan yang Tidak Diterbitkan**

Abrar. "Angkutan Kereta Api dan Perkembangungan Ekonomi Sumatera Barat 1887-1940". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Kurniasih, Lilih. "*Indonesisch Nederlandsche School (INS Kayu Tanam) 1926-1942*". Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1990.

Naldi, Hendra. "Perkembangan Media Pers Daerah: Cerminan Perubahan Masyarakat di Sumatera Barat pada Masa Kolonial (1900-1930)". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2002.

Razif. "Tahap-tahap Perekrutan Kuli Kontrak di Perkebunan Karet di Sumatera Timur 1904-1920". Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1988.

Rochendi, Yudian. "Perjuangan Perhimpunan Beambte Spoor dan Tram di Jawa 1927-1934". Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Desember 2008.

Soewarsono. "Kaum Buruh Pergerakan dalam Gerakan Buruh (Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh, 1918-1921)". Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1988.

Suribidari. "Buruh Tambang Batubara Ombilin di Sawah Lunto: Studi Mengenai Kondisi Kehidupan Buruh Periode Kolonial 1892-1920". Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, 1994.

Yulianti, Dewi. "Pers Bumiputera Dalam Era Kolonial Belanda Sinar Djawa-Sinar Hindia: Cerminan Pergerakan Sarekat Islam Semarang (1914-1924)". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Zubir, Zaiyardam. "Kehidupan Buruh Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Sumatera Barat 1891-1927". Tesis Program Pascasarjana Program Studi Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.

### Buku

Adam, Ahmat. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-1913)*. Jakarta: Hasta Mitra Pustaka Utan Kayu, 2003.

Ader, Emile B. *Communism Classic and Contemporary*. New York: Barron's Educational Series, Inc, 1970.

Amran, Rusli. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

Asoka, Andi, dkk. *Sawahlunto: Dulu, Kini, dan Esok, Menyongsong Kota Tambang yang Berbudaya*. Padang: PSH dan Kota Sawahlunto, 2004.

Benda, Harry J, Ruth T. McVey. *The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. Ithaca, New York: Cornell University, 1960.

Bobin AB, Soetrisno Koetojo, Atjep Jamaludin, R. Sumadi, L. Marsudi Warsito. *Monografi Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanpa tahun terbit.

Cahyono, Edi., peny. *Jaman Bergerak di Hindia Belanda: Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978.

Djumadi, S.H., M.Hum. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. Jakarta: PT.Raya Grafindo Persada, 2005.

Erman, Erwiza. *Membaranya Batubara: Konflik Kelas dan Etnik Ombilin-Sawah Lunto-Sumatera Barat (1892-1996)*. Jakarta: Desantara Utama, 2005.

\_\_\_\_\_, et al. *Orang Rantai: Dari Penjara ke Penjara*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

Hamka. *Ajahku: Riwayat Hidup DR. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Djakarta: Penerbit Djajamurni, tanpa tahun terbit.

- Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kompas. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2002.
- Leirissa, R. Z. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Cetakan I. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985.
- Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: LSIK, 1988.
- Makmur, Djohan, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departememn Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993.
- Martamin, Mardjani, et al. *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1982.
- Maters, Mirjam. *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial antara Kebebasan dan Pemberangusan Pers 1906-1942*. Jakarta: KITLV Hasta Mitra Pustaka Utan Kayu, 2003.
- Munasichin, Zainul. *Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926*. Cetakan I. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Nasir, Zulhasril. *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.
- Nasution, Abdul Muluk. *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Mutiara, 1981.
- Navis, A. A. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986.
- Panitia Buku Peringatan Seratus Tahun H. Agus Salim. *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Cetakan II. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1996.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ricklefs. M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.

- Sagimun, M.D, et al. *Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Said, Mohammad. *Koeli Kontrak Tempo Doeloe: Dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Percetakan Waspada, 1977.
- Sandra. *Sejarah pergerakan Buruh Indonesia*. Jakarta: TURC (Trade Union Rights Center), 2007.
- Sitorus, L. M. *Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1987.
- Slametmuljana. *Nasionalisme sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia*. Djilid I. Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1968.
- Sudono, Agus., ed. *Perburuhan Dari Masa ke Masa*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997.
- Sunardi, Adeng. *100 tahun Tambang Batubara Ombilin*. Sawah Lunto: Tanpa Penerbit, 1991.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. *Kihadjadewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: PT. Upima Utama Indonesia, 1986.
- Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Stibbe, D.G. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, Tweede Druck, Vierde Deel, Soemb-Z, S'gravenhage. Leiden: Martinus Nijhoff-E.J.Brill.
- Toeah, H. Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, 1976.
- Utama, Edi., peny. *Sejarah Perjuangan Rakyat Sawahlunto: Dari Penjajahan ke Revolusi Kemerdekaan*. Sawahlunto: DHC Angkatan 45 Kotamadya Sawahlunto dibantu Pemda Kotamadya Sawahlunto, Nopember 1998.
- Wertheim, W. F. *Indonesian Society In Transition: A Study of Social Change*. Bandung: W. van Hoeve Ltd-The Hague, 1956.
- Zed, Mestika. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Jogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.
- Zubir, Zaiyardam. *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai: Eksploitasi Buruh Tambang Batubara Ombilin oleh Kolonial Belanda 1891-1927*. Padang: Andalas University Press, 2006.

## Lampiran 1

**Foto Willem Hendrik de Greve**

Geolog Belanda William Hendrick de Greve lahir pada 15 April 1840 di Franaker Nederlands, menemukan kandungan batubara di tepian Batang Ombilin tahun 1868. Empat tahun kemudian, 22 Oktober 1872 setelah temuannya dipublikasikan, de Greve tewas dalam kecelakaan. Greve terbawa arus deras Sungai Kuantan, Indragiri ketika melakukan ekspedisi kedua untuk melihat kemungkinan transportasi batubara melalui jalur air.

Sumber: Museum Goedang Ransoem Sawah Lunto



## Lampiran 2

## Peta Daerah Penemuan Batubara di Sawah Lunto



Sumber: doc. ANRI 481/72



## Lampiran 3

**Pemimpin Tambang Batubara Ombilin****(1891-1942)**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama</b>
1	1891 s/d 1892	Ir. W. Godefroy
2	1892 s/d 1896	Ir. J.W. Ijzerman
3	1896 s/d 1898	Th. A.M. Ruij
4	1898 s/d 1901	Th. F.A. Delpra
5	1901 s/d 1902	H.F. van Stipriaan Luiscius
6	1902 s/d 1905	W. de Jongh
7	1905 s/d 1907	H.C. Raven
8	1907 s/d 1910	G.P.J. Casperst
9	1910 s/d 1911	F.A. Fokker
10	1911 s/d 1913	G.P.J. Casperst
11	1913 s/d 1915	J. Koomans
12	1915 s/d 1916	J. van der Kloes
13	1916 s/d 1919	G.H.M. Vierling
14	1919 s/d 1926	T. van der Kloes
15	1926 s/d 1928	Th. C. van Wijngaarden
16	1928 s/d 1929	V.W. Ploem
17	1929 s/d 1933	Th. C. van Wijngaarden
18	1933 s/d 1936	W. Holleman
19	1936 s/d 1940	G.J. Wally
20	1940 s/d 1942	W.J.R. Lanzing

Sumber: Adeng Sunardi. *100 tahun Tambang Batubara Ombilin*. Sawah Lunto: Tanpa Penerbit, 1991.

## Lampiran 4

## Foto Sulaiman Labai



Sumber: A. Muluk Nasution. *Pemberontakan Sarikat Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1981, hlm 78.

## Lampiran 5

**Daftar Korban Pemberontakan Silungkang 1926/1927**

Dari Pihak Pemerintah Belanda dan Pemerintah Sumatera Barat:

No	Nama Korban	Jabatan	Keterangan
1	Tuan (Boentjit) Leurs	Kepala BOW	tewas dikediamannya setelah beberapa kali rentetan tembakan dilancarkan oleh pihak pemberontak.
2	Muhammad Djamil galar Rang Kajo Nan Gadang	Kepala Nagari Silungkang	tokoh Minang yang menjadi sasaran pertama dalam pemberontakan Silungkang.
3	Kari Soetan	Tukang Mas	ia tewas bersama anaknya bernama Menek saat berusaha melarikan diri dari serangan pemberontak.
4	Mahmud, Djamin, Rahman	Guru	dibunuh pada malam pemberontakan Silungkang karena dianggap sebagai pihak yang royal kepada pemerintah kolonial.
5	Hamid galar Soetan Pamuncak	Petugas karcis stasiun Kereta Api Silungkang	tewas di hajar oleh pemberontak dengan golok dan sejumlah tembakan, setelah sempat melarikan diri ke stasiun Silungkang.
6	Letnan Simon		tewas pada tanggal 2 Januari 1927 pada saat ia melakukan operasi pengejaran dan penangkapan terhadap rombongan Abdul Munaf di daerah Padang Sibusuk. Ia tewas di sebuah jembatan "viaduct" (penyeberangan jalan

			kereta api dan mobil dibawahnya) dengan beberapa tembakan.
7	.....*	Asisten Demang Sicincin	tewas pada malam pemberontakan.
8	Beberapa orang P.I.D Padang dan Pariaman*	P.I.D Padang dan Pariaman	tewas pada malam pemberontakan.

Dari Pihak Pemberontak:

No	Nama Korban	Jabatan	Keterangan
1	M. Yamin dan Kasan Wijoyo	Anggota Sarekat Rakyat	tewas pada saat terjadinya baku tembak antara pihak pemberontak dan tentara kolonial.
2	Abdul Munaf	Guru <i>Gubernemen Inlandsche School</i> Tanjung Ampalu	tewas pada saat peristiwa pemberontakan berlangsung.
3	Patai Rajo Jambi	Pemimpin Sarekat Hitam	tewas di Padang saat terjadinya pengejaran oleh marsose terhadap gembong Sarekat Hitam.

Keterangan: \*tidak ada informasi lengkap tentang nama-nama para korban.

Sumber: Dirangkum dari beberapa sumber, Abdul Muluk Nasution. *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Mutiara, 1981, *Bendera Islam*, No. 122/ tahun ke-4, Padang, 27 dan 30 Juni 1927, dan Mestika Zed. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Jogjakarta: Syarikat Indonesia, 2004.



## Lampiran 7

**Struktur dan Personal Pegawai Eropa  
pada Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto**

BIJLAGE I.

OPGAVE VAN HET EUROPEESCH PERSONEEL WERKZAAM BIJ  
DE OMBILINMIJNEN OP ULT. DECEMBER 1913.

Chef der Exploitatie van den Sumatra-Staats- spoorweg en de Ombilinmijnen .....	J. Koomans.
Hoofdopziener .....	W. A. Brüggemann.
Opziener der 1 <sup>e</sup> klasse .....	A. V. Borst.
" " " " .....	K. A. A. Urban.
" " " " .....	W. Lengerling.
" " " " .....	G. L. Schultz.
" " " " .....	P. P. Kasteel.
" " " " .....	J. van der Neut.
" " " " .....	W. van der Valk (gedeta- cheerd op Banka).
" " 2 <sup>e</sup> " .....	F. J. Eijnsma.
" " " " .....	E. W. Borst.
" " " " .....	P. J. C. A. G. König.
" " " " .....	A. F. Rompies.
" " " " .....	F. W. Straatman.
" " " " .....	G. A. Goedegebuure.
" " " " .....	A. H. Kuijlaars.
" " " " .....	A. van Wieringen.
" " " " .....	A. de Voogd van der Straaten.
" " " " .....	A. Hocking. (tijd).
" " 3 <sup>e</sup> " .....	J. F. H. Bagajja.
" " " " .....	A. Fortunatie.
" " " " .....	A. Gunther.
" " " " .....	J. de Vries.
" " " " .....	G. J. Schipperus.
" " " " .....	M. Th. van Heije.
" " " " .....	A. V. G. L. Whitton. (tijd.).
Geneesheer .....	S. H. de Granade. (wd.).
Werktuigkundig-Electrotechnisch Ingenieur....	D. J. L. Coninck Westen- berg.
Chef der werkplaatsen.....	L. Senstius.
Machinist der 3 <sup>e</sup> klasse .....	K. A. J. Marcus.
" " 2 <sup>e</sup> " .....	H. S. Hageman.
" " " " .....	J. F. G. Maurer.
" " " " .....	J. W. Eusman.
" " 3 <sup>e</sup> " .....	A. Wits.
Mijnmeter .....	Ch. Klees. (tijd).

Boekhouder.....	E. E. Mathey.
Adjunct boekhouder.....	C. W. Heidemann.
Magazijnmeester.....	J. J. van de Giessen.
Tweede commiss.....	J. W. Borst, Jr.
"    "    .....	I. van Don.
"    "    .....	P. J. Schuyt.
Derde    "    .....	B. W. Linthorst.
Ambtenaar voor de Verplegingsdienst.....	H. Süsskind.

BIJ DE ONTGINNING GEDETACHEERD PERSONEEL.

Van het Mijnwezen:

Ingenieur-Directeur mijn-ing:.....	H. Tromp. (wd.).
Ingenieur.....	E. R. D. Göllner.
"    .....	Th. C. van Wijngaarden.
"    .....	L. Löb.

Van den Sumatra Staatsspoorweg.

Opzichter.....	A. M. D. van Kuilenburg.
"    .....	J. E. von Haack.

Van het Grondpeilwezen.

Boormeester.....	H. A. Reijdon.
------------------	----------------

Sumber: *Gouvernements Steenkolentginning Nabij Sawah Lunto (Ombilinmijnen)*,  
 dalam *Jaarboek van Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie*.  
 Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. (Batavia: Landsdrukkerij, 1913), hlm  
 198-199.

## Lampiran 8

**Perkembangan Jumlah Penduduk Pribumi****Sumatera Barat Menurut Afdeeling**

<b>Nama Afdeeling</b>	<b>1875</b>	<b>1880</b>	<b>1905</b>	<b>1920</b>	<b>1930</b>
Padang	21.162	47.839	83.337	316.498	392.640
Pariaman	89.107	103.186	165.595		
Painan			117.896	192.697	247.665
Agam	180.621	182.834	230.928	352.529	431.995
Tanah Datar	180.404	192.216	245.927	259.830	289.215
Lima Puluh Kota	129.635	141.611	190.799	220.218	259.746
XIII dan IX Koto	70.980	91.461	120.465	219.916	275.449
Batipuh dan X Koto	43.972	38.898	54.989		

Sumber: Arsip *Sumatra's Weskust* No. 128.23,129.6. Arsip Nasional RI, Jakarta.  
*Kolonial Verslag* 1907 Lampiran A, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta  
*Volkstelling 1930*. (Batavia: Departemen van Economische Zaken, 1935)  
 tabel II., hlm 8-11.



## Lampiran 9

**Pertumbuhan Jumlah Penduduk Asing  
Sumatera Barat Berdasarkan Sensus**

<b>Nama Afdeeling</b>	<b>Eropa</b>	<b>Cina</b>	<b>Asia Timur Lainnya</b>	<b>Total</b>
<b><u>Sensus 1852</u></b>				
Padang	662	1.140	953	2.755
Pariaman	48	223	209	480
Painan	32	73	17	122
Air Bangis& Rao	13	12	23	48
Agam	30	49	190	269
Tanah Datar	21	12	100	133
LimaPuluhKota	9	3	10	22
XIII Koto dan IX Koto/Solok	12	5	24	41
<b>Total</b>	<b>827</b>	<b>1.517</b>	<b>1.526</b>	<b>3.870</b>
<b><u>Sensus 1920</u></b>				
Padang	2.782	7.936	1.383	12.101
Painan	82	844	79	1.005
Agam	438	688	168	1.294
Tanah Datar	566	638	64	1.268
Lima Puluh Kota	126	832	56	1.014
Solok	153	148	48	349
<b>Total</b>	<b>4.147</b>	<b>11.086</b>	<b>1.798</b>	<b>17.031</b>
<b><u>Sensus 1930</u></b>				
Padang				
Painan	2.982	8.563	1.637	13.182
Agam	185	1.939	120	2.244
Tanah Datar	693	1.208	311	2.212
Lima Puluh Kota	321	517	116	954
Solok	137	1.405	89	1.631
	795	1.330	84	2.209
<b>Total</b>	<b>5.113</b>	<b>14.962</b>	<b>2.357</b>	<b>22.432</b>

Keterangan: Pada tahun 1920 terjadi penggabungan terhadap beberapa afdeeling, Padang dengan Pariaman, Agam dengan Lubuk Sikaping&Pasaman, Tanah Datar dengan Batipuh serta Sawah Lunto keluar dan bergabung dengan Solok.

Sumber: Elizabeth E.Graves. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in The Nineteenth Century*. (Ithaca New York: Cornel Moderen Indonesia Project, 1981), hlm 44-45, dan A.I. Spits. MVO van den Aftredende de Resident van Sumatra's Weskust. Arsip Nasional RI, Jakarta, hlm 1, dikutip dari Hendra Naldi. "Perkembangan Media Pers Daerah: Cerminan Perubahan Masyarakat di Sumatera Barat pada Masa Kolonial (1900-1930)". Tesis Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2002, hlm 58.

## Lampiran 10

**Daftar Pelaku Pemberontakan Silungkang 1926/1927**

No	Nama	Jabatan	Jenis Hukuman	Keterangan
1	Soetan Batuah	ketua Sarekat Rakyat cab. Batusangkar	2-4 tahun hukuman penjara	tertangkap pada saat terjadi demonstrasi tak bersenjata di Batusangkar.
2	Nerus Ginting dan Nambah Bangun	pemimpin Sarekat Rakyat Tanah Karo	dibuang ke Boven Digul	
3	Abdul Wahab Soetan Bandaro	anggota Sarekat Rakyat	4 tahun hukuman penjara	di tangkap di daerah Cubadak Talu.
4	Basir	anggota Sarekat Rakyat	4 tahun hukuman penjara	di tangkap di daerah Cubadak Talu.
5	Abdul Hakim	anggota Sarekat Rakyat	4 tahun hukuman penjara	di tangkap di daerah Cubadak Talu.
6	Abdul Manan	anggota Sarekat Rakyat	4 tahun hukuman penjara	di tangkap di daerah Cubadak Talu.
7	Sarah galar Datuak Sati	anggota Sarekat Rakyat di Pasaman	4 tahun hukuman penjara	
8	Amran	anggota Sarekat Rakyat di Pasaman	4 tahun hukuman penjara	
9	Duano	anggota Sarekat Rakyat di Pasaman	4 tahun hukuman penjara	

10	Muhammad Zen	anggota Sarekat Rakyat	hukuman seumur hidup	
11	Pakih 'Ain (Berahim)	anggota Sarekat Rakyat	hukuman seumur hidup	
12	Kamaruddin alias Manggulung	anggota Sarekat Rakyat	hukuman gantung	
13	Sampono Kajo	anggota Sarekat Rakyat	hukuman gantung	
14	Ibrahim	anggota Sarekat Rakyat	hukuman gantung	
15	Abdul Muluk Nasution	pemimpin PKBT pada masa-masa terakhir.	12 tahun hukuman penjara	
16	Muhammad Tahir	anggota Sarekat Rakyat	6 tahun hukuman penjara	
17	Bahaudin	anggota Sarekat Rakyat	6 tahun hukuman penjara	
18	Rahman	anggota Sarekat Rakyat	6 tahun hukuman penjara	
19	Muhammad Tayib Ongah	anggota Sarekat Rakyat	20 tahun hukuman penjara	
20	Sulaiman Labai	pemimpin Sarekat Rakyat Silungkang	28 tahun hukuman penjara	
21	Datuak Bagindo Ratu	anggota Sarekat Rakyat	dibuang ke Boven Digul	
22	Salamah	anggota Sarekat Rakyat	di buang ke Boven Digul	Istri dari Datuak Bagindo Ratu
23	Jamal Basri	anggota Sarekat Rakyat	dibuang ke Boven Digul	

24	Upik Itan	anggota Sarekat Rakyat	dibuang ke Boven Digul	
25	Saleh Mangkuto Sati	anggota Sarekat Rakyat	dibuang ke Boven Digul	
26	Talaha Soetan Langit	anggota Sarekat Rakyat	dibuang ke Boven Digul	
27	Talaha Soetan Jambi	anggota Sarekat Rakyat	dibuang ke Boven Digul	
28	Sersan Mayor Pontoh	pemimpin pasukan pemberontakan Silungkang 1927.	10 tahun hukuman penjara	
29	Sersan Rumuat	pasukan/tentara pemberontakan	6 tahun hukuman penjara	
30	Sersan Wenas	pasukan/tentara pemberontakan	6 tahun hukuman penjara	
31	Kopral Jela Jela Takuru	pasukan/tentara pemberontakan	6 tahun hukuman penjara	

Sumber: Dirangkum dari beberapa sumber, Abdul Muluk Nasution. *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Mutiara, 1981, *Bendera Islam*, No. 122/ tahun ke-4, Padang, 27 dan 30 Juni 1927, dan Mestika Zed. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.

Lampiran 11

**Foto Kegiatan Buruh di tambang batubara Ombilin**

FOTO 1



Wagon-wagon yang sudah diisi ditambang batubara Ombilin

Sumber: doc. ANRI. B. 1842 63-69 Nigis

FOTO 2



Buruh sedang memuatkan batubara ke dalam lori

Sumber: doc. ANRI.B. 1823

FOTO 3



Batubara dan pekerja satu lokomotif

Sumber: doc. Museum Goedang Ransoem 0067. 11. 067

FOTO 4



Buruh tambang sesampainya di rumah dikerumuni anak-anaknya

Sumber: doc. Museum Goedang Ransoem 0086. 11. 086



FOTO 5



Buruh dalam lubang mendapatkan air dari tank air atas lori

Sumber: doc. ANRI.B. 1824 63-54

FOTO 6



Buruh se usai bekerja di dalam lubang tambang, Sawah Lunto pada tahun 1930-an

Sumber: doc. Museum Goedang Ransoem 0054. 11. 054

FOTO 7



Pemandangan di tambang batubara Ombilin Sawah Lunto

Sumber: doc. ANRI. A. 767. 63-7 Nigis

FOTO 8



Kawasan perumahan untuk pekerja tambang batubara Ombilin dibangun pada tahun 1930-an dalam satu kawasan. Kompleks perumahan ini dinamai Tangsi Baru.

Sumber: doc. ANRI 530501 CC 78.



FOTO 9



Seorang buruh sedang mengisi lori dengan batubara

Sumber: doc. ANRI.A. 8922 Nigis

FOTO 10

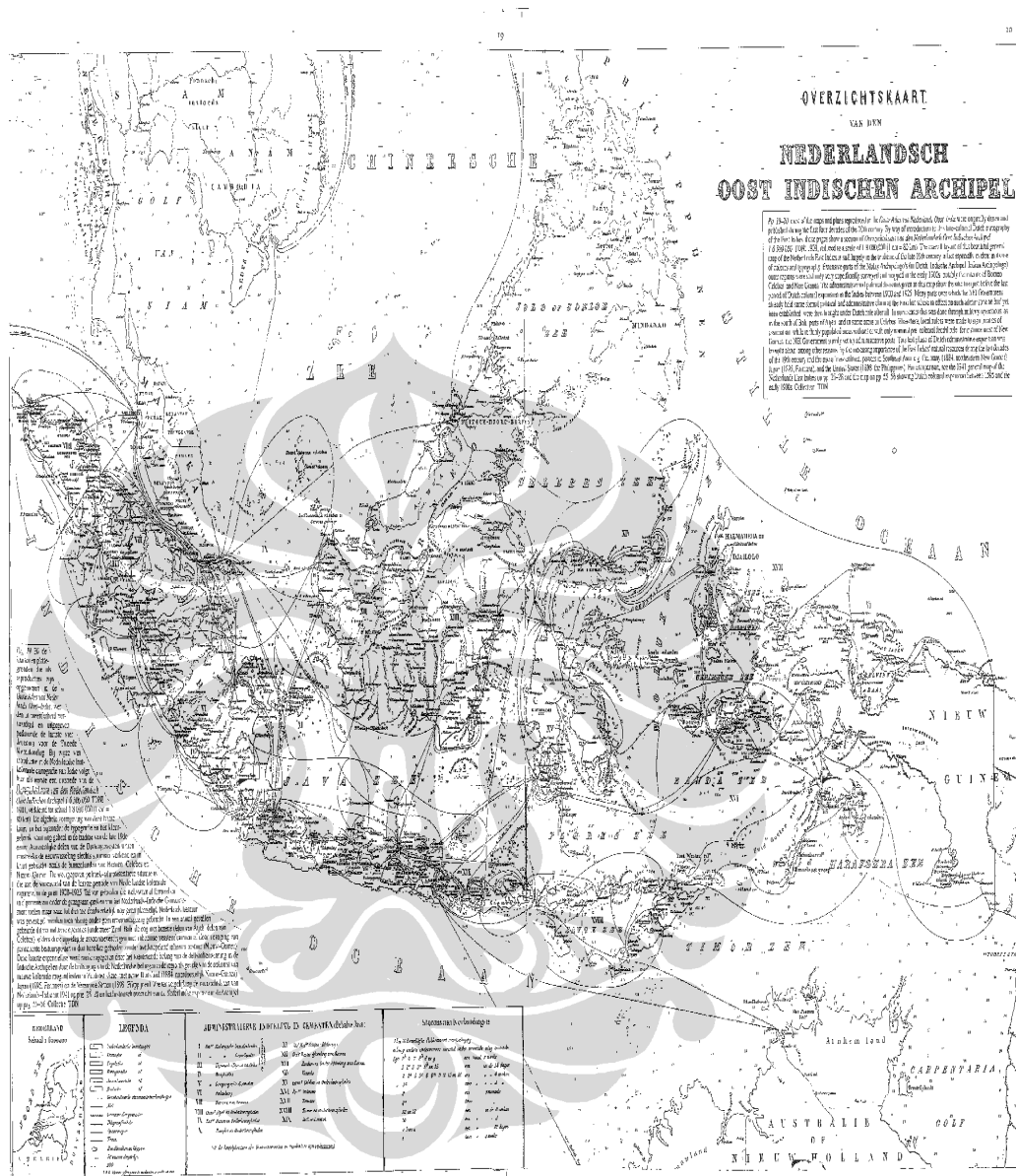


Suasana di pintu lubang tambang Durian tahun 1900. Para pekerja dibawah pengawasan ketat mandor Belanda dibantu mandor pribumi sebelum buruh masuk ke lubang tambang.

Sumber: doc. Museum Goedang Ransoem 0025. 11. 025

Lampiran 12

Peta Hindia Belanda

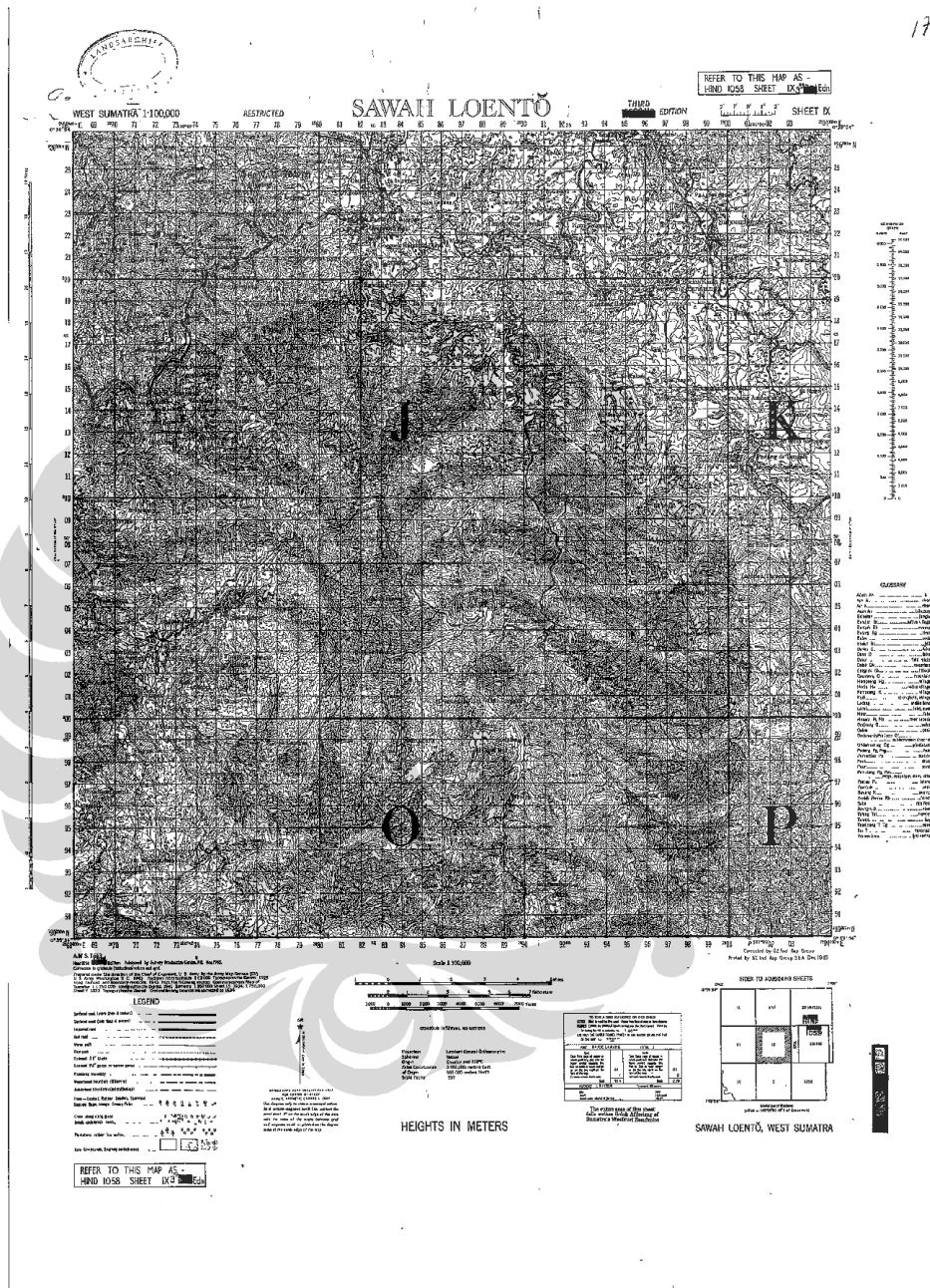


Sumber: Drs. J.R van Diessen, and Prof. DR. F.O. Ormeling. *Grote Atlas van Nederlands Oost Indie: Comprehensive Atlas of the Nederlands East Indies*. Asia Maior-KNAG.



Lampiran 14

Peta Sawah Lunto



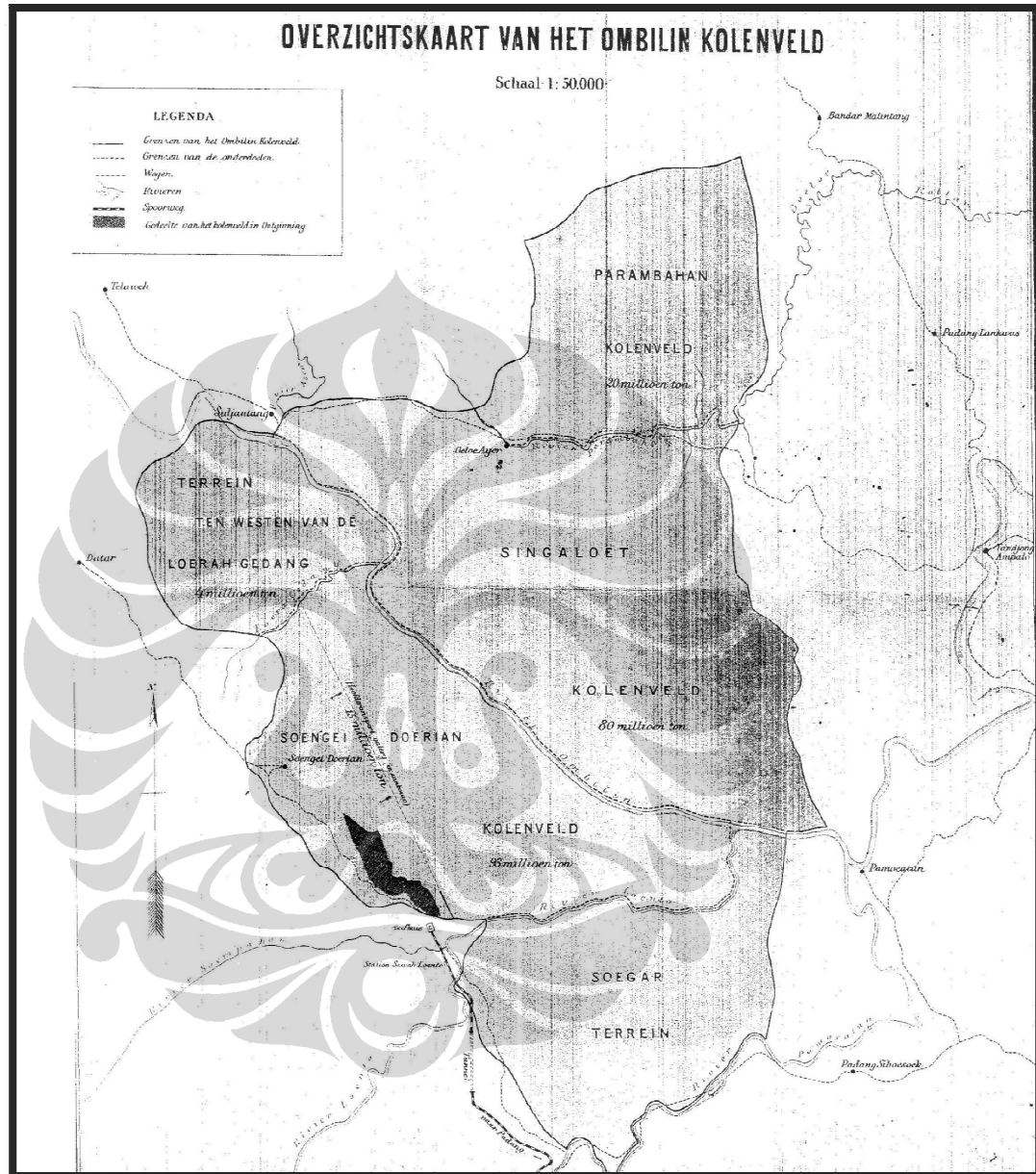
Sumber: Kartografi Indonesia 1914-1942. ANRI: 1750/Sheet 92.





## Lampiran 16

## Peta Daerah Tambang Batubara Ombilin



Sumber: Gouvernements Steenkolentginning Nabij Sawah Lunto (Ombilinmijnen), dalam *Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie*. Batavia: Landsdrukkerij, 1913, hlm 175.

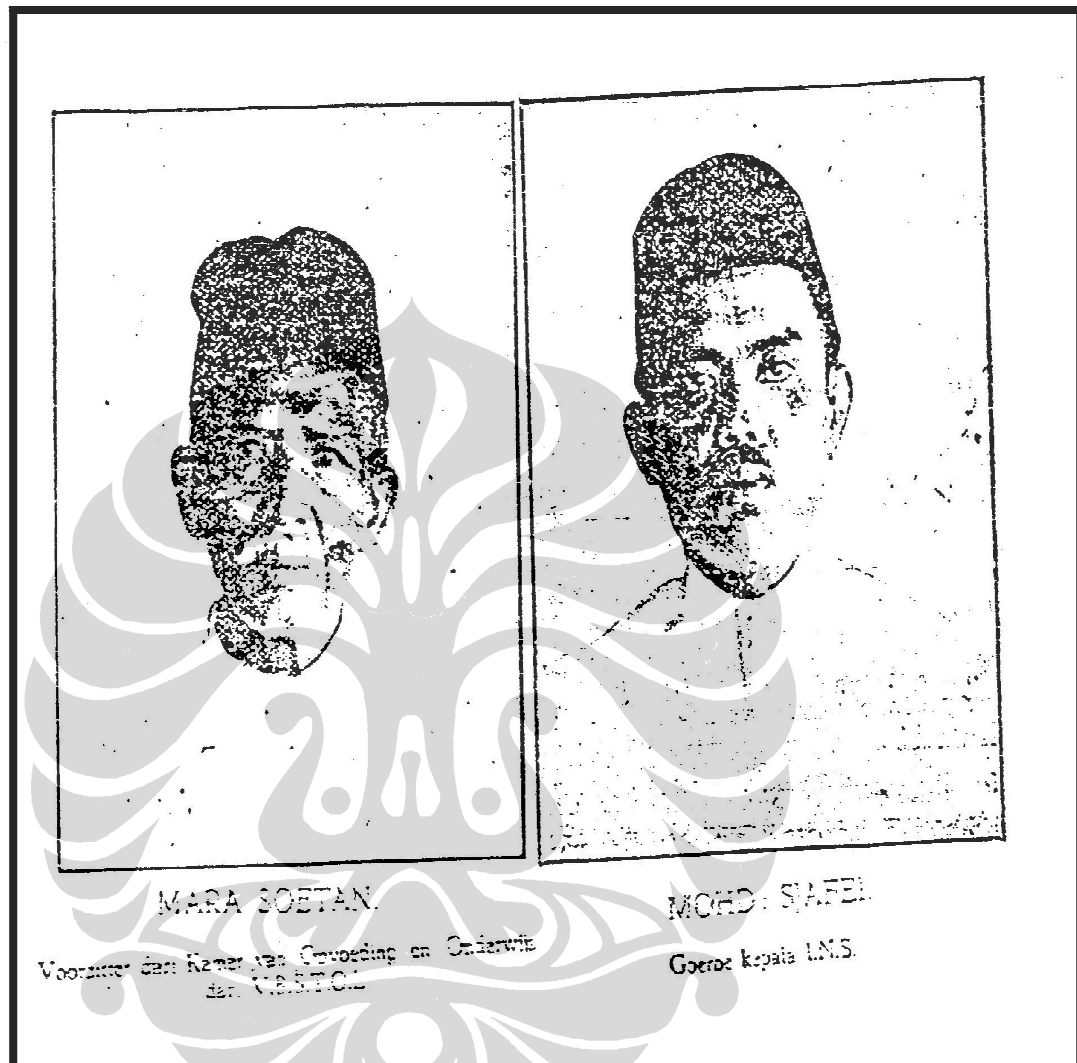






## Lampiran 19

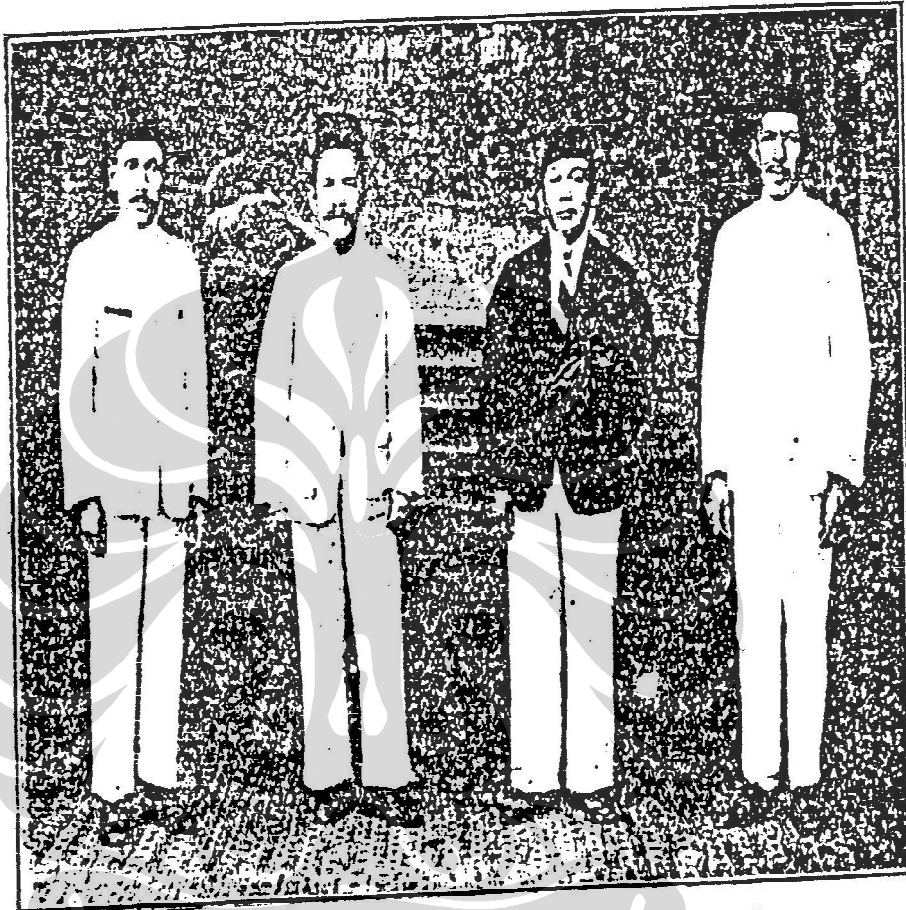
## Foto Pelopor INS Kayu Tanam



Sumber: *Rantai Mas*. Kayu Tanam, 1931.

Lampiran 20

## Foto Hoofdbestuur V.B.S.T.O.L



Anggota Hoofdbestuur V. B. S. T. O. L.

Dari kiri kekanan:

Datoek Bangso di Radio (Penningmeester).

Marah Maharadia (vice voorzitter).

Wahid (Ho. Secretaris).

Mond Said (2e. Secretaris).

Sumber: *Rantai Mas*. Kayu Tanam, 1931.